

**ISU-ISU PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(TEORI DAN PRAKTEK)**

Dr. H. AHMAD YUNANI, SE, M.Si

CV. IRDH

**ISU-ISU PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(TEORI DAN PRAKTEK)**

Penulis : Dr. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si
Editor : Yulita, SE., M.AP
Penata Letak : Nada Zuhriyah, S.Kom
Pracetak dan Produksi : Dito Aditia, S.Pi
Perancang Sampul : Meva Ainawati

Hak Cipta © 2022, pada penulis

Hak publikasi pada CV. IRDH

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama, April 2022

Penerbit CV. IRDH

Anggota IKAPI No. 159-JTE-2017

Office: Jl. Sokajaya No. 59, Purwokerto

Perum New Villa Bukit Sengkaling C9 No. 1 Malang

HP : 0813 5721 7319, WA : 089 621 424 412

www.irdhcenter.com

Email : buku.irdh@gmail.com

ISBN :

i-v +309 hlm, 17,6 cm x 25 cm

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia Nya sehingga buku Isu-Isu Perencanaan Pembangunan (Teori dan Praktik) dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini sengaja disusun dengan tema perencanaan sektoral dimana didalamnya akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dengan studi kasus pada beberapa aspek perencanaan terutama aspek perencanaan dengan perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan lingkungan, perencanaan sektor pertanian, perencanaan sektor pendidikan, dan perencanaan sektor kesehatan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menerbitkan buku ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa S3 Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 yang selama ini mendukung dan berkontribusi proses penyelesaian buku ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini kami juga mengucapkan terima kasih. Akhirnya penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dalam pengembangan keilmuan bidang Perencanaan Pembangunan. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada penulis demi kebaikan dan perbaikan dalam buku ini.

Banjarmasin, 1 April 2022

Penulis

Dr. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2. Kebijakan-Kebijakan Dalam Pembangunan Ekonomi	3
BAB II TEORI DAN KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...	8
2.1 Teori Perubahan Struktural Ekonomi	8
2.2 Paradigma Baru Pembangunan	9
2.3 Teori Pembangunan Model Rostow	13
2.4 Perencanaan Pembangunan	16
2.5 Pengembangan Wilayah	18
2.6 Teori Prasarana Transportasi	35
BAB III ISU PERENCANAAN EKONOMI	42
3.1 Latar Belakang	42
3.2 Permasalahan	49
3.3 Tinjauan Teoritis	49
3.4 Penelitian Terdahulu	61
3.5 Pendekatan	69
3.6 Pembahasan	70
3.7 Kesimpulan	90
BAB IV ISU PERENCANAAN SEKTOR PERTANIAN	91
4.1 Latar Belakang	91
4.2 Permasalahan	94
4.3 Kajian Pustaka	96
4.4 PEMBAHASAN	113
4.5 Kesimpulan	120
BAB V ISU PERENCANAAN APSEK PENDIDIKAN	122

5.1 Latar Belakang	122
5.2 Landasan Teori.....	125
5.3 Penelitian Terdahulu	131
5.4 Pembahasan.....	134
5.5 Kesimpulan	142
BAB VI ISU PERENCANAAN ASPEK KESEHATAN.....	144
6.1 Latar Belakang	144
6.2 Tinjauan Pustaka	151
6.3 Pembahasan.....	166
6.4 Kesimpulan dan Saran.....	179
BAB VII ISU PERENCANAAN ASPEK LINGKUNGAN	182
7.1 Latar Belakang	182
7.2 Permasalahan.....	185
7.3 Tinjauan Pustaka	186
7.4 Pembahasan.....	200
7.5 Kesimpulan	218
BAB VIII ISU PERENCANAAN ASPEK SOSIAL	220
8.1 Latar Belakang	220
8.2 Permasalahan.....	222
8.3 Tinjauan Pustaka	223
8.4 Isu Stunting	240
8.5 Pembahasan.....	245
8.6 Kesimpulan	269
DAFTAR PUSTAKA	271
GLOSARIUM	300
INDEKS	301
TENTANG PENULIS	302

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teori Sektoral.....	26
------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Table 1 Data UMKM di Kota Banjarmasin Tahun 2013 - 2019	48
Tabel 2 Jangka Pendek.....	265
Tabel 3 Jangka Menengah.....	268
Tabel 4 Jangka Panjang.....	269

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Kebijakan Indonesia dalam masalah ekonomi terus dilakukan dan dikembangkan. Hal ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, untuk menjaga stabilitas makroekonomi diperlukan dua kebijakan penting, yaitu: Pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun nonfisik.

Pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan e-commerce. Kombinasi kebijakan tersebut didukung

partisipasi swasta secara aktif. Diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial ekonomi.

Kebijakan Indonesia Terdapat lima kesepakatan kebijakan yang konsisten dan bersinergi, yaitu: Percepatan infrastruktur Mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. Upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Hal tersebut dilakukan melalui: Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten atau kota. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa. Pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Perkembangan sektor ekonomi potensial Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah.

Perkembangan sektor industri Mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi. Selain pengembangan infrastruktur fisik juga dilakukan upaya sebagai berikut: Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi. Seperti pembangunan dan penyelenggaraan politeknik atau akademisi di kawasan industri.

Meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM) dengan pendampingan yang memastikan jaminan produk, keamanan, dan standar. Optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi IKM ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia. Pengembangan sektor

pertanian Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian.

Memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan corporate farming. Sehingga agroindustri-agrobisnis berkembang. Meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian antara lain melalui penyaluran KUR pada sektor primer. Di dukung dengan asuransi pertanian dan peternakan. Melakukan intensifikasi pertanian, serta meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan perbaikan tata niaga pangan. Pengembangan sektor pariwisata Pengembangan sektor pariwisata bisa dilakukan dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas sebagai *quick wins*.

Hal tersebut bisa diaplikasikan pada destinasi unggulan pariwisata tematik, seperti wisata bahari, sejarah, religi, dan tradisi seni budaya. Penguatan branding dan promosi wisata di daerah juga terus dioptimalkan dengan menggunakan teknologi dan e-commerce.

1.2. Kebijakan-Kebijakan Dalam Pembangunan Ekonomi

Bentuk Kebijakan Ekonomi Di negara Berkembang

Kebijakan-kebijakan terutama mengarah kepada alternative bagaimana mengatasi Pengangguran, Kemiskinan, Ketimpangan, Stagnasi di pedesaan, Dominasi intelek internasional. Kebijakan yang dibutuhkan di negara berkembang adalah kebijakan atau seperangkat kebijakan yang dirancang untuk memperbaiki efisiensi produktif yang lebih besar dan memperluas lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan. Kebijakan selanjutnya untuk membawa perubahan-perubahan struktural dalam pemerataan, kekuatan untuk memperoleh

pendidikan dan kesempatan untuk memperbaharui ukuran pemerataan pendapatan melalui pajak progresif

Syarat untuk perkembangan ekonomi adalah terjadinya akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk seperti Tanah, Peralatan fisik dan Sumber daya manusia. Kemampuan sistem ekonomi untuk bisa menyerap dan memperkerjakan secara produktif tambahan tenaga kerja untuk kemampuan yang pada umumnya berhubungan dengan tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedia keahlian manajerial dan administrasi. Kemampuan teknologi adalah hasil dari cara yang telah diperbaiki dalam pekerjaan tradisional. Adanya inovasi sehingga menghasilkan suatu barang dengan proses produksi yang mempunyai nilai tambah.

Kesulitan yang umum pembangunan ekonomi adalah perdagangan luar negeri, pembentukan modal tabungan, bantuan luar negeri, pendidikan, penduduk pengangguran sektor industri dan sektor pertanian. Masalah-masalah Khusus dalam Pembangunan Ekonomi modal yang rendah akibat sector tabungan yang masih rendah, sehingga investasi dan lapangan kerja masih sedikit. skill yang rendah akibat tingkat pendidikan yang rendah, tenaga kerja yang produktif yang rendah.

Tujuan bersifat ekonomi adalah tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada tiga hal pertimbangan utama : untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru; untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat; memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Tujuan bersifat sosial dan politik, tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat

dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah sosial dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran : meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga; menghindari masalah kejahatan; mewujudkan kestabilan politik.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan sisi penawaran untuk mengatasi masalah perekonomian dan mendorong perekonomian berkembang lebih cepat melalui perencanaan pembangunan yang komprehensif. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral (di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia) untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan

pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran, kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya.

Untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah masing-masing institusi di atas perlu menjalankan hal berikut: Untuk mengatasi pengangguran: Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat: kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga (konsumsi). Untuk mengatasi inflasi: Tindakan yang perlu dijalankan Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga (konsumsi). Seterusnya Kementerian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Bentuk kebijakan pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran adalah sebagai berikut: Untuk mengatasi pengangguran: Mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi dan mengurangi pajak perusahaan dan individu. Untuk mengatasi inflasi: Melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti

mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi.

BAB II

TEORI DAN KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2.1 Teori Perubahan Struktural Ekonomi

Teori pergantian struktur ekonomi menitik beratkan pada mekanisme transformasi ekonomi yang di natural oleh negeri ataupun pada wilayah lagi tumbuh yang semula bertabiat subsisten serta menitik beratkan pada zona pertanian mengarah ke struktur ekonomi yang modern di dominasi oleh zona industri serta jasa(Todaro, 1999).

Bagi Kuznet dalam Jhingan(1992: 420), pergantian struktur ekonomi ataupun diucap pula transformasi struktural selaku sesuatu rangkaian pergantian yang silih berkaitan satu sama yang lain dalam komposisi dari permintaan agregat, perdagangan luar negeri(ekspor serta impor), penawaran agregat (penciptaan serta pemakaian faktor- faktor penciptaan, semacam pemakaian tenaga kerja serta modal) yang diakibatkan dengan terdapatnya proses pembangunan serta perkembangan ekonomi yang berkepanjangan. Perekonomian pada sesuatu wilayah dalam jangka panjang hendak hadapi pergantian struktur perekonomian yang semula mengandalkan sektor

pertanian hendak mengarah zona industri ataupun jasa. Pada sisi tenaga kerja hendak menimbulkan terbentuknya perpindahan pemakaian tenaga kerja dari zona pertanian desa mengarah ke zona industri kota, sehingga donasi pertanian menyusut. Terdapat sebagian komentar para pakar tentang

terbentuknya transformasi struktural yang terjalin di antara lain selaku berikut :

2.2 Paradigma Baru Pembangunan

Pembangunan ekonomi secara universal bisa didefinisikan selaku sesuatu rangkaian proses pergantian dalam perekonomian buat mengembangkan aktivitas ekonominya, sehingga terjalin perkembangan, pertumbuhan serta kenaikan tingkatan mutu hidup manusia, teknologi, serta infrastruktur. Perihal ini berimplikasi pada kenaikan kesejahteraan serta kemakmuran warga yang diukur dari kenaikan pemasukan serta kenaikan tingkatan mutu hidup manusianya.

Bagi Kuznets(1955) dalam Arsyad(2010), bersumber pada pengamatannya pada negara-negara maju merumuskan kalau tiap proses pembangunan ekonomi hendak ada 3 ciri, ialah:

1. Penciptaan, baik jumlah ataupun jenisnya terus menerus meningkat;
2. Teknologi yang terus menerus tumbuh;
3. Supaya pertumbuhan ekonomi itu jadi faktor yang tidak lepas dari perkembangan teknologi, diperlukan penyesuaian kelembagaan, pandangan hidup serta perilaku hidup.

Secara universal, para ekonom membedakan antara perkembangan serta pembangunan ekonomi. Mayoritas literatur ekonomi mengartikan perkembangan ekonomi selaku sesuatu dimensi kuantitatif yang menggambarkan pertumbuhan sesuatu perekonomian dalam sesuatu tahun tertentu apabila dibanding

dengan tahun tadinya(Sukirno, 2006). Pertumbuhan tersebut senantiasa dinyatakan dalam wujud persentase pergantian pemasukan nasional pada sesuatu tahun tertentu dibanding dengan tahun tadinya.

Bagi Jhingan(2012) pembangunan ekonomi didefinisikan dalam 3 metode berikut ini.

1. Pembangunan ekonomi wajib diukur dalam makna peningkatan pemasukan nasional riil dalam sesuatu jangka waktu yang sangat panjang. Pemasukan nasional riil ini merujuk pada totalitas output benda serta jasa dari negeri tersebut.
2. Definisi kedua berkaitan dengan peningkatan pemasukan riil per kapita dalam jangka panjang. Para ekonom berkomentar sama dalam mendefinisikan pembangunan ekonomi dalam makna peningkatan pemasukan ataupun output riil per kapita. Definisi ini menekankan kalau untuk pembangunan ekonomi, tingkatan peningkatan pemasukan riil sepatutnya lebih tinggi daripada tingkatan perkembangan penduduk.
3. Terdapat kecenderungan lain buat mendefinisikan pembangunan ekonomi dari titik kesejahteraan ekonomi. Selaku contoh, pembangunan ekonomi ditatap selaku sesuatu proses dimana pemasukan nasional riil per kapita naik dibarengi dengan penyusutan kesenjangan pemasukan serta pemenuhan kemauan warga secara totalitas.

Bagi Jhingan(2012) definisi yang sudah disebutkan tersebut tidak leluasa dari bermacam keterbatasan. Awal, dapat

saja terjalin peningkatan pemasukan nasional ataupun pemasukan per kapita, tetapi kesenjangan pemasukan malah terus menjadi melebar. Kedua, dalam mengukur kesejahteraan ekonomi wajib hati-hati paling utama berkaitan dengan komposisi output total yang menyumbang kepada peningkatan pemasukan riil per kapita serta gimana output tersebut dinilai. Kesusahan yang timbul yakni terletak pada metode memperhitungkan output. Ketiga, wajib memikirkan pula tentang gimana sesuatu produk tersebut dibuat. Keempat, tidak lumayan memandang peningkatan kesejahteraan warga cuma diukur dari peningkatan output per kapita, melainkan wajib pula memasukkan bermacam pertimbangan bonus semacam distribusi pemasukan, komposisi output, serta yang yang lain.

Dalam mayoritas literatur dini menimpa pembangunan ekonomi yang diterbitkan tahun 1950-an serta 1960-an, pada biasanya pembangunan ekonomi didefinisikan selaku berikut, ialah sesuatu proses yang menimbulkan pemasukan per kapita penduduk sesuatu negeri bertambah secara berkepanjangan dalam jangka panjang.

Bagi Sukirno(2006) metode yang sangat gampang buat membedakan makna perkembangan ekonomi serta pembangunan ekonomi merupakan dengan memakai ungkapan“ Pembangunan ekonomi merupakan perkembangan ekonomi ditambah dengan pergantian”. Maksudnya, terdapat tidaknya pembangunan ekonomi dalam sesuatu negeri pada sesuatu tahun tertentu tidak saja diukur dari peningkatan penciptaan benda serta jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, namun pula

butuh diukur dari pergantian lain yang berlaku dalam bermacam aspek aktivitas ekonomi semacam pertumbuhan pembelajaran, pertumbuhan teknologi, kenaikan kesehatan, kenaikan infrastruktur serta kenaikan pemasukan serta kemakmuran warga.

Pembangunan ekonomi ditunjukkan pada terus menjadi Rendahnya jurang pembangunan yang terjalin di sesuatu negeri. Zimmerman(1965) dalam Sukirno(2006) menganalisis menimpa lajunya tingkatan pembangunan ekonomi di sebagian negeri di dunia di antara tahun 1860- 1960 serta implikasi kepada jurang pembangunan. Oleh sebab pembangunan ekonomi meliputi bermacam aspek pergantian dalam aktivitas ekonomi, hingga dimana taraf pembangunan ekonomi yang dicapai sesuatu negeri sudah bertambah, tidak gampang diukur secara kuantitatif. Bermacam tipe informasi butuh dikemukakan buat menampilkan prestasi pembangunan yang dicapai sesuatu negeri. Tetapi demikian, selaku cerminan informasi pemasukan per kapita senantiasa digunakan buat menggambarkan:

1. Taraf pembangunan ekonomi yang dicapai bermacam negeri;
2. Tingkatan pertumbuhan pemasukan per kapita dari tahun ke tahun.

Pemasukan perkapita walaupun mempunyai banyak kekurangan senantiasa dipergunakan selaku perlengkapan buat mengukur tingkatan kemajuan pembangunan ekonomi serta taraf kemakmuran warga. Pemasukan per kapita mempunyai guna lain buat

menggambarkan jurang tingkatan kemakmuran di antara bermacam negeri.

2.3 Teori Pembangunan Model Rostow

Rostow(1960) dalam bukunya yang populer ialah:“ *The Stages of Economic Growth: A Non- Communist Manifesto*” berkata kalau negara-negeri tumbuh yang mau maju wajib lewat tahap- tahap pembangunan ialah:(1) *The traditional society* ataupun sesi warga tradisional merupakan sesuatu negeri yang struktur masyarakatnya dibentuk di dalam fungsi-fungsi penciptaan yang terbatas. Tingkatan pemasukan per kapitanya masih rendah sebab tidak terdapatnya pelaksanaan pengetahuan serta teknologi modern. Sebab terbatasnya produktivitas, hingga sebagian terbanyak sumber-sumbernya diperuntukkan buat menciptakan bahan mentah;(2) *The preconditions for take off* ataupun sesi prakondisi mengarah tinggal landas(*take off*) ialah meliputi warga yang lagi dalam proses peralihan ataupun ialah sesuatu periode yang menampilkan terdapatnya syarat- syarat mengarah *take off*. Nilai-nilai serta cara-cara tradisional telah mulai dialami jadi tantangan, sebaliknya nilai-nilai serta cara-cara baru yang lebih efektif mulai masuk. Perubahan-perubahan mulai terjalin ke arah warga yang lebih modern dengan sistem ekonomi yang lebih maju;(3) *Take off* ataupun sesi tinggal landas merupakan tahapan pertumbuhan ekonomi merambah masa antara, kala hambatan-hambatan serta rintangan-rintangan terhadap perkembangan telah mulai bisa diatasi. Nilai-nilai, cara-cara baru, serta kekuatan-kekuatan yang memunculkan

kemajuan ekonomi meluas serta mulai memahami warga.

Bagi Rostow (1960), disamping terdapatnya tahapan pergantian semacam itu, pembangunan ekonomi berarti pula selaku proses yang menimbulkan terdapatnya pergantian pada: (1) pergantian orientasi organisasi ekonomi, politik, serta sosial yang pada mulanya berorientasi kepada sesuatu wilayah jadi berorientasi ke luar; (2) pergantian pemikiran warga menimpa jumlah anak dalam keluarga, ialah dari menginginkan banyak anak jadi keluarga Rendah; (3) pergantian dalam aktivitas investasi warga, dari melaksanakan investasi yang tidak produktif(menumpuk emas, membeli rumah, serta sebagainya) jadi investasi yang produktif; serta (4) pergantian perilaku hidup serta adat istiadat yang terjalin kurang memicu pembangunan ekonomi, misalnya: penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap prestasi seorang.

Todaro serta Smith (2003) mendefinisikan pembangunan selaku proses membetulkan mutu kehidupan manusia. 3 aspek yang sama berartinya dalam pembangunan merupakan: (1) menaikkan tingkatan kehidupan warga, semacam pemasukan serta mengkonsumsi pangan, kesehatan, pembelajaran, serta sebagainya lewat perkembangan ekonomi yang cocok; (2) menghasilkan keadaan yang kondusif untuk perkembangan harga diri warga lewat pemantapan sistem serta institusi, sosial, politik serta ekonomi yang mengutamakan rasa hormat serta martabat manusia; serta (3) tingkatkan kebebasan warga dengan memperluas kisaran opsi benda serta jasa. Terminologi” Pembangunan” mempunyai arti lebih luas dari perkembangan

ekonomi, sebab mencakup aspek sosial, budaya, politik, serta aspek yang lain. Mirip dengan pemikiran tersebut Sumodiningrat (2001) berkata pembangunan ialah sesuatu rangkaian proses pergantian struktural yang dilaksanakan secara terus menerus serta berkesinambungan. Proses yang berlangsung bertabiat multidimensi, sehingga usaha yang dicoba buat menggapai sasaran pembangunan menemukan banyak tantangan. Kondisi ini ditemukan di negara- negara yang masih terkebelakang, negeri lagi tumbuh ataupun di negara-negara maju dengan derajat serta tipe perkara yang berbeda.

Susanto dkk. (2010) melaporkan kalau konsep pembangunan tetap hadapi pergantian bersamaan dengan pertumbuhan era. Konsep bawah pembangunan berawal dari pengembangan konsep pembangunan ekonomi yang sangat terpaut dengan pemasukan(*income*), perkembangan(*growth*), serta investasi(*investment*). Konsep pembangunan tersebut setelah itu ditinggikan jadi lebih luas cakupan serta dimensinya, meliputi: pengetahuan serta teknologi(*knowledge and tecnology*), pembangunan manusia(*human development*), pembangunan berkepanjangan(*sustainable development*) serta pembangunan institusional(*institutional development*). Motivasi yang mendasari perlunya ekspansi cakupan konsep pembangunan merupakan pemikiran hendak terbatasnya kedudukan serta guna perkembangan ekonomi yang semula dijadikan selaku tujuan pembangunan. Fokus atensi pembangunan setelah itu diperluas sehingga mencakup

distribusi pemasukan(*income distribution*), kemiskinan(poverty), serta pemenuhan kebutuhan universal.

Dalam perkembangannya atensi terhadap pemerataan pembangunan(*development equity*) setelah itu tumbuh sejalan dengan bermacam perdebatan terpaut ikatan antara ketimpangan pemasukan(*income inequality*) serta perkembangan ekonomi(*economic growth*). Ikatan antara perkembangan serta kemiskinan pula tidak luput dari perdebatan. Sedangkan itu teori perkembangan endogen yang tumbuh di masa tahun 1980-an memfokuskan atensi pada berartinya kemajuan teknologi selaku mesin perkembangan ekonomi. Problem pembangunan yang lingkungan dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber energi ataupun karakteristik daerah. Terus menjadi luas daerah sesuatu negeri, hingga terus menjadi tinggi pula tantangan yang wajib dialami. Tantangan hendak terus menjadi berat apabila perkembangan penduduk di negeri tersebut pula relatif tinggi. Keadaan ini dialami oleh Indonesia serta negara- negara lagi tumbuh yang lain ataupun negara- negara yang terkategori terkebelakang. Konsekwensi dari tidak meratanya pembangunan merupakan terbentuknya ketimpangan daerah (Susanto dkk. 2010).

2.4 Perencanaan Pembangunan

Conyers& Hills(1994) mendefinisikan“ perencanaan” selaku” sesuatu proses yang berkesinambungan”, yang mencakup“ keputusan-keputusan ataupun pilihan-pilihan bermacam alternatif pemakaian sumber energi buat menggapai

tujuan- tujuan tertentu pada masa yang hendak tiba.“ Definisi tersebut mengedepankan 4 faktor bawah perencanaan, yakni :

- 1) Pemilihan” Merancang berarti memilah,” kata Yulius Nyerere (mantan Presiden Tanzania) kala mengantarkan pidato Repelita II Tanzania pada tahun 1969. Maksudnya, perencanaan ialah proses memilah di antara bermacam aktivitas yang di idamkan, sebab tidak seluruh yang di idamkan itu bisa dicoba serta dicapai dalam waktu yang bertepatan. Perihal itu menyiratkan kalau ikatan antara perencanaan serta proses pengambilan keputusan sangat erat. Oleh sebab itu, banyak novel menimpa perencanaan mangulas pendekatan-pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, paling utama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang pengaruhi pengambilan keputusan serta urutan aksi di dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Sumber energi. Perencanaan ialah perlengkapan pengalokasian sumber energi. Pemakaian sebutan" sumber energi" di mari menampilkan seluruh suatu yang dikira bermanfaat dalam pencapaian sesuatu tujuan tertentu. Sumber energi di mari mencakup sumber energi manusia; sumber energi alam(tanah, air, hasil tambang, serta sebagainya); sumber energi modal serta keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang gimana sumber energi yang ada itu digunakan sebaik- baiknya. Oleh sebab itu, kuantitas serta mutu sumber energi tersebut sangat mempengaruhi dalam proses

memilah di antara bermacam opsi tindakan yang terdapat.

- 3) Tujuan. Perencanaan ialah perlengkapan buat menggapai tujuan. Konsep perencanaan selaku perlengkapan pencapaian tujuan timbul berkenaan dengan watak serta proses penetapan tujuan. Salah satu permasalahan yang kerap dialami oleh seseorang perencana merupakan kalau tujuan-tujuan mereka kurang bisa diformulasikan secara pas. Kerap kali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, sebab kadangkala tujuan-tujuan tersebut diresmikan oleh pihak lain.
- 4) Waktu. Perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu faktor berarti dalam perencanaan merupakan faktor waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang buat dicapai pada masa yang hendak tiba. Oleh sebab itu, perencanaan berkaitan dengan masa depan.

2.5 Pengembangan Wilayah

Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan wilayah di Indonesia sangat bermacam-macam karena dipengaruhi oleh perkembangan teori dan model pengembangan wilayah serta tatanan sosial-ekonomi, sistem pemerintahan dan administrasi pembangunan. Pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan tanpa memberikan atensi pada pemerataan memunculkan akibat negatif terhadap zona, terlebih menghalangi pertumbuhan itu sendiri(Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2003). Pengembangan wilayah dengan mendengarkan keahlian pertumbuhan hendak membantu tingkatan pertumbuhan

ekonomi berkelanjutan melalui penyebaran penduduk lebih rasional, tingkatkan kesempatan kerja dan produktivitas(Mercado, 2002).

Untuk Akil(2003), pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan tanpa memberikan atensi pada pemerataan memunculkan akibat negatif terhadap zona, terlebih menghalangi pembangunan itu sendiri. Dalam konteks ini mulai dirasakan perlunya pendekatan yang meninjau kota-desa kawasan penciptaan serta prasarana pendukungnya sebagai satu kesatuan wilayah. Dalam jalinan ini, kegiatan ekonomi kota dan desa(sub urban) ialah silih tergantung(interdependent) dalam konteks pergantian penduduk jangka panjang dan tenaga kerja(Voith, 1998). Kasikoen(2005) memberi tahu jika ada keterkaitan pembangunan perkotaan dan perdesaan dimana keterkaitan ini diekspresikan dalam bentuk raga, sosial, ekonomi, politik dan ideologi yang sekaligus buat mengatasi adanya ketidakseimbangan pembangunan di perkotaan dan perdesaan.

Kesenjangan pelaksanaan program pembangunan di dalam mencapai tujuannya, bukanlah hanya kegagalan dalam penyelenggaraannya namun lebih kepada kebijakan yang diterapkan. Pada sebagian dekade yang setelah itu, tata cara pandang pembangunan lebih berorientasi pada laju pertumbuhan ekonomi dengan basis peningkatan investasi dan teknologi yang menimbulkan krisis yang sampai di saat ini masih dirasakan. Penekanan pembangunan yang hanya pada pertumbuhan ekonomi yang menimbulkan kasus di

informasikan pula oleh Djajadiningrat(1997). Titik berat pembangunan hanya pada pertumbuhan ekonomi dapat memunculkan kehancuran zona alam yang tidak dapat diperbaiki. Zona alam pula yakni aspek berarti dari pertumbuhan ekonomi, dan apabila zona alam turun melebihi tenaga dukung nya, sampai ekonomi hendak kehilangan tenaga buat tumbuh. Untuk Shukla(2000), melalui perencanaan wilayah(regional planning) dapat mencapai kedua-duanya yakni pembangunan dan keberlanjutan, jawaban ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan wilayah hendak membantu pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada, sumber tenaga raga serta teknologi
- b. Perencanaan wilayah hendak membantu pembuatan perencanaan dimana hendak mengisi kebutuhan lokal
- c. Perencanaan wilayah membantu mengurangi pembangunan yang kurang berimbang antar dan dalam wilayah.

Dikala ini telah banyak disadari jika pengalaman membangun selama ini telah menimbulkan akibat/ kasus yang terus jadi tinggi dan kompleks sehingga cenderung menimbulkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Sejalan dengan pernyataan di atas, untuk Erwidodo(1999), kesenjangan pertumbuhan antara wilayah perkotaan dan perdesaan telah memunculkan permasalahan wilayah antara lain meningkatnya arus migrasi penduduk desa ke kota, meningkatnya kemiskinan masyarakat dan“ pengurasan” sumber tenaga alam.

Ada sebagian Mengenai yang jadi faktor terjadinya“ pengurasan” tersebut. Dini, terbukanya akses ke daerah perdesaan kerap kali menekan golongan elit kota, pejabat pemerintah pusat, dan perusahaan- industri tinggi buat mengeksploitasi sumberdaya yang terdapat di desa. Masyarakat desa sendiri tidak berdaya karena secara politik dan ekonomi para pelakon eksploitasi sumberdaya tersebut memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat. Kedua, kawasan perdesaan sendiri umumnya dihuni oleh masyarakat yang kualitas SDM- nya kurang berkembang. Kondisi ini menimbulkan ide- ilham dan pemikiran modern dari golongan elit kota sulit buat didesiminasikan. Oleh karena itu sebagian tinggi aktivitas pada akhirnya lebih bersifat enclave dengan mendatangkan banyak SDM dari luar yang dikira lebih mempunyai kemampuan dan kemampuan.

Untuk Basri(1999), jika rendahnya tingkatan sosial ekonomi masyarakat perdesaan dipengaruhi oleh:

- 1) Kondisi sosial ekonomi rumah tangga masyarakat yang mempengaruhi kapasitas orang, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam melakukan interaksi sosial dan proses penciptaan;
- 2) Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang jadi dasar Dataran usaha dan pendapatan rumah tangga maupun masyarakat;
- 3) Keahlian tenaga dukung regional(geographical setting) semacam kondisi geografis, sumberdaya alam serta infrastruktur yang mempengaruhi pola kegiatan penciptaan dan distribusi;

- 4) Kelembagaan sosial ekonomi masyarakat yang mendukung interaksi sosial dan jaringan kerja penciptaan dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

Selanjutnya Chen dan Salih(1978), mengemukakan jika mengadopsi pendekatan kutub- kutub pertumbuhan(*growth pole approach*) oleh negara- negeri ketiga merefleksikan 2 bentuk pemikiran yang bijaksana yakni: dini, industrialisasi dengan teknologi modern dapat di desentralisasikan manfaatkannya pada daerah perdesaan, kedua, keterpaduan pada tingkatan nasional melalui strategi kutub-kutub pertumbuhan dapat memecahkan kasus pembangunan regional. Pendekatan pembangunan agropolitan yakni bagian dari pada pengembangan wilayah skala kawasan yakni senergitas pembangunan antara kota-desa(*urban rural development*).

Buat mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan yang didasarkan pada keahlian wilayah desa itu sendiri, di mana keterkaitan dengan perekonomian kota harus bisa diminimalkan, sampai pendekatan agropolitan dapat jadi salah satu pendekatan pembangunan perdesaan. Sebagai aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan dengan jumlah penduduk antara 50. 000 sampai 150. 000 orang, agropolitan jadi relevan dengan wilayah perdesaan karena pada umumnya zona pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam memanglah yakni mata pencaharian utama dari sebagian tinggi masyarakat perdesaan, Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat (1996).

2.5.1 Teori Ekonomi Pembangunan

Pembangunan ekonomi ialah kemajuan ekonomi yang dapat memunculkan perubahan- pergantian, sangat penting terangkai pergantian menurunnya kadar kemajuan warga dan pergantian dari wujud ekonomi, baik peranannya pada pembuatan pendapatan nasional, atau peranannya dalam penyediaan alun-alun aktivitas.(Akhmad Mahyudi, Ekonomi Pembangunan dan Analisi Data Empiris.

Untuk Subandi(2012) Pembangunan ekonomi ialah suatu lapisan metode kegiatan yang dicoba oleh suatu Negara untuk tingkatkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk tingkatkan bagian hidup ataupun kelimpahan(Income per-jiwa) dalam durasi jauh. Pada dasarnya dalam pembangunan ekonomi memiliki 2 karakter yakni yang dini beradat deskriptif analitis dan kedua beradat alternatif kebijaksanaan.

Adam Smith dalam filosofi pembangunan ekonomi memilah masa atau tahapan dalam 5 tahap, terdiri dari; a. Tahap Mencari, b. Tahap menjaga, c. Tahap bercocok hambur, d. Tahap berbisnis, e. Tahap Industrilisasi.

Tahap pembangunan Adam Smith lebih menekankan pandangan invensi modal dan pemilih modal(kapitalis), karena pemilik modal mampu mengakumulasi modal yang diterima dari profit atau keuntungan usaha untuk sehabis itu ditanamkan kembali berlaku seperti perluasan atau tambahan invensi dan kapasitas invensi pabrik.

2.5.2 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu Dataran kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan Ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan- kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kehasan daerah yang bersangkutan (endogenous) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, beralih pengetahuan dan teologi, serta pengembangan usaha-usaha baru.

Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut,

pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembanguna daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat, dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya.

2.5.3 Teori Sektoral

Sesungguhnya filosofi sektoral ialah salah satu filosofi yang berkaitan dengan aturan kota ataupun aturan wilayah. Filosofi sektoral ini dikemukakan oleh Homer Hoyt. Bagi filosofi sektoral ini merupakan unit- bagian aktivitas di perkotaan tidak menjajaki zona- alam tertib dengan cara konsentris, tetapi membentuk sektor- zona yang mempunyai watak lebih leluasa. Bagi filosofi ini, bentuk ruang kota mengarah berkembang bersumber pada sektor- zona dari bersumber pada lingkaran- bundaran konsentrik. Dalam filosofi ini, PDK ataupun Pusat Wilayah Aktivitas ataupun yang lazim diucap dengan CBD(Central Bussiness District) terletak di wilayah pusat kota, sedangkan di sekelilingnya bertumbuh sektor- zona yang lain, tercantum pula wilayah pabrik serta pemukiman masyarakat, Pemukiman masyarakat juga pula dipecah jadi 3 kalangan, ialah kalangan pegawai, kalangan menengah serta pula kalangan elit. Pada biasanya, filosofi ini mempunyai sebagian opini. Pendapat-opini dari filosofi sektoral antara lain:

- Daerah-wilayah yang mempunyai harga tanah ataupun

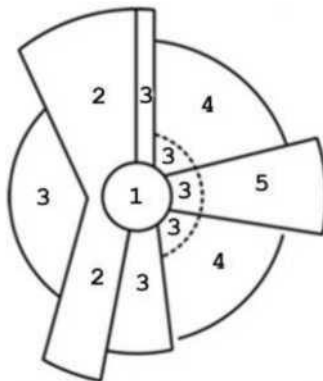
carter yang tinggi, umumnya terdapat di wilayah luar kota.

- Daerah-wilayah yang mempunyai carter tanah serta harga yang Rendah merupakan berbentuk jalur-rute yang terjadinya memanjang dari pusat kota ke wilayah pinggiran.

Nah seperti itu sebagian opini ataupun asumsi yang tercantum dalam filosofi sektoral. Berikutnya, rancangan hal filosofi sektoral ini bisa kita lewat suatu lukisan. Uraian lebih lanjut semacam di dasar ini.

2.5.3.1 Konsep Teori Sektoral

Teori Sektoral merupakan salah satu teori geografi mengenai tata letak sebuah daerah atau kawasan. Adapun konsep mengenai teori sektoral adalah seperti yang tercantum dalam gambar di bawah ini. Keterangan berdasarkan nomor pada gambar:



Gambar 1 Teori Sektoral

1. Sektor pusat kegiatan bisnis. Kawasan ini terdiri atas bangunan- bangunan kantor, hotel, pasar, bank, bioskop,

pusat perbelanjaan serta sektor-sektor publik dan perputaran ekonomi lainnya.

2. Sektor kawasan industri ringan dan perdagangan. Kawasan ini terdapat pabrik-pabrik Rendah atau ringan dan juga toko- toko.
3. Sektor kaum buruh atau kaum murba. Kawasan ini merupakan tempat tinggal bagi kaum buruh maupun kaum murba. Pemukiman ini mendekati pusat perdagangan karena kaum buruh harus bekerja di tempat-tempat yang menjadi pusat bisnis.
4. Sektor madya wisma, yaitu tempat tinggal bagi para kaum menengah.
5. Sektor adi wisma, yaitu tempat tinggal bagi golongan atas atau kaum elit, biasanya terdiri atas kaum pejabat dan para eksekutif.

Teori sektoral merupakan teori yang mengemukakan bahwa kegiatan manusia (khususnya perekonomian) yang menjadi kegiatan utama, berada di pusat kota, sementara di sekelilingnya terdiri atas kegiatan produksi industri dan juga pemukiman penduduk yang dibagi atas tiga tingkatan, yaitu kaum elit, kaum menengah dan juga kaum buruh.

2.5.4 Teori Basis Sumberdaya

Filosofi Dasar Pangkal Energi Alam (*Alami Resources Endowment Theory*) yang dipelopori oleh Harvey S. Perloff serta Lowdon Wingo, Jr. Filosofi ini beranggapan kalau perkembangan sesuatu wilayah amat dipengaruhi oleh

ketersediaan pangkal Energi alam serta permohonan hendak barang yang diperoleh dari pangkal energi alam itu.(sukirno, 1976) Pada dasarnya Filosofi Dasar Pangkal Energi ialah ekspansi dari filosofi dasar ekonomi serta ataupun filosofi dasar ekspor, dalam analisisnya filosofi ini disamping merangkum andil yang amat tinggi serta kemajuan zona ekspor sesuatu wilayah dalam pembangunan wilayah bagus dalam menghasilkan pemasukan di zona itu ataupun dalam menghasilkan dampak pengganda pada perekonomian wilayah. dengan cara global Filosofi ini pula menekankan analisisnya dalam 2 pandangan ialah: 1 berartinya andil kekayaan alam sesuatu wilayah dalam pembangunan wilayah itu dalam bermacam tingkatan pembangunan ekonominya. 2 hal faktor-faktor yang pengaruhi tingginya dampak menggoda dari zona ekspor dengan cara global pada perekonomian wilayah. Filosofi dasar pangkal energi pula memiliki Alisis metode dari perkembangan sesuatu wilayah. Filosofi Pembangunan Wilayah pada mulanya mencuat sebab dampak terdapatnya kemampuan sesuatu wilayah buat menciptakan beberapa barang yang dibutuhkan oleh perekonomian nasional serta mengekspornya dengan harga serta mutu yang bersaing dengan beberapa barang yang serupa serta semacam yang diperoleh oleh wilayah lain. Bila ekspor itu berikutnya hendak menghasilkan pemasukan buat wilayah itu sendiri bersumber pada karakter yang menempel pada perekonomian wilayah dan bentuk sosial wilayah itu.

Dalam kemajuan berikutnya bersamaan dengan kemajuan pasar wilayah serta aktivitas ekonomi sanggup sediakan kebutuhan wilayah hendak terwujud kondisi yang mendesak perkembangan wilayah kuat dengan cara otomatis serta bertumbuh dengan cara otomatis akhirnya faktor-faktor dari dalam wilayah itu jadi meningkat berarti peranannya dalam pembangunan ekonomi wilayah titik berikutnya dengan terdapatnya perkembangan yang bertumbuh dengan cara otomatis hingga terjadilah perpindahan dalam aspek yang pengaruhi perkembangan wilayah serta didominasi didominasi zona ekspor jadi lebih dipengaruhi oleh kemampuan badan penciptaan di wilayah itu (Sukirno, 1976).

2.5.5 Teori Lokasi Alfred Weber (1909)

Alfred Weber pada tahun 1909 melaksanakan analisa mengenai posisi aktivitas pabrik. Bagi filosofi Weber penentuan posisi pabrik didasarkan atas prinsip minimalisasi bayaran. Weber melaporkan kalau posisi tiap pabrik terkait pada keseluruhan bayaran pemindahan serta daya kegiatan di mana enumerasi keduanya wajib minimal. Tempat di mana keseluruhan bayaran pemindahan serta daya kegiatan yang minimal merupakan sama dengan tingkatan profit yang maksimal. Bagi Weber terdapat 3 aspek yang pengaruhi posisi pabrik, ialah bayaran pemindahan, imbalan daya kegiatan, serta daya aglomerasi ataupun deaglomerasi. Dalam menerangkan ketergantungan bayaran pemindahan serta materi dasar, Weber memakai rancangan segitiga posisi ataupun locational triangle buat mendapatkan posisi puncak. Buat membuktikan apakah

posisi puncak itu lebih dekat ke posisi materi dasar ataupun pasar, Weber merumuskan indikator material (IM), sebaliknya bayaran daya kegiatan selaku salah satu aspek yang bisa pengaruhi posisi pabrik dipaparkan Weber dengan memakai suatu kurva tertutup (closed curve) berbentuk bundaran yang dikenal isodapan (isodapane).

Filosofi Posisi Pabrik yang dikemukakan oleh Alfred Weber merupakan memperkirakan sebagian aspek spasial (hal ruang atau tempat) buat menciptakan posisi yang maksimal serta bayaran yang minimum buat pembangunan pabrik. Bagi Alfred Weber, aspek determinan posisi Pabrik bisa digolongkan jadi 2 aspek penting ialah Aspek Regional serta Aspek Aglomerasi atau Deglomerasi.

1. Aspek Regional

Sehabis melaksanakan riset mengenai bentuk bayaran di bermacam pabrik, Weber mengutip kesimpulan kalau bayaran penciptaan bermacam-macam pada satu tempat dengan tempat yang lain. Oleh sebab itu, Pabrik pada biasanya terlokalisir di tempat atau wilayah yang bayaran produksinya sangat Rendah (minimal). Bagi Weber, ada 2 aspek biasa regional yang pengaruhi bayaran penciptaan. Kedua aspek biasa regional itu antara lain merupakan:

1. 1. Bayaran Transportasi

Bayaran Pemindahan menggenggam andil yang amat berarti dalam memastikan posisi pabrik. Berat benda yang dibawa serta jarak dari pabrik ke dermaga ataupun jarak antara pabrik serta pusat penyaluran pengaruhi bayaran

pemindahan yang wajib dikeluarkan. Biasanya, posisi yang diseleksi merupakan posisi dimana materi dasar serta materi bakar gampang didapat.

Weber memilah materi dasar jadi 2 jenis ialah yang awal merupakan material yang gampang di bisa dimanapun posisi pabrik itu terletak sebaliknya yang kedua merupakan material yang cuma ada pada posisi khusus saja.

Bagi Weber, Industrinya pula dikelompokkan jadi 2 tipe kecondongan posisi pabrik atau pabrik bersumber pada dimana materi bakunya gampang ada ataupun posisi yang lebih dekat dengan pasar. Pabrik yang hasil produksinya(produk jadi) lebih enteng dari materi bakunya sehabis melampaui bermacam cara penciptaan dikenal dengan Pabrik yang Weight Losing. Pada Pabrik Weight Losing, posisi pabrik wajib lebih dekat dengan pangkal materi dasar sebab bayaran pemindahan materi dasar hendak lebih mahal bila dibanding dengan bayaran pemindahan produk jadi mengarah ke Market(pasar). Ilustrasi Industri Weight Losing merupakan semacam penciptaan gula(produk jadi) yang lebih enteng dari materi bakunya ialah Tebu.

Sebaliknya Pabrik yang hasil produksinya(produk Jadi) lebih berat dari materi bakunya sehabis melampaui proses- proses penciptaan diucap dengan Weigth Gaining. Posisi pabrik pada pabrik Weight Gaining hendaknya diletakan lebih dekat dengan market(pasar) sebab bayaran pemindahan produk jadi lebih mahal bila dibanding dengan bayaran pemindahan materi bakunya.

1. 2. Bayaran Daya Kerja

Bayaran Daya Kegiatan ataupun labour cost pula ialah aspek terutama dalam determinasi posisi pabrik. Bila posisi pabrik profitabel, tetapi bayaran daya kegiatan kurang bagus(mahal), posisi itu pula kurang sesuai buat sesuatu posisi pabrik. Bisa jadi pada pabrik khusus hendak lebih mengarah ke posisi dimana bayaran daya kegiatan lebih Rendah. Tetapi pada dasarnya, situasi sempurna buat sesuatu posisi pabrik merupakan posisi yang mempunyai bayaran daya kegiatan yang Rendah serta bayaran pemindahan yang Rendah pula.

2. Aspek Agglomerasi serta Degglomerasi

Agglomerasi merupakan adanya faktor- faktor yang membuat terbentuknya konsentrasi pabrik pada posisi khusus. Faktor- faktor itu antara lain semacam terdapatnya sekolah- sekolah yang bisa bisa melatih daya kerjanya, terdapatnya industri perbankan, industri asuransi, rumah sakit serta sarana pendukung yang lain.

Degglomerasi merupakan faktor- faktor yang menimbulkan pabrik atau pabrik meninggalkan posisi khusus. Faktor- faktor itu antara lain semacam menaiknya pajak wilayah, berkurangnya daya kegiatan yang ahli, minimnya tanah buat pabrik dan faktor- faktor yang menimbulkan tingginya bayaran operasional yang lain.

Weber memakai sebutan Triangle Location(Segita Posisi) buat memastikan posisi terbaik buat pabrik ataupun pabrik yang dianalisis.

2.5.6 Teori Lokasi August Losch

August Losch(1954) ialah orang awal yang meningkatkan filosofi posisi dengan bidang permohonan selaku elastis penting dengan memperkirakan bagus harga produk serta berapa bayaran buat memproduksinya. Losch mengatakan kalau posisi pedagang amat mempengaruhi kepada jumlah pelanggan yang bisa digarapnya. Kian jauh dari tempat pedagang, pelanggan kian sungkan membeli sebab bayaran pemindahan buat menghadiri tempat pedagang terus menjadi mahal. Losch mengarah menganjurkan supaya posisi penciptaan terletak di pasar ataupun di dekat pasar. Filosofi posisi dari Losch ini berlainan dengan teori.

Weber dimana Losch lebih memandang perkara dari bagian permohonan (pasar) sebaliknya Weber lebih membidik kearah bagian ijab (penciptaan). Filosofi ini bermaksud buat menciptakan pola posisi pabrik alhasil diketemukan penyeimbang spasial dampingi posisi. Losch beranggapan kalau dalam posisi pabrik yang nampak tidak tertib bisa diketemukan pola keberaturan.

Pada filosofi Losch, wilayah pasar bisa berganti kala terjalin pergantian harga serta inflasi. Perihal ini sebab produsen tidak senantiasa sanggup penuhi permohonan kala terjalin inflasi yang hendak menyebabkan bayaran pemindahan naik alhasil harga jual produk pula naik. Konsekuensinya merupakan pembelian oleh pelanggan terus menjadi menurun serta pelanggan menoleh ke pedagang lain yang menawarkan harga lebih ekonomis. Perihal ini lebih lanjut hendak mendesak

orang tani lain di wilayah melaksanakan cara penciptaan yang serupa buat melayani permohonan yang belum terkabul. Cara itu pada kesimpulannya menimbulkan batasan wilayah pasar satu dengan pasar yang lain lebih berkelanjutan serta silih terpaut.

Partisipasi penting Losch merupakan memberitahukan kemampuan permohonan(demand) selaku aspek berarti dalam posisi pabrik, kemudian yang kedua merupakan kritik kepada pendahulunya yang senantiasa mengarah pada bayaran terendah yang mana umumnya yang dicoba oleh pabrik merupakan mengoptimalkan profit(keuntungan-revenue maximation) dengan bermacam anggapan dan pemikirannya, Losch mengemukakan kalau gimana cara economic landscape terjalin, yang ialah penyeimbang (equilibrium) antara demand (permohonan) serta supply (ijab). Perdagangan terkini terjalin apabila ada keunggulan penciptaan. Serta pada kesimpulannya, filosofi ini hendak mendesak pabrik tiap tahunnya hendak mencari posisi yang bisa memahami wilayah pasar seluas-luasnya. Dalam perihal ini, di harapkan pula tidak terdapatnya pabrik lain di wilyah yang serupa menciptakan benda yang serupa pula, sebab hendak kurangi pemasukan. Oleh sebab itu, dalam filosofi ini ada kecondongan kalau pabrik di bangun dengan cara menyeluruh serta silih bersambungan alhasil membuat heksagonal.

2.5.7 Teori Lokasi Von Thunnen

Filosofi von Thunen menerangkan bermacam tipe aktivitas

pertanian dalam maksud tinggi yang bertumbuh disekeliling wilayah perkotaan yang ialah pasar komoditi pertanian itu. Ilham utama dari filosofi Von Thunen merupakan:(1) Orang tani yang terletak di posisi jauh dari pusat pasar ataupun kota, wajib menempuh jarak yang lumayan jauh buat menjual hasil panennya. Perihal ini membuktikan alangkah mahalnnya kota selaku pusat pasar.(2) Harga carter tanah pertanian hendak berbeda- beda nilainya terkait pada aturan untuk lahannya. Tanah yang terletak di dekat pusat pasar ataupun kota hendak lebih mahal dibandingkan tanah yang jauh dari pusat pasar sebab jarak yang kian jauh dari pusat pasar hendak tingkatan bayaran pemindahan. Filosofi von Thunen jadi referensi berarti dalam pengembangan wilayah paling utama dalam memastikan bermacam aktivitas perekonomian. Bersumber pada filosofi ini bisa didetetapkan bermacam alam wilayah tercantum wilayah pertanian.

2.6 Teori Prasarana Transportasi

Pemindahan ialah bagian penting dalam sistem hidup serta kehidupan, sistem rezim, serta sistem kemasyarakatan. Situasi sosial demografi wilayah mempunyai akibat kepada kemampuan pemindahan di wilayah itu. Tingkatan kepadatan masyarakat hendak mempunyai akibat penting kepada keahlian pemindahan melayani keinginan warga. Farahani, et angkatan sungai(AL), (2013) pemindahan amat berarti dalam kegiatan warga. Jumlah masyarakat bertambah hingga permohonan

pemindahan pula bertambah.

Nasution(1996) mendeskripsikan filosofi pemindahan selaku pemindahan benda serta orang dari tempat asal ke tempat tujuan. Alhasil dengan aktivitas itu hingga ada 3 perihal ialah terdapatnya bagasi yang dibawa, tersedianya alat transportasi selaku perlengkapan bawa, serta adanya jalur yang bisa dilewati. Cara pemindahan dari aksi tempat asal, dimana aktivitas pengangkutan diawali serta ke tempat tujuan dimana aktivitas diakhiri. Buat itu dengan terdapatnya pemindahan benda serta orang itu, hingga pemindahan ialah salah satu zona yang bisa mendukung aktivitas ekonomi(*the promoting sector*) serta donatur *pelayanan(the servicing sector)* untuk kemajuan ekonomi.

Dampak dari terdapatnya keinginan perpindahan atau pergerakan orang serta benda, hendak memunculkan sesuatu desakan buat penyediaan infrastruktur serta alat pergerakan biar terwujud sesuatu pergerakan yang berjalan dengan situasi nyaman, aman serta mudah, dan murah dari bidang durasi serta bayaran. Pada kesimpulannya, keinginan hendak pemindahan bukan cuma sesuatu keinginan yang bertabiat alami saja, melainkan dibutuhkan terdapatnya sesuatu sistem yang bagus biar tujuan pergerakan di atas bisa dicapai. Sistem pemindahan yang bertumbuh dikala ini sudah menciptakan sesuatu wujud jasa lewat bermacam alat pergerakan mekanistik yang nyaris menjangkau ke seluruh jaringan wilayah di wajah alam ini. Sistem pemindahan modern bukan perihal yang berat buat menjangkau pusat kegiatan orang dari bermacam ujung

pergerakan. Olvera, et angkatan sungai(AL)(2003) mengemukakan ada kesenjangan antara keinginan pemindahan serta alat buat bertambah kebahagiaan warga.

Infrastruktur pemindahan perdesaan serta aksesibilitas perdesaan memiliki maksud abstrak yang simpel tetapi ada rumor lingkungan di sekelilingnya. Dengan cara arti“ akses” merupakan: a) *means of approaching something or somebody or entering a place*, serta b) *opportunity or right to use something or approach somebody*. Arti lain dari akses *tercantum*“ *means or right of using, reaching or obtaining* ”. *International Labour Organization*(ILO) mendeskripsikan transport selaku“ pergerakan orang serta benda dengan alat apapun yang bisa jadi, buat tujuan apapun yang bisa jadi”. *World Bank*(1995) mendeskripsikan alat pemindahan selaku“ aktivitas mengaitkan orang, tempat-tempat serta pangkal energi”. Dengan arti begitu nyata kalau transport serta akses merupakan aktivitas antara. Transport merupakan alat buat tingkatan keahlian(ataupun pergerakan) untuk orang buat menggapai akses jasa serta sarana yang diperlukan. Kenaikan akses jaringan pemindahan perdesaan dalam Negeri bertumbuh jadi fokus atensi, dimana akses perdesaan yang sedang tunagrahita kepada pasar serta sarana lain yang butuh kenaikan alhasil bayaran pemindahan dapat ditekan.

Infrastruktur pemindahan amat profitabel untuk kehidupan orang, bagus profit dengan cara langsung ataupun profit dengan cara tidak langsung. Profit dengan cara langsung ialah masyarakat dengan gampang menemukan jasa dari fasilitas-

fasilitas yang diadakan di tempat lain alhasil kebutuhannya terakumulasi. Profit dengan cara tidak langsung ialah masyarakat bisa mengirit bayaran serta durasi sebab dengan memakai moda alat pemindahan hingga profesi hendak lebih kilat teratasi. Dari bagian ekonomi, alat serta infrastruktur pemindahan bisa meningkatkan kemampuan serta mengirit durasi dan bayaran. Dari bagian sosial serta adat pula dipengaruhi oleh kehadiran alat serta infrastruktur pemindahan, misalnya di wilayah terasing yang susah dijangkau, biasanya ada warga yang tingkatan intelektualnya Rendah sebab data serta teknologi susah masuk ke wilayah itu. Akhirnya pola kehidupan masyarakat pun mengarah konvensional serta terabaikan dari daerah- daerah lain yang karakternya lebih terbuka sebab terdapatnya pemindahan. Dengan terdapatnya alat serta infrastruktur pemindahan bisa membuka jalur komunikasi dampingi wilayah alhasil terjalin gerakan benda, pelayanan, orang, serta gagasan selaku modal untuk sesuatu wilayah buat maju serta bertumbuh.

2.6.1 Prasarana Jalan

Jalur raya ialah benda khalayak yang bertabiat beramai-ramai(bisa disantap seluruh orang)(Dunn, 2000). Perihal ini membagikan akibat kalau kemampuan pembangunan ini bisa ditaksir dari perspektif yang berlainan. Buat itu amatlah berarti saat sebelum kebijaksanaan ini diputuskan, dibutuhkan estimasi atau amatan dengan cara multi format dengan mengaitkan bermacam stakeholder terpaut. Terdapatnya bermacam keterbatasan, khususnya dalam perhitungan serta durasi

membagikan keterkaitan tidak seluruh usulan pengembangan hendak diperoleh. Dibutuhkan rasio prioritas buat memastikan usulan mana yang sangat membolehkan serta pastinya membagikan kemanfaatan maksimal.

Perkara jadi terus menjadi lingkungan apabila pembangunan infrastruktur ini dicoba di wilayah perkotaan. Kota dikira selaku pusat penting buat melaksanakan bermacam berbagai kegiatan, bagus kegiatan ekonomi, pembelajaran, politik, ataupun bermacam kegiatan sosial lain. Pembangunan infrastruktur ini ialah konsep penting mengenang terdapatnya bermacam khasiat yang bisa dinikmati.

Tetapi begitu, pembangunan infrastruktur jalur di wilayah kota jauh lebih lingkungan dibandingkan di wilayah pedesaan, terlebih apabila berhubungan dengan keterbatasan tanah.

Pindur serta Yacus(2000) melaporkan kalau membuat jalur sama dengan membuat suatu sistem(pemindahan) yang lingkungan. Dalam wilayah kota yang terus menjadi lingkungan dengan keterbatasan tanah yang terdapat, pembangunan jalur ini tidak cuma orientasikan pada pembangunan jalur terkini serta pelebaran, tetapi pula wajib diupayakan pembangunan jalur ini sanggup menanggapi persoalan- persoalan lain, semacam turunnya produktifitas, tingginya nilai musibah, rendahnya mutu hawa serta serupanya.

Mengenang beragamnya kebutuhan, mutu dapat jadi didefinisikan berlainan dampingi satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain. Labih jauh Pindur serta Yacus(2000) menerangkan kalau fokus pada klien(customer) wajib ialah

atensi berarti dalam pengumpulan kebijaksanaan pembangunan alat ini di wilayah perkotaan.

Pembangunan prasarana wajib dicoba dengan memikirkan bermacam kebutuhan. Pembangunan alat jalur ialah bagian integral dari pemograman kota dengan cara global.

Pendekatan yang dipakai dalam pemograman kota ini hendak memastikan pola pergerakan bermacam sub sistem yang terdapat di wilayah ini. Foly dalam Jayadinata(1992) melaporkan kalau pemograman kota bisa dicoba dengan 2 pendekatan, ialah:

1. Pendekatan bagi bagian(unitary approach), ialah membuat sesuatu cerminan dari pola wilayah raga yang tertuju untuk sesuatu warga serta untuk memajukan pembangunan serta buat membenarkan kalau warga hendak bisa bertumbuh pada era kelak.
2. Pendekatan melaras(adaptive approach), ialah sesuatu hubungan yang lingkungan dari beragam bagian yang silih bergantung dengan cara fungsional.

Pendekatan terakhir ini yang dikala ini relatif pas buat diadopsi. Pendekatan ini membolehkan terdapatnya koordinasi dampingi bermacam pihak untuk optimalisasi gunanya tiap- tiap. Begitu juga dikatakan oleh Pindur serta Yacus(2000) kalau membuat jalur berarti membuat sistem. Lebih dari itu gedung sistem yang disusun ialah gedung sistem yang pula terstruktur, yang terdiri dari: sistem manajemen kemudian rute terstruktur, sistem data pemindahan khalayak terstruktur, koperasi angkutan khalayak

terstruktur serta pula sistem pengawasan alat transportasi terstruktur.

Dorong ukur kesuksesan kemampuan zona ini bertabiat multidimensi, disebabkan wajib diamati dari bermacam perspektif. Tetapi begitu bagus kedua pandangan ini(financial serta non financial) memiliki akibat satu dengan yang lain(Crindell serta Roy, 1998). Pengukuran kemampuan ialah usaha yang bertabiat sistemik, sebab tidak cuma menyangkut input serta ouput, tetapi lebih dari itu butuh diukur, bagus dari bidang cara ataupun akibatnya (*outcome*).

BAB III

ISU PERENCANAAN EKONOMI

3.1 Latar Belakang

Setiap negara di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia, berupaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya dengan cara melakukan pembangunan ekonomi. Hal tersebut dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan teknologi pada bidang pertanian, pemanfaatan kekayaan laut yang tersedia, dan masih banyak lagi. Mengutip pernyataan (Todaro, 2011) pembangunan ekonomi memiliki arti bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang berkaitan dalam reorganisasi maupun reorientasi pada seluruh sistem ekonomi serta sosial. Proses multidimensi ini melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya, konsep pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari konsep pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Pembangunan ekonomi dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud di sini adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto (PNB, GNP) riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi

keberhasilan pembangunan ekonomi (Parera, 2021). Pembangunan merupakan hal yang terpenting dalam pertimbangan sosial ekonomi, sehingga perencanaan pembangunan menjadi salah satu prioritas. Namun jika pembangunan dirasa masih belum maksimal, maka pemerintah dapat kembali memaksimalkan perencanaan pembangunan yang sebelumnya sudah disiapkan. Pembangunan di Indonesia pada umumnya tidak akan terlepas dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004), yang mana dengan adanya UU tersebut kedudukan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menjadi semakin kuat. Argumentasi yang semula berkembang mengenai perlu tidaknya pembangunan diatur melalui sistem perencanaan dalam era otonomi daerah, otomatis sudah tidak perlu diperdebatkan lagi (Sjafrizal, 2015).

Perencanaan pembangunan (*development planning*) adalah suatu bentuk perencanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Hariyono, 2010). Dari masa ke masa, Indonesia tidak dapat terlepas dari kegiatan perencanaan pembangunan. Sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998, paradigma perencanaan pembangunan berganti dari perencanaan komprehensif menjadi perencanaan strategis. Paradigma perencanaan strategis dipilih oleh pemerintah karena dirasa memiliki manfaat yang jelas dalam waktu yang singkat (Hariyono, 2010). Paradigma perencanaan strategis yang dianut oleh pemerintah dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah memiliki nilai lebih dengan adanya pelibatan *stakeholders* (para pemangku kepentingan) yang menjadikan perencanaan pembangunan daerah menjadi tepat sasaran. Dengan kelebihan tersebut, maka *stakeholders* dapat berperan

aktif dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah di wilayahnya masing-masing, sehingga perencanaan pembangunan daerah berlangsung secara partisipatif.

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal teknologi dan lainnya (Halim, 2020). Adanya pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dimana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi. Penduduk di satu sisi dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain dapat menjadi sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan. Kondisi-kondisi kependudukan, data dan informasi kependudukan akan sangat berguna dalam memperhitungkan berapa banyak tenaga kerja akan terserap serta kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dan jenis-jenis teknologi yang akan digunakan dalam memproduksi barang atau jasa. Pada sisi lain, pengetahuan tentang struktur penduduk dan kondisi sosial ekonomi pada wilayah tertentu, akan sangat bermanfaat dalam memperhitungkan berapa banyak penduduk yang dapat memanfaatkan peluang dan hasil pembangunan atau seberapa luas pangsa pasar bagi produk suatu usaha tertentu.

Berdasarkan perkembangan zaman, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah termasuk dalam menyejahterakan rakyat. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki arti yang begitu penting bagi suatu daerah terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, sejak Pandemi *corona virus*

disease 2019 (Covid-19) telah melanda dunia termasuk Indonesia lebih dari 2 tahun, telah memberikan dampak pada ketidakstabilan ekonomi. Dampak perekonomian tidak hanya dirasakan pada tingkat domestik, namun juga secara global.

International Monetary Fund (IMF) yang memproyeksikan ekonomi, menyatakan bahwa ekonomi global akan tumbuh mencapai 6,0% pada tahun 2021 dan 4,9% pada tahun 2022. Namun, untuk Indonesia IMF melakukan koreksi ke bawah perihal pertumbuhan ekonomi menjadi 3,9% pada tahun 2021. Hal tersebut berdasarkan laporan *World Economic Outlook* (WEO) edisi Juni 2021. Proyeksi tersebut lebih rendah 40 basis poin (bps) jika dibandingkan dengan perkiraan pada edisi April 2021. Hal ini tentunya akan memiliki dampak terhadap industri, sektor perdagangan, sektor pariwisata termasuk juga para pelaku UMKM. Dampak Covid-19 secara langsung sudah terlihat pada hampir 29,4 juta pekerja menurut Kementerian Tenaga Kerja. Bahkan, survei dari *Jobstreet Indonesia* mengklaim 35% tenaga kerja telah di PHK akibat adanya pengurangan kegiatan usaha ataupun penutupan tempat usaha.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) melaporkan bahwa pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian dari sisi penawaran dan permintaan. Pada sisi penawaran, perusahaan mengurangi pasokan bahan baku dan tenaga kerja yang tidak produktif serta rantai pasokan yang mengalami kendala. Kemudian, pada sisi permintaan terjadi kurangnya jumlah permintaan dan menurunnya kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. OECD juga menyatakan bahwa UMKM menerima dampak

yang cukup signifikan akibat adanya pandemi Covid-19 ini. (OECD, 2020)

Di Indonesia, UMKM memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terlihat pada kontribusi UMK terhadap PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60% pada masa pra-pandemi. Pada saat itu penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga tinggi dan terus tumbuh mencapai di atas 96%, dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku usaha. Namun, saat pandemi Covid-19 terjadi UMKM juga menjadi sektor yang paling terpukul, yaitu di atas 90%. (<https://nasional.kontan.co.id/news/>). Hal ini juga terjadi pada UMKM yang ada di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin, dapat dikatakan sebagai barometer kondisi perekonomian bagi Kota/Kabupaten lainnya. Kinerja UMKM pada kota yang memiliki julukan *Kota Seribu Sungai* ini mendapatkan dampak negatif akibat Pandemi Covid-19. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalsel, bahwa dari survei UMKM yang telah dilakukan BI pada akhir tahun 2020 menunjukkan sebanyak 82,68% UMKM di Kalimantan terdampak negatif pandemi Covid-19. Dampak negatif pandemi terhadap UMKM diantaranya penurunan penjualan, kesulitan permodalan dan terhambatnya distribusi barang. (<https://rri.co.id/banjarmasin/ekonomi/>, 2021). Mengacu pada kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dirasa sangat penting untuk kembali melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menguatkan kembali kinerja dari UMKM yang ada di Kota Banjarmasin khususnya maupun Indonesia secara umum, agar dapat kembali menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberhasilan suatu perusahaan di dalam menjalankan aktivitas usahanya diukur melalui kinerjanya. Karena kinerja dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana prestasi pasar yang telah dicapai oleh suatu produk yang dihasilkan perusahaan. (Hafeez et al., 2011). (Aribawa, 2016) selanjutnya menyatakan bahwa kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu dan dapat diselesaikan dengan tugas individu tersebut di dalam perusahaan dan pada suatu periode tertentu, dan akan dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar dari perusahaan individu bekerja. Kemampuan dari UMKM dalam memafaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan atau mencapai target penjualan. (Martono & Riyanto, 2017) menyatakan bahwa kinerja UMKM data diukur dari indikator pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pelanggan dan pertumbuhan keuntungan. Hal ini sejalan dengan pendapat para peneliti yang menganjurkan kriteria-kriteria kinerja penjualan seperti pertumbuhan penjualan (*sales growth*), pertumbuhan tenaga kerja (*employment growth*), pertumbuhan pendapatan (*income growth*) dan pertumbuhan pangsa pasar (*market share growth*) sebagai pengukuran kinerja perusahaan kecil yang paling penting (Miles & Covin, 2000); (Hadjimanolis, 2000). Untuk mencapai kinerja yang baik dari pelaku UMKM, maka perlu melakukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19.

Menurut data dari Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja bahwa UMKM di Kota Banjarmasin jumlahnya terjadi perkembangan dari tahun ke tahun. Jumlah UMKM di Kota Banjarmasin pada tahun 2013-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1

Data UMKM di Kota Banjarmasin Tahun 2013 – 2019

No	Tahun	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	2013	30.631	3.630	1.607	35.862
2	2014	31.416	3.723	1.642	36.781
3	2015	35.056	5.283	1.902	42.241
4	2016	42.336	3.827	1.695	47.858
5	2017	44.325	3.828	1.705	49.858
6	2018	31.622	3.724	1.643	36.989
7	2019	32.167	3.724	1.643	37.552

Sumber: Dinasi Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah unit usaha pada UMKM di Kota Banjarmasin selalu mengalami peningkatan, baik untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah pada periode 2013 - 2017. Namun, kondisi ini mengalami perubahan pada saat pandemi Covid-19 terjadi. Pada tahun 2018 – 2019, terjadi penurunan jumlah yang signifikan ada UMKM di Kota Banjarmasin, terutama pada kategori usaha mikro. Selain itu, dalam perkembangannya UMKM memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, diantaranya keterbatasan mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis. Sehingga dituntut adanya peran dan partisipasi dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah dan kalangan perguruan tinggi untuk membantu dan memfasilitasi akses informasi bagi para UMKM yang sebagian besar berada di daerah pedesaan atau kota-kota kecil. Melalui tulisan ini, penulis mencoba memaparkan

pentingnya kontribusi dari UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kota Banjarmasin.

3.2 Permasalahan

UMKM memiliki potensi yang begitu besar, namun kenyataannya dalam perjalanannya UMKM masih mengalami berbagai hambatan untuk mencapai tujuannya sebagai salah satu sektor yang mendukung pembangunan melalui pertumbuhan ekonominya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam studi ini adalah sebagai berikut: Mengapa sektor UMKM perlu dikembangkan, Apa yang menjadi tantangan dalam mengembangkan sektor UMKM, Bagaimana peran dari lembaga ekonomi lainnya dalam rangka memberdayakan atau mengembangkan sektor ekonomi dari UMKM, Apa saja program-program yang dapat ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM, Bagaimana keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan UMKM, Perencanaan ekonomi seperti apa yang dapat formulasikan agar mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peran UMKM.

3.3 Tinjauan Teoritis

A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk kelas industri dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 97,2%. Dari aspek mempekerjakan lulusan perguruan tinggi, Indonesia masih rendah hanya sekitar 7,2%. Namun, kondisi ini menciptakan peluang bisnis bagi lulusan universitas untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan menjadi pengusaha (*entrepreneur*) (Purba, et al, 2021). Selain itu, kelas industri ini juga

terbukti memiliki kemampuan untuk menahan berbagai bentuk guncangan krisis ekonomi. Sehingga sangat penting untuk memperkuat kelompok UMKM karena akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kriteria bisnis dalam kelompok UMKM telah diatur dalam sistem hukum di masing-masing negara (Redjeki & Affandi, 2021)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM), yang mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) UMKM dikelompokkan berdasarkan modal usaha
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha hingga maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha.
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) hingga maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) belum termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha.
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha.
- 2) UMKM dikelompokkan berdasarkan hasil penjualan tahunan.
 - a. Usaha Mikro memiliki penjualan tahunan hingga maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- b. Usaha Kecil memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) hingga maksimal Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
- c. Usaha Mikro memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) hingga maksimum Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini sudah mencapai 62 juta pelaku usaha, namun dengan adanya Pandemi Covid-19, sektor usaha ini terdampak hingga 90%. Terdapat beberapa ciri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai berikut:

- 1) Bahan baku mudah diperoleh.
- 2) Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi.
- 3) Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun.
- 4) Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja cukup banyak.
- 5) Peluang pasar cukup luas, sebagian produknya terserap di pasar lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.
- 6) Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat yang secara ekonomis menguntungkan.

B. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pergeseran fundamental peranan pelaku-pelaku pembangunan dan aktivitas yang berkaitan dengan dengan pembangunan ekonomi masyarakat, dapat tergambar pada pembangunan ekonomi daerah. Pengelolaan sumberdaya dalam rangka mengembangkan usaha

kemitraan baru dengan pihak swasta ataupun pihak ketiga lainnya dapat difasilitasi dengan adanya peranan pemerintah lokal (daerah) dan/atau kelompok-kelompok yang berbasis masyarakat (community based groups), yang pada akhirnya akan tercipta pekerjaan baru dan terdorongnya berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu daerah (wilayah) ekonomi (Adisasmita, 2005).

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Setiap pembangunan daerah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam pembangunan daerah, yang mana hal tersebut memerlukan kemampuan untuk melakukan penaksiran terhadap potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Sjafrizal, 2015).

Suparmako (2002) menyatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi daerah pada umumnya adalah untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Strategi untuk pengembangan

potensi yang ada pada suatu daerah dapat dibuat berdasarkan pemahaman akan tujuan dan sasaran pembangunan, serta pengetahuan akan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah. Dengan demikian strategi pengembangan potensi yang ada akan lebih terarah dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan usaha yang bersangkutan. diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada di daerah, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan sektor.
- 2) Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.
- 3) Mengidentifikasi sumber daya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk sumber daya manusianya dan yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan setiap sektor yang bersangkutan.
- 4) Dengan menggunakan model pembobotan terhadap variabel-variabel kekuatan dan kelemahan setiap sektor dan sub-sektor, maka akan ditemukan sektor-sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
- 5) Akhirnya, menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan yang akan dapat menarik sektor-sektor lainnya untuk tumbuh sehingga perekonomian

akan dapat berkembang dengan sendirinya (self propelling) secara berkelanjutan (sustainable development).

C. Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai proses dimana terjadinya kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi dapat juga menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan gambaran ekonomi atau hasil pada saat itu. Selanjutnya dalam pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “output perkapita”. Dalam pengertian ini, teori tersebut harus mencakup teori pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan ekonomi. Sebab, hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita

menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Sukirno, 2000). Secara rinci kedua teori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) **Produk Domestik Bruto (PDB)**

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa. Produk domestik bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik atas kinerja perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu (Mankiw, 2007).

2) **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Teori pertumbuhan neoklasik (Solow Growth Model). Model pertumbuhan Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2007).

D. Perencanaan Ekonomi

Pengertian perencanaan ekonomi pada dasarnya belum ada kesepakatan yang mengikat diantara para ahli ekonomi. Perencanaan sering disamakan dengan sistem politik suatu negara kapitalis, sosialis dan campuran. Setiap bentuk campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi diartikan juga sebagai perencanaan. Oleh sebab itu perencanaan dapat dikatakan sebagai teknik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh Badan Perencana Pusat.

Tujuan perencanaan ekonomi adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, direncanakan tujuan maupun jalannya. Asas perencanaan berkisar pada dua hal, yaitu:

- 1) Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Pilihan-pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Ciri-ciri suatu rencana pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
- 2) Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
- 3) Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
- 4) Usaha perluasan kesempatan kerja.
- 5) Usaha pemerataan pembangunan, sering disebut sebagai distributive justice,
- 6) Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
- 7) Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur

pokok sebagai berikut:

- 1) Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.
- 2) Adanya kerangka kerja makro. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.
- 3) Perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis, sehingga perlu diperkirakan dengan seksama.
- 4) Uraian tentang kerangka kebijakan yang konsisten seperti misalnya kebijakan fiskal, penganggaran, moneter, harga, serta kebijakan sektoral lainnya. Berbagai kebijakan tersebut perlu untuk dirumuskan dan kemudian dilaksanakan.
- 5) Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana-rencana sasaran.
- 6) Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Sedangkan fungsi-fungsi perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

- 2) Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
- 3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
- 4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
- 5) Perencanaan sebagai alat ukur untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi.

Dari sudut pandang ekonomi, alasan perlunya perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Agar penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien.
- 2) Agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap.
- 3) Agar stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur.

Pembahasan lebih lanjut adalah mengenai proses perencanaan ekonomi. Dalam proses perencanaan ekonomi terdapat beberapa tahapan, dan pada setiap tahapan tersebut sudah harus ditentukan apa yang ingin dicapai pada masing-masing tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ekonomi tersebut, diantaranya untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan sebagainya.
- 2) Mengukur ketersediaan sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut, misalnya tabungan, bantuan

luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, dan lain-lain.

- 3) Memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek investasi seperti jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik, dan pusat-pusat kesehatan. Selain itu juga perencanaan nasional tentang harga, seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, subsidi dan lain-lain.
- 4) Mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (welfare function) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional.

Selanjutnya setiap perencanaan yang dibuat tentunya pada saat diimplementasikan diharapkan dapat berhasil. Untuk itu perlu diperhatikan apa saja syarat dari keberhasilan dari sebuah perencanaan. Kunci keberhasilan suatu perencanaan biasanya memerlukan adanya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Komisi perencanaan sebagai badan pelaksanaan perencanaan yang terorganisir dengan tepat.
- 2) Data statistik perencanaan yang baik membutuhkan analisis yang menyeluruh tentang potensi sumberdaya yang dimiliki, beserta kekurangannya.
- 3) Tujuan perencanaan harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai.
- 4) Penetapan sasaran dan prioritas penetapan sasaran dan prioritas untuk mencapai suatu tujuan dibuat secara makro dan sektoral.

- 5) Mobilisasi sumberdaya dalam perencanaan ditetapkan dengan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumberdaya yang tersedia.
- 6) Keseimbangan dalam perencanaan suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian untuk menghindarkan kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan.
- 7) Sistem administrasi yang efisien. Administrasi yang baik dan efisien dan tidak korup adalah syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan.
- 8) Kebijakan pembangunan yang tepat. Pemerintah harus menetapkan kebijakan pembangunan yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaannya.
- 9) Administrasi yang ekonomis. Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi, khususnya dalam pengembangan bagian-bagian departemen dan pemerintah.
- 10) Dasar pendidikan administrasi yang bersih dan efisien memerlukan dasar pendidikan yang kuat. Perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar moral dan etika masyarakat.
- 11) Teori konsumsi. Salah satu syarat penting dalam perencanaan tersebut harus dilandasi oleh teori konsumsi.
- 12) Dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu perencanaan di dalam suatu negara yang demokratis.

3.4 Penelitian Terdahulu

Dalam studi ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar rujukan dalam membahas mengenai permasalahan di atas, yaitu:

1) Lies Maria Hamzah & Devi Agustien (2019)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pendapatan nasional sektor UMKM di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode data panel dengan Fixed Effect Model. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam nilai PDB UMKM, Tenaga Kerja UMKM, investasi UMKM, dan jumlah unit UMKM periode 2000-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja UMKM dan investasi UMKM memiliki efek positif dan signifikan terhadap pendapatan nasional sektor UMKM di Indonesia. Sementara untuk jumlah unit UMKM tidak mempengaruhi pendapatan nasional sektor UMKM di Indonesia (Hamzah & Agustian, 2019).

2) Abdul Halim (2020)

Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha perorangan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pertumbuhan dan korelasi usaha

mikro, kecil dan menengah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu menganalisis dan menginterpretasikan hubungan antar variabel melalui data yang akurat serta terbaru sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa variabel pertumbuhan UMKM (X) memiliki nilai signifikan sebesar 1,97 dan Hubungan X dan Y dapat dilihat dari nilai pearson correlation yaitu sebesar 0,690 jika kita lihat dari pedoman derajat hubungan pearson correlation terletak pada bagian nomor 4 yaitu jika nilai pearson correlation 0,61 s/d 0,80 berarti tingkat hubungan antara variabel X dan Variabel Y kolerasi kuat (Halim, 2020).

3) *Murdani, Sus Widayani, & Hadromi (2019)*

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. UMKM memberi sekitar 87% kontribusi ke dalam sejumlah badan usaha di Indonesia dan memiliki andil sebesar 85% dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam suatu usaha dibutuhkan studi mengenai kelayakan dari usaha tersebut. Namun kenyataannya pemilik usaha hanya terfokus pada pendapatan dan keberlanjutan usahanya. Karena itulah pengembangan masyarakat dengan metode pendampingan sosial perlu dilakukan untuk membantu memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Pengembangan Masyarakat mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan. Pemberdayaan merujuk pada

kemampuan seseorang, khususnya kelompok lemah untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk dapat meningkatkan pendapatannya dan berpartisipasi dalam proses pembangunan serta pengambilan keputusan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi di Kelurahan Kandri adalah pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Faktor pendukung dalam pengembangan masyarakat di bidang ekonomi ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah (Murdani, Sus Widayani, 2019).

4) Vicky Y. Takalumang, Vekie A. Rumate, & Agnes L.Ch.P Lopian (2018)

Kabupaten/Kepulauan Sangihe yang merupakan salah satu kepulauan yang ada di Sulawesi Utara. Laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Sangihe terus meningkat akan tetapi masih di bawah laju pertumbuhan Provinsi Sulawesi Utara oleh karena itu, perlu adanya strategi atau rencana dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Sangihe. Dengan adanya strategi perencanaan pembangunan ekonomi yang baik dan sesuai dengan kondisi daerah tersebut dalam hal ini Kepulauan Sangihe akan mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis analisis sektor ekonomi unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kepulauan Sangihe. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Location Quotient (Lq) dan Shift Share. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe dari 17 sektor terdapat 6 sektor yang basis atau unggulan. sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Real Estate, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan yang terakhir sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor-sektor ini merupakan sektor Basis atau unggulan artinya, sektor-sektor ini telah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Secara umum dapat pula diartikan bahwa sektor-sektor basis tidak hanya mampu memproduksi untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri, tetapi juga mampu memasok untuk kebutuhan daerah lain. Perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan hasil yang sangat positif terhadap nilai Total Kinerja selama kurun waktu 2010 -2015 karena mengalami kenaikan nilai absolute serta keunggulan kinerja perekonomian daerah (Vicky Y. Takalumang, Vekie A. Rumate, 2018)

5) M Mulkan Amahoru, Sugeng Rusmiwari, & Roro Merry Chornelia Wulandary (2017)

Pembangunan merupakan hal yang terpenting dalam Pertimbangan sosial ekonomi, sehingga perencanaan pembangunan menjadi salah satu prioritas. namun demikian jika pembangunan itu dirasa belum maksimal, maka pemerintah kembali memaksimalkan perencanaan pembangunan yang sebelumnya sudah disiapkan. tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Perencanaan Pembangunan berjalan dengan baik, dan melihat dampak keberadaan tempat pengolahan sampah terpadu.

Jenis penelitian pada umumnya di bedakan kedalam beberapa jenis. Klasifikasi jenis penelitian, antara lain didasarkan atas tujuan penelitian dan hakikat masalah penelitian. Terkait dengan masalah dalam penelitian ini, maka penulis mencoba untuk menggunakan metode penelitian Kuantitatif. dengan keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu hal ini jelas berdampak mengurangi tingkat penyebaran penyakit yang di akibatkan oleh pembuangan sampah sembarangan. sifat-sifat masyarakat yang cenderung apatis dan pragmatis dengan hal-hal seperti ini berhasil diubah menjadi masyarakat lebih optimis, kreatif, dan inovatif dalam mengelola lingkungan tempat tinggalnya, maka Tempat Pegolahan Sampah Terpadu menjadi hal yang efektif untuk dikembangkan (Rusmiwari et al., 2017)

6) Hailai Abera Weldeslassie, et al (2019)

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meninjau kondisi UMKM, kontribusi mereka terhadap penciptaan lapangan kerja, pendapatan, pengentasan kemiskinan, kontribusi terhadap PDB lokal, regional dan nasional, merangsang iklim kewirausahaan dan tantangan dan peluang dalam desain, implementasi, peluang pemasaran, keterkaitan, sumber keuangan, dinamika, kelangsungan hidup dan lanskap kebijakan. Untuk mencapai tujuan yang disajikan, kami mengumpulkan data primer dan sekunder melalui survei, diskusi kelompok fokus, dan tinjauan dokumen. Kami menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis data yang dikumpulkan menggunakan berbagai program statistik.

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan ekonometrik untuk memproses data, memperoleh hasil estimasi yang relevan dan sepenuhnya mendiskusikan tujuan di bawah penelitian ini. Kami dengan tegas mempertahankan bahwa sistem yang kami sajikan, dan metode yang diterapkan memungkinkan kami untuk mengatasi tujuan penelitian. UMKM di Ethiopia adalah sumber utama pekerjaan, pendapatan, secara signifikan berkontribusi terhadap PDB lokal, regional dan nasional dan kebijakan utama untuk menghilangkan kemiskinan.

Dalam regresi log-linear, dinyatakan bahwa modal awal UMKM, BDS, akses ke fasilitas kredit adalah penentu utama kinerja UMKM. Mayoritas UMKM memproduksi untuk pasar lokal dan regional; sedikit untuk pasar nasional dan tidak ada untuk pasar internasional. Selain itu, kami menemukan bahwa jenis kelamin pemilik/pengelola UMKM, BDS, akses kredit dan ukuran permodalan sangat menentukan kelangsungan hidup UMKM.

Berdasarkan penelitian ini, hambatan utama UMKM di Ethiopia adalah masalah keberlanjutan, kurangnya kredit, hubungan pasar yang lemah, pelatihan yang tidak memadai, skema pengembangan sumber daya manusia yang lemah, ketergantungan pada mentalitas pemerintah dan makan sendok, osilasi dalam kebijakan pemerintah, variasi harga, hubungan lemah dan strategi pengembangan pasar dan produk yang buruk (Wedeslassie et al., 2019)

7) James Obi, et al (2018)

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menyajikan artikel data tentang kontribusi UKM terhadap pembangunan ekonomi dalam

ekonomi transit. Desain penelitian deskriptif diadopsi dalam penelitian ini. Data diperoleh dari 600 responden di 60 perusahaan skala kecil yang berlokasi di berbagai bagian negara, (20 perusahaan skala kecil yang berlokasi di Negara Bagian Lagos, 20 di Negara Bagian Anambra dan 20 di Negara Bagian Kano Nigeria masing-masing). Analisis data dilakukan dengan menggunakan tabel dan persentase dan hipotesis nol dari penelitian ini diuji menggunakan model statistik inferensial chi-square (χ^2) pada tingkat signifikansi 5%. Temuan ini mengungkapkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara operasi usaha kecil dan menengah dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang (Obi et al., 2018).

8) Ceren Erdin & Gokhan Ozkaya (2020)

Semua kota yang sukses adalah kota yang paling maju dan produktif di wilayah dan negara mereka dalam hal ekonomi dan kualitas hidup. Selain itu, diamati bahwa ada industri dan perusahaan yang kuat di wilayah dan kota-kota ini. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi kualitas hidup dan perkembangan industri bersama-sama. Metode yang diusulkan dapat dianggap sebagai kombinasi dari penelitian operasional dan GIS (Geographical Information System). Hasil dari kedua pendekatan saling mendukung. Selain itu, pendekatan inovatif dari sektor dievaluasi oleh TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). Juga, artikel ini merekomendasikan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut hasilnya, kualitas hidup dan pembangunan sosial ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberadaan investasi dan perusahaan

manufaktur. Jika kebijakan pembangunan saat ini terus berlanjut, daerah dengan kualitas hidup rendah akan terus tertinggal dari kota-kota lain dalam hal pembangunan. Studi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan luar biasa antara Turki Timur dan Barat dalam hal standar hidup dan kontribusi (Erdin & Ozkaya, 2020)

9) Faiza Manzoor, Longbao Wei & Mahwish Siraj (2021)

Studi ini meneliti hubungan antara usaha kecil dan menengah (UKM) dan pertumbuhan ekonomi di Pakistan dari tahun 1990 hingga 2019. Ini berfokus pada UKM dan faktor-faktor lain yang bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi dengan mengevaluasi efeknya dalam jangka panjang dan jangka pendek dengan menggunakan pendekatan kointegrasi batas lag terdistribusi autoregresif. Dalam jangka panjang, output UKM, indeks pembangunan manusia, dan kredit untuk ekspansi sektor UKM diidentifikasi sebagai kekuatan pendorong utama di balik pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam jangka pendek, output UKM, indeks pembangunan manusia, kredit untuk UKM, dan tingkat ekspor tahunan adalah pendorong utama pembangunan ekonomi. Hasil empiris penting bagi pembuat kebijakan untuk mempromosikan, merangsang dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah melalui strategi mereka (Manzoor et al., 2021)

10) Roberto Cardinale (2019)

Strategi pembangunan ekonomi sangat berbeda dalam hal pendekatan intervensi negara. Namun, di seluruh negara, kebijakan tertentu cenderung berlaku pada tahap perkembangan tertentu. Misalnya, kasus Italia dan Korea Selatan, yang dianalisis dalam

makalah ini, menunjukkan prevalensi kebijakan sektoral pada tahap awal, diikuti oleh reorientasi terhadap kebijakan ekonomi mikro pada tahap selanjutnya. Makalah ini menafsirkan tren ini melalui sudut pandang tiga perspektif teoritis: struktural, a mengalokasikan dan evolusioner. Analisis historis dan teoritis dari makalah ini menunjukkan bahwa, bahkan jika setiap tahap perkembangan dicirikan oleh keunggulan kebijakan tertentu atas yang lain, campuran kebijakan dikejar pada setiap tahap. Selain itu, fungsi masing-masing pendekatan kebijakan bervariasi tergantung pada tahapannya. Temuan ini menyoroti hubungan tak terduga antara teori dan kebijakan, dan kebutuhan untuk mempertimbangkan perspektif teoritis yang berbeda untuk memahami karakter multifaset dari kebijakan ekonomi (Cardinale, 2019)

3.5 Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi deskriptif ini juga menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasi (Narbuko & Achmadi, 2007).

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berasal dari studi literatur yang relevan dengan tujuan studi ini. Yang selanjutnya hasil telaah literatur tersebut dielaborasi untuk didapatkan benang merahnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjelaskan bagaimana keterkaitan antara pengembangan UMKM dengan perencanaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

3.6 Pembahasan

3.6.1 Pentingnya pengembangan sektor UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. UMKM telah berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap PDB Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60% pada masa pra-pandemi. Pada saat itu penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga tinggi dan terus tumbuh mencapai di atas 96%, dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku usaha.

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil, UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah (Sopannah, 2010). Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal. UMKM justru

mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang, misalnya untuk melakukan produksi yang bersifat substitusi impor dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Karena itu, pengembangan UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Peran penting UMKM secara umum dalam perekonomian nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pameran utama dalam kegiatan ekonomi.
- 2) Penyedia lapangan kerja terbesar.
- 3) Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
- 5) Berkontribusi terhadap neraca pembayaran

Navastara (2014) menyatakan bahwa UMKM juga memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah. Saat ini kebijakan yang dipandang tepat dan strategis dalam rangka pembangunan potensi wilayah adalah kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Sektor usaha UMKM telah teruji dalam beberapa kali krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan hasilnya mampu menjadi katup pengaman dari ekses akibat adanya krisis. Walaupun, harus diakui setelah krisis ekonomi berlalu, UMKM juga tidak mengalami perubahan kebijakan yang signifikan.

3.6.2 Tantangan dalam mengembangkan sektor UMKM

Seperti yang telah dijabarkan pada bagian poin 5.1. di atas bahwa peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan output. Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang membuat kemampuannya untuk berkiprah dalam perekonomian nasional menjadi tidak maksimal. Hal ini dapat dilihat, walaupun banyak yang terlibat dalam pengembangan UMKM, namun tugas pengembangan UMKM yang dilimpahkan kepada instansi-instansi tersebut diwarnai isu negatif, misalnya politisasi terhadap UMKM, serta pemberian dana subsidi JPS yang tidak jelas dan tidak terarah. Demikian juga ketika BUMN menyisihkan labanya 1- 5% juga tidak dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu kredit perbankan juga sulit untuk diakses UMKM, diantaranya adalah karena prosedur yang rumit serta banyaknya UMKM yang belum bankable.

Selain permasalahan di atas, secara UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama yaitu masalah finansial dan non finansial (organisasi manajemen). Menurut Urata (Pramiyanti, 2008) secara terperinci kedua permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Masalah Finansial

- a. Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM.
 - b. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM.
 - c. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikururkan kecil.
 - d. Kurangnya akses kesumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
 - e. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
 - f. Banyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.
- 2) Masalah Non Finansial
- a. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
 - b. Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.

- c. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.
- d. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur keuangan dan akuntansi.

Sejalan dengan pendapat di atas, Hafsah (2004) menyatakan bahwa pada umumnya permasalahan dan penghambat UMKM antara lain meliputi:

1) Faktor Internal

- a. Kurangnya permodalan.

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan dalam UMKM, pada umumnya disebabkan sifat usaha mereka yang perorangan atau tertutup yang dalam operasionalnya mengandalkan modal dari sisi pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan untuk mendapatkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan administratif dan teknis yang sulit untuk dipenuhi UMKM.

- b. Sumber daya manusia yang terbatas

Sebagian besar UMKM tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM UMK baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usaha dan pengembangan usaha. SDM yang terbatas juga salah satu faktor yang menyebabkan UMKM sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru yang sebenarnya dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

c. Lemahnya jaringan usaha dan penetrasi pasar

UMKM pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, memiliki jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, yang disebabkan produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan memiliki kualitas produksi yang kurang kompetitif.

2) Faktor Eksternal

a. Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif

Kebijakan pemerintah untuk menumbuh kembangkan UMKM, meskipun setiap tahun terus disempurnakan namun dirasa masih belum kondusif bagi UMKM. Hal ini terlihat dengan masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

c. Implikasi otonomi daerah

Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Perubahan

sistem ini akan memberikan dampak terhadap pelaku UMKM berupa adanya biaya atau pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi, maka kemungkinan dapat menurunkan daya saing dari UMKM tersebut.

d. Implikasi perdagangan bebas

AFTA yang mulai berlaku pada tahun 2003 dan APEC pada tahun 2020, berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing dalam perdagangan bebas. UMKM mau tidak mau dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan preferensi pasar global.

e. Sifat produk dengan lifetime pendek

Sebagian besar produk UMKM memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk fashion dan kerajinan dengan lifetime pendek.

f. Terbatasnya akses pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

g. Aspek Permodalan UMKM

Salah satu kelemahan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia umumnya bersifat parsial, yaitu pada aspek permodalan, pemasaran, atau bahan baku. Namun tidak tertutup kemungkinan pada keseluruhan yang merupakan proses dari kegiatan usaha tersebut.

Usaha pemerintah dalam membantu UMKM sebenarnya telah dilakukan dari dua arah, yaitu yang berkenaan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pada **kebijakan fiskal**, pemerintah berusaha untuk meningkatkan dan memberikan bantuan kepada UMKM agar dapat berkembang dengan baik, salah satunya dengan adanya proyek bimbingan pengembangan industri kecil (BIPIK). Selanjutnya dalam **kebijakan moneter**, pemerintah mengembangkan program khusus kredit lunak untuk menunjang pengembangan perusahaan-perusahaan kecil milik pribumi, seperti KIK (kredit investasi kecil) dan KMKP (kredit modal kerja permanen). Pengawasan usaha-usaha kecil yang telah dan yang dianggap perlu dibantu melalui badan-badan milik negara juga merupakan bagian dari program kebijakan moneter (Tejasari, 2008).

3.6.3 Peran dari lembaga ekonomi lainnya dalam rangka memberdayakan atau mengembangkan sektor ekonomi dari UMKM

Strategi memberdayakan sektor ekonomi UMKM barangkali merupakan salah satu andalan utama bagi ketahanan ekonomi sebuah negara. Hal ini terbukti pada masa krisis dengan bertumbuhnya banyak usaha konglomerasi yang dililit hutang luar negeri, UMKM terutama yang berorientasi ekspor justru mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Sebagian UMKM juga dapat bertahan dengan berbagai cara, salah satu sebabnya adalah kecilnya investasi dan modal yang berputar dalam menjalankan usaha. Namun, di sisi lain masih banyak juga permasalahan yang

dihadapi oleh UMKM dalam rangka mengembangkan usahanya, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus bukan hanya dari pihak pemerintah saja.

Dengan kata lain, bahwa persoalan kurang berkembangnya dan terperhatikannya sektor ekonomi UMKM tersebut seharusnya bukan hanya ditumpukan pada tanggung jawab salah satu lembaga ekonomi saja, misalnya hanya pada sektor perbankan dalam kaitannya dengan permasalahan pendanaan. Jadi seharusnya ditumpukan dan menjadi tanggung jawab dari seluruh lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Oleh karena itu hal yang penting untuk ditindaklanjuti adalah bagaimana seharusnya peran yang dimainkan oleh lembaga-lembaga ekonomi tersebut dalam memberdayakan atau membangun sektor ekonomi UMKM tersebut.

Pertama, dapat dipahami bahwa sebenarnya lembaga yang paling bertanggung jawab dalam mengembangkan sektor ekonomi UMK adalah **pemerintah**. Karena secara de facto dan de jure, pemerintah lah yang seharusnya terlebih dahulu menunjukkan political will dan political action-nya secara konkrit dalam komitmennya untuk berpihak secara nyata ke sektor UMKM. Hal tersebut juga seharusnya sudah tertuang dalam blue print kebijakan pembangunan pada wilayahnya masing-masing. Pemerintah di sini seharusnya mampu untuk berperan sebagai inisiator, fasilitator, mediator, koordinator ataupun regulator demi untuk merealisasikan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada UMKM. Sebagai contoh, pemerintah daerah melalui dinas yang berada di bawah koordinasi BAPPEDA diharapkan mampu untuk menyusun

dan menerbitkan land scape atau peta potensi sektor ekonomi UMKM secara jelas dalam berbagai aspeknya untuk dijadikan rujukan bagi lembaga lainnya untuk mengambil kebijakan yang tepat.

Kedua, dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga dunia usaha, baik pengusaha *UMKM* maupun pengusaha besar, mereka selalu harus berupaya secara mandiri dan sukarela untuk melakukan langkah-langkah strategis dan realistis dalam berusaha. Diantaranya bagi pengusaha *UMKM*, mereka harus selalu berupaya meningkatkan keterampilan atau pengetahuan berusahnya, baik dibidang produksi, manajemen maupun pemasarannya. Atau melakukan aliansi usaha secara profesional baik dengan pengusaha sektor *UMKM*, maupun dengan sektor-sektor usaha lainnya, dalam bidang-bidang yang telah disebutkan. Kemudian mereka harus selalu berusaha dapat memenuhi syarat-syarat minimal agar dapat akses kelembaga-lembaga perbankan. Sedangkan bagi pengusaha besar di daerah, hendaknya dapat berusaha menyertakan sektor ekonomi *UMKM* sebagai partner berusaha secara fungsional atas dasar saling menguntungkan. Kemudian, pengusaha besar tersebut dapat melakukan investasi berkenaan dengan pemberdayaan sektor atau potensi sumber daya lokal unggulan utamanya dalam industri pengolahan dengan melibatkan sektor *UMKM*. Atau dapat juga pengusaha besar berperan sebagai penjamin pendanaan pada sektor perbankan, oleh karena adanya keterkaitan kegiatan atau usaha diantara mereka.

Ketiga, dalam kaitannya dengan lembaga keuangan dan perbankan. Diharapkan dengan adanya UU otonomi daerah maka

sektor perbankan yang ada di daerah dapat melakukan beberapa penyesuaian kebijakan baik dari kepentingan Bank Indonesia agar dapat mengakomodasi semangat UU Otonomi Daerah agar dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.

Berdasarkan ketiga alasan di atas sebetulnya pemerintah saat ini telah menjalankan strategi pemberdayaan UMKM tersebut yang dapat diklasifikasikan ke dalam:

- 1) Aspek manajerial yang meliputi: peningkatan produktivitas/omset/tingkat utilitas/ tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Aspek permodalan yang meliputi: bantuan moral (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPeDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit mini/ Midi, Kku)
- 3) Mengembangkan program kemitraan dengan perusahaan besar, baik melalui sistem Bapak–Anak Angkat. PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura ataupun subkontrak.
- 4) Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan, apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil), yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri)

- 5) Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan)

3.6.4 Program-program yang dapat ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM telah mencanangkan 6 pendekatan utama untuk melaksanakan pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia, yaitu (Sriyana, 2010):

- 1) Strategi Pengembangan Lingkungan Usaha yang kondusif

Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing KUMKM dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, menghilangkan biaya ekonomi tinggi, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Kebijakan pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi KUMKM tidak berada pada suatu instansi tertentu, dan cenderung tersebar pada berbagai instansi. Untuk itu, koordinasi dan sinergi dengan instansi lain untuk menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif bagi KUMKM. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif memerlukan adanya landasan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan pelaksanaannya yang memungkinkan KUMKM bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya. Pengembangan lingkungan usaha memiliki spektrum yang luas dan mencakup kebijakan politik, hukum, ekonomi makro, kerjasama internasional dan kebijakan pembangunan daerah, serta perijinan yang bersifat

lintas sektoral. Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong lahirnya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang pro pengembangan KUMKM.

2) Strategi Peningkatan Akses KUMKM Ke Sumberdaya Produktif

Rendahnya produktivitas KUMKM salah satunya akibat keterbatasan aksesnya kepada sumberdaya produktif. Untuk itu, pemerintah dan dunia usaha perlu mengembangkan sistem insentif agar KUMKM dapat mengakses sumberdaya produktif untuk mengembangkan usaha dan daya saingnya. Peningkatan akses KUMKM ke sumberdaya produktif ini bersifat selektif yang berfungsi sebagai stimulan bagi KUMKM dan berperan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar sumberdaya produktif yang dihadapi KUMKM. Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong upaya peningkatan akses KUMKM kepada sumber-sumber permodalan dan pembiayaan, peningkatan akses pasar, akses teknologi, dan akses informasi. Mempertimbangkan jumlah KUMKM yang sangat besar, maka demi efektivitas pembangunan KUMKM ditempuh melalui pendekatan sentra disertai pengembangan pasar BDS (jasa pengembangan bisnis) di Indonesia.

3) Strategi Pengembangan Kewirausahaan Dan Daya Saing KUMKM

Kewirausahaan merupakan faktor produksi terpenting untuk meningkatkan daya saing KUMKM dan daya saing ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan tambahan 6 juta unit usaha baru yang

berbasis pengetahuan dan teknologi selama 5 tahun mendatang. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan kebijakan untuk menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan sistem insentif untuk peningkatan kewirausahaan KUMKM yang ada, pengembangan KUMKM yang berkeunggulan kompetitif dan berbasis teknologi, serta pengembangan kebijakan produksi bersih.

4) Strategi Pematapan Kelembagaan Koperasi Sesuai Dengan Jati Diri Koperasi

Pengembangan koperasi sejati merupakan salah satu wahana untuk mewujudkan adanya demokrasi ekonomi di Indonesia. Untuk itu, perlu upaya menyempurnakan Undang-undang Perkoperasian, meningkatkan administrasi dan pengawasan badan hukum koperasi, pemberian bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, serta perlindungan kepada koperasi, dan perlindungan publik terhadap kegiatan usaha koperasi. Strategi pematapan kelembagaan koperasi diharapkan dapat menumbuh-kembangkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas dan mampu memberikan layanan yang baik kepada lebih dari 20 juta anggotanya.

5) Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan kelompok pelaku usaha terbesar (96%) di Indonesia dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal dan sebagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin. Bahkan dalam sebagian besar kasus, kelompok usaha mikro masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti: gizi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Usaha mikro memiliki karakteristik yang unik dan belum

tentu dapat diberdayakan secara optimal melalui mekanisme pasar yang bersaing. Untuk itu, pemberdayaan usaha mikro perlu ditetapkan sebagai suatu strategi yang tersendiri, melalui pengembangan pranata kelembagaan usaha mikro, pengembangan lembaga keuangan mikro dan mendorong pengembangan industri pedesaan.

6) Strategi Peningkatan Sinergi Dan Partisipasi Masyarakat

Sinergi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan pendekatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan KUMKM; peningkatan kapasitas institusi pembina dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan KUMKM; dan pengembangan kelembagaan UMKM.

3.6.5 Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan UMKM

UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia harapan untuk membangkitkan ekonomi rakyat sering kita dengarkan karena pengalaman ketika krisis multidimensi tahun 1997-1998 usaha kecil telah terbukti mampu mempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan memainkan fungsi penyelamatan di beberapa sub-sektor kegiatan. Fungsi penyelamatan ini segera terlihat pada sektor-sektor penyediaan kebutuhan pokok rakyat melalui produksi dan normalisasi distribusi. Bukti tersebut paling tidak telah menumbuhkan optimisme baru bagi sebagian besar

orang yang menguasai sebagian kecil sumber daya akan kemampuannya untuk menjadi motor pertumbuhan bagi pemulihan ekonomi. Harapan ini menjadi semakin kuat ketika muncul keberanian untuk mempercepat pemulihan dengan motor pertumbuhan UMKM. Pergeseran sesaat dalam kontribusi UMKM terhadap PDB pada saat krisis yang belum berhasil dipertahankan menyisakan pertanyaan tentang faktor dominan apa yang membuat harapan tersebut tidak terwujud.

Berbicara mengenai UMKM di Indonesia menganut cakupan pengertian yang luas pada seluruh sektor ekonomi termasuk pertanian, serta menggunakan kriteria aset dan nilai penjualan sebagai ukuran pengelompokan sesuai UU Nomor 9/1995 tentang usaha kecil dan Inpres Nomor 10/1999 tentang pembinaan usaha menengah. Dalam analisis makro ekonomi pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai tingkat pertambahan dari pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi ini digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Laju pertumbuhan PDB yang merupakan tingkat output diturunkan dari fungsi produksi suatu barang dan jasa (Mankiw, 2007).

Indikator perkembangan UMKM juga dilihat dari ekspor pada sektor UMKM, peluang untuk mengembangkan UMKM yang akan memasuki pasar ekspor masih sangat memiliki prospek yang cukup baik dan memiliki potensi yang cukup besar dimasa mendatang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di indonesia.

Badan Pusat Statistik (2003) menyebutkan bahwa jumlah UMKM tercatat 42,3 juta atau 99,90 % dari total jumlah unit usaha. UKM (Usaha Kecil dan Menengah) menyerap tenaga kerja sebanyak 79 juta atau 99,40 % dari total angkatan kerja. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB sebesar 56,70 %. Kemudian sumbangan UKM terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor sebesar Rp 75,80 triliun atau 19,90 % dari total nilai ekspor. Sampai saat ini perekonomian Indonesia mayoritas ditopang oleh sektor ini. Setidaknya, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut mampu menyerap sekitar 70 % tenaga kerja informal. Sisanya, 30 % bergerak di bidang formal. UMKM juga telah menyumbang produk ekspor sampai 16 %. Sektor usaha mikro kecil dan menengah ini perlu dibina dan diberdayakan, karena merupakan penggerak perekonomian dan pengembang ekonomi kerakyatan. Potensi itu terlihat tahun 2003, UMKM telah menyerap sebanyak 42,4 juta unit usaha dan 79 juta tenaga kerja dengan 56,7 % dari PDB nasional.

Pembangunan ekonomi berbasis UMKM menjadi industri kreatif dengan ide-ide inovatif potensial yang berkontribusi terhadap pembangunan produk barang dan jasa. Industri kreatif menawarkan jasa yang dapat digunakan sebagai input dari aktivitas inovatif perusahaan dan organisasi baik yang berada di dalam lingkungan industri kreatif maupun yang berada diluar industri kreatif. Industri kreatif juga menggunakan teknologi secara intensif sehingga dapat mendorong inovasi dalam bidang teknologi tersebut. Industri kreatif digambarkan sebagai kegiatan ekonomi yang penuh kreativitas

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat saja dilakukan dengan memfokuskan pada sektor-sektor usaha kreatif, tanpa harus diikuti penciptaan tenaga kerja yang memadai. Pengalaman pembangunan selama Orde Baru memberikan ilustrasi sepintas bagaimana mudahnya memicu pertumbuhan melalui pendekatan usaha kreatif dan inovatif. Menurut Howkins (2011) ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan aset kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Wahyudi (2010) berpendapat industri kreatif dapat mendukung kluster-kluster kreatif dalam mempertemukan perusahaan publik dan swasta dengan pertumbuhan perusahaan dan sosial yang terbukti semakin populer di tingkat kota. Menurut Wirawan (2012) mengemukakan industri kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, interior, produk, industri, pengemasan, dan konsultasi identitas perusahaan. Desain fashion, kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya.

3.6.6 Perencanaan ekonomi yang dapat formulasikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peran UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM RI sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yang menjadi sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur

melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada Tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
- 2) Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
- 3) Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
- 4) Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan
- 5) Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM dan koperasi termasuk sentra Industri Kecil Menengah (IKM) diarahkan: sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan Terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. Selain itu, RPJMN Tahun 2020-2024 juga

mengarahkan koperasi untuk mendukung pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, melalui revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja serta kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong.

3.7 Kesimpulan

Dalam rangka menindaklanjuti tahap-tahap dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, agar dapat berjalan dan terlaksana secara efektif, efisien, tepat manfaat dan tepat waktu, diperlukan langkah-langkah kebijakan secara komprehensif dan terpadu. Arah kebijakan pembangunan didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya bidang ekonomi tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*), khususnya dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing. Kebijakan pembangunan nasional memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah, tetapi harus juga didukung oleh peran swasta dan masyarakat sebagai *stakeholders* pembangunan. Akhirnya bahwa perencanaan pembangunan ekonomi memang harus direncanakan dengan baik dan matang supaya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dan juga harus ada pengawasan yang lebih efektif lagi supaya tidak terjadi kebocoran yang merugikan rakyat banyak.

BAB IV

ISU PERENCANAAN SEKTOR PERTANIAN

4.1 Latar Belakang

Sektor Pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi ruang untuk rakyat kecil. Saragih, B (2002) menyampaikan untuk meminimalisir permasalahan ekonomi yang begitu kompleks diperlukan langkah strategis dalam pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jalan keluar. Langkah strategis yang dimaksud diupayakan memiliki karakteristik berupa kemampuan mengatasi permasalahan ekonomi dalam tahap perencanaan dan implementasi, langkah strategis harus memiliki keterkaitan dengan upaya pembangunan pada masa lalu dan mampu membawa ekonomi Indonesia yang mampu bersaing diperekonomian global.

Umumnya, sektor pertanian di Indonesia terdiri dari dua jenis berdasarkan skala: 1) Perkebunan besar baik milik negara maupun perusahaan swasta. 2) Produksi petani kecil, kebanyakan rumah tangga yang melakukan pertanian tradisional. Perkebunan besar cenderung fokus pada komoditas ekspor; seperti minyak sawit dan karet, sementara petani skala kecil fokus pada komoditas hortikultura untuk memasok konsumsi makanan masyarakat lokal dan regional, seperti beras, kedelai, jagung, buah-buahan dan sayuran.

Permasalahan yang mendasar adalah pertanian tanaman pangan memiliki hamparan cenderung kecil, dimiliki oleh

perseorangan dan memiliki tingkat keseragaman hasil yang rendah dikarenakan proses dan sarana produksi yang digunakan juga bervariasi, padahal sebagai lumbung padi nasional bisa menjadi lokomotif pertanian dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan kompetitif. Dalam pertanian skala kecil, petani mengalami kerugian seperti posisi tawar lemah, kebanyakan aktivitas dihabiskan di on-farm dan lambatnya peningkatan kesejahteraan petani.

Pada tahun 2019 Kementerian Pertanian membuat sebuah program yang berfokus untuk mendorong pengelolaan usaha pertanian secara kolektif (korporasi) untuk pertanian lebih maju dan kompetitif. Korporasi Pertanian adalah pengembangan sektor pertanian berbasis korporasi yang dikelola dengan manajemen profesional. Secara umum korporasi pertanian bisa berbasis BUMN, Non BUMN maupun masyarakat. Dalam manajemen pengelolaan lahan, korporasi pertanian harus memiliki hamparan lahan minimal seluas 1.000 hektar.

Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani adalah bagian dari pembangunan pertanian nasional yang dilaksanakan berdasarkan landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945, serta sesuai dengan ruh Pancasila. Korporasi petani sejalan dengan amanat Pancasila, yakni ekonomi Gotong Royong atau sistem kekeluargaan yang bersifat dinamis. Ketentuan dari berbagai konstitusi terkait ekonomi masyarakat mewajibkan pemerintah untuk memprioritaskan pemberian perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang lemah dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi. Oleh karena itu,

pengembangan korporasi petani bertujuan untuk sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan sebagai bagian dari afirmasi kehidupan sejahtera, bermartabat, maju, adil, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, pengembangan korporasi petani di kawasan pertanian dilaksanakan dengan prinsip dasar gotong royong, keadilan rakyat, dan kemandirian. Korporasi petani secara tegas terdapat pada Permentan Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, yang menyebutkan korporasi petani adalah “Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar modal dimiliki oleh petani”. Korporasi petani sebagai satu kesatuan badan usaha yang dibentuk dari, oleh, dan untuk petani dalam upaya merestorasi jiwa gotong royong petani. Usaha korporasi petani juga merupakan basis untuk mendukung usaha tani. Sebaliknya, pengembangan usaha korporasi didukung oleh usaha tani yang dimiliki individu petani. Korporasi petani dimiliki bersama oleh petani anggota korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, pengembangan korporasi petani diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan petani dalam mengelola keseluruhan rantai produksi usaha tani. Petani tidak hanya berdaulat dalam pengelolaan *on farm* tetapi juga pengolahan atau *off farm* dan pemasaran hasil usaha tani.

Penempatan kedudukan korporasi petani sebagai penggerak ekonomi kawasan merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan

modern. Transformasi pertanian dari semula berazas ekonomi konvensional menjadi berbasis ekonomi modern berperan penting dalam mendesain korporasi petani. Transformasi tersebut dapat ditempuh melalui tiga jalan secara bersamaan, yaitu: 1) transformasi pengembangan bisnis/usaha sehingga potensi berusaha para petani ditumbuhkembangkan dan kemudian diimplementasikan menjadi sumber pendapatan yang optimal; 2) transformasi pengembangan kelembagaan ekonomi petani sehingga peluang berusaha dapat didistribusikan, modal ekonomi dan modal sosial disinergikan, dan potensi manfaat/keuntungan berusaha dapat dibagikan secara berkeadilan; dan 3) transformasi teknologi melalui adopsi inovasi modern.

4.2 Permasalahan

Kenyataan yang harus diakui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil. Keadaan pelaku usaha pertanian tersebut setiap tahun semakin bertambah jumlahnya dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Masih rendahnya taraf kesejahteraan petani terlihat dari hasil Sensus Pertanian (SP) 2003 yang dibandingkan dengan SP 1993. Skala usaha pertanian yang kecil menghambat petani meningkatkan pendapatannya sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Masyarakat petani miskin selain luas usahatani yang sempit, juga disebabkan oleh: produktivitas yang rendah; infrastruktur terbatas; aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, informasi, dan pasar; serta rendahnya kapasitas petani.

Mendasarkan pada orientasi pembangunan pertanian di Indonesia saat ini yang mendasarkan pada sistem agribisnis maka peranan kelembagaan pertanian, termasuk didalamnya kelembagaan petani, sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani; aksesibilitas pada informasi pertanian; aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar; dan adopsi inovasi-inovasi pertanian. Di samping itu, keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani.

Pentingnya kelembagaan petani diakui dalam pembangunan pertanian, baik di negara industri maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun kenyataan memperlihatkan kecenderungan masih lemahnya kelembagaan petani di negara berkembang, serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat petani. Kelembagaan petani diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi petani, namun sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal. Di sisi lain, globalisasi dan liberalisasi ekonomi sebagai implikasi diratifikasi GATT dan WTO merupakan kenyataan berat yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Diperlukan penguasaan teknologi pertanian yang memadai dan kemampuan bersaing dari para petani agar mampu bertahan di tengah-tengah persaingan ekonomi dunia. Upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani, dan daya saing petani dilakukan melalui pengembangan kelembagaan

pertanian, termasuk di dalamnya penguatan kapasitas kelembagaan petani.

Kenyataan menunjukkan bahwa program-program pembangunan semakin sulit untuk menjangkau petani kecil secara individu yang jumlahnya sangat banyak. Situasi ekonomi yang ada, infrastruktur, serta kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah seringkali mendorong petani-petani dengan lahan sempit dan buruh tani terdesak ke arah marginalisasi secara ekonomi dan sosial. Selain penguasaan atas lahan pertanian yang sempit, nilai tukar pertanian yang rendah, kebijakan pertanian yang tidak berpihak ke petani semakin mendorong terpuruknya petani ke dalam kemiskinan.

Terkait dengan permasalahan di atas, penulis mencoba untuk memaparkan dua hal, yaitu: Urgensi eksistensi kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian di Indonesia dan strategi dalam pengembangan kelembagaan petani sehingga mampu menjadi sarana untuk mewujudkan petani yang mandiri.

4.3 Kajian Pustaka

Kelembagaan Tani

Lembaga (*institution*) adalah organisasi atau kaidah-kaidah, baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Lembaga-lembaga dalam masyarakat desa ada yang bersifat asli berasal dari adat kebiasaan yang turun temurun tetapi ada pula yang baru diciptakan baik dari dalam maupun dari luar masyarakat desa.

Lembaga-lembaga adat yang penting dalam pertanian misalnya pemilikan tanah, jual beli dan sewa menyewa tanah, bagi hasil, gotong royong, koperasi, arisan dan lain lain. Lembaga-lembaga ini mempunyai peranan tertentu yang diikuti dengan tertib oleh anggota masyarakat desa, dimana setiap penyimpangan akan disoroti dengan tajam oleh masyarakat (Mubyarto,1995). Lembaga-lembaga yang ada dalam sektor pertanian sudah mengalami berbagai zaman. Sehingga banyak lembaga yang sudah lenyap tetapi timbul juga lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan iklim pembangunan pertanian. Suatu lembaga yang hidup sekarang, ada yang merupakan suatu lembaga baru tetapi mungkin juga merupakan lembaga yang sudah mengalami perubahan mengikuti kebutuhan masyarakat. Misalnya sewa menyewa tanah dapat diubah menjadi bagi hasil atau sistem penyakapan, pinjam meminjam uang di bawah tangan dilembagakan dalam bentuk Badan Kredit Desa (BKD), dan organisasi baru dapat dibentuk untuk melancarkan usaha tertentu.

Seperti dijelaskan terdahulu, gotong royong merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang ada disektor pertanian. Semangat kerja sama atau bergotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu demi kepentingan bersama banyak didapati dalam masyarakat pedesaan pada berbagai negara. Kegiatan gotong royong yang demikian mempunyai arti ekonomi penting dan dapat benar-benar membantu mempercepat proses pembangunan pertanian. Menurut Notoatmojo seperti yang dikutip oleh Mubyarto (1995), gotong royong yang asli di Indonesia sudah mulai ditemukan pada tahun 2000 S.M. sampai kira-kira tahun 1800 pada waktu bangsa-bangsa Eropa mulai datang di Indonesia. Gotong royong perlu

dibedakan dari tolong menolong atau bantu membantu karena yang kedua akhirnya menunjukkan pada pencapaian tujuan perorangan. Gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama misalnya memperbaiki jalan, membuat jembatan, memperbaiki saluran irigasi dan sebagainya. Semangat gotong royong tersebut juga adalah salah satu hal yang dapat ditemui dalam kelompok tani. Suatu kelompok menurut Turang (1989) setidaknya memiliki beberapa azas yaitu: kekeluargaan, yang berkenaan dengan jiwa dan semangat keakraban yang hangat, rasa dan perbuatan sepenanggungan yang tinggi, tolong menolong yang murni antar anggota; musyawarah dan mufakat, adalah berkenaan dengan selalu berpegang pada prinsip dan saling pengertian, saling dengar pendapat, saling percaya mempercayai antar anggota, dan menghargai serta menjunjung harkat dan martabat pribadi; kerja sama, adalah berkenaan dengan kepentingan bersama dalam suatu kesatuan dan kepentingan perorangan anggota kelompok; religius, adalah berkenaan dengan keyakinan atau kepercayaan antar anggota, berdasarkan agama yang diyakini; persatuan dan kesatuan, adalah berkenaan dengan adanya kemauan baik untuk bersatu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama, sehingga menjadi satu kesatuan kerja. Selanjutnya, dinamika kelompok tani setidaknya ditandai dengan berbagai aspek di antaranya adalah aspek interaksi sosial.

Kebutuhan manusia sangat kompleks dan beragam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak akan bisa terwujud tanpa adanya bantuan dan kerjasama di antara sesama anggota masyarakat. Oleh karenanya, realitas menunjukkan bahwa kerjasama

baik berupa gotong royong dan tolong menolong menjadi ciri khas penentu interaksi dan relasi sosial dalam mencapai kesejahteraan hidup. Dengan bermodalkan akal dan budi pekerti yang melebihi manusia dengan makhluk lainnya, maka manusia menjadi sentral perubah dan penentu lingkungannya.

Keunikan manusia yang dicirikan melalui akal dan pikirannya menurut Giddens seperti yang dikutip oleh Poloma (1994), menyebabkan setiap individu secara bebas dipandu oleh alam pikirannya dalam bereaksi dan mencapai semua yang menjadi kehendaknya, akan tetapi dalam mencapai kehendaknya diikat oleh aturan moral interaksi sosial yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Giddens di atas, maka sudah sewajarnya manusia ditempatkan sebagai aktor penentu arah dan tujuan interaksi dan relasi yang dibangunnya. Suatu pencapaian tujuan tentu akan sangat sulit dicapai tanpa adanya kerjasama di antara para anggota masyarakat itu.

Interaksi sosial dalam kelompok tani antara lain dapat tergambar dalam beberapa prinsip yaitu: (1) tolong menolong, dimaksudkan bukan hanya dalam arti yang mempunyai kelebihan harus membantu yang berkekurangan, tetapi lebih dari itu yakni berupa menghimpun tenaga-tenaga, dana lebih, atau bahan lebih dari para anggota dan diberikan kepada anggota yang memerlukan sehingga yang bersangkutan mampu membangun sesuatu atau mampu mengatasi kesulitan dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.; (2) keterbukaan, adalah berkenaan dengan keterbukaan dalam pengaturan dan pengurusan kegiatan kelompok, keterbukaan hati setiap anggota dalam menyatakan keinginan,

kesulitan atau hal-hal yang dirasakan dan keterbukaan dalam menerima anggota baru yang mau menjadi anggota tanpa melihat perbedaan; (3) disiplin kelompok, adalah berkenaan dengan perilaku ikhlas dan sukarela serta taat terhadap kaidah-kaidah disiplin kelompok; (4) kebersamaan, adalah berkenaan dengan aktualisasi rasa memiliki dari setiap anggota yang menjadikan mereka mudah dan spontan untuk turut serta dalam setiap kegiatan kelompok; (5) daya guna dan hasil guna, adalah didasarkan pada mengutamakan hasil maksimal dengan menghimpun atau memanfaatkan tenaga perorangan dan dana atau bahan yang lebih, milik masing-masing anggota kelompok (Turang, 1989).

Kelompok tani merupakan salah satu wadah untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Jamasy(2004) yang mengatakan bahwa media kelompok merupakan satu pola pendekatan pemberdayaan yang belakangan ini mampu mengangkat mereka yang miskin agar menjadi berdaya dan berkembang. Masyarakat diorganisir dalam wadah kelompok, dan kelompok itu dimultifungsikan menjadi media pembelajaran anggota sekaligus proses tukar menukar informasi, pengetahuan dan sikap. Secara perlahan, kekuatan individu akan muncul menjadi kekuatan kelompok dan di situlah berlangsungnya proses penguatan dan pemberdayaan.

Cooperative Farming

Cooperative farming dapat didefinisikan sebagai model usaha tani dimana sejumlah areal pertanian yang dikelola secara kolektif, baik berdasarkan ikatan famili, kelompok tani, ataupun

ikatan kelompok lainnya, yang merupakan hasil penggabungan pengelolaan lahan yang dimiliki oleh anggotanya untuk mencapai skala ekonomis dalam pengelolaannya (Sa'id dan Intan, 2000). Melalui model *cooperative farming* petani dapat dengan mudah mengakses sumber daya yang diperlukan untuk mengoptimalkan usaha taninya. Petani tidak perlu memikirkan bibit, modal untuk membayar tenaga kerja, bibit unggul, pupuk, dan pasar. Secara teknis teknologi, pertanian modern dapat diimplementasikan secara optimal, dan keseragaman pola tanam yang berperan dalam mengendalikan hama penyakit. Hal ini tidak terlepas dari peran kelompok dalam menerapkan metode partisipatif dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengontrol aktivitas usaha tani. Kondisi ini sangat dirasakan oleh para petani kecil terutama yang berstatus sebagai penyakap.

Tujuan jangka panjang *cooperative farming* menurut Fakhri (2003) adalah mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri dalam artian berbasis komunitas, berdaya saing, berkelanjutan, efektif dan efisien melalui pengelolaan usaha tani secara ekonomis, kolektif dan partisipatif. Model ini mirip dengan sistem Agribisnis Berbasis Komunitas sebagaimana diungkapkan oleh Sitorus (2001), dimana prinsip dari pengembangannya adalah membangun keterpaduan dan kemandirian pengambilan keputusan bersama.

Instrumen utama yang menjadi kekuatan dalam model *cooperative farming* adalah kelembagaan, yaitu peraturan-peraturan hasil kesepakatan bersama dan institusi kelompok tani sehamparan. Helmi (1997) menyatakan bahwa konsep kelembagaan bisa dipahami secara berbeda oleh berbagai orang. Untuk itu penting

terlebih dahulu memahami arti dari kelembagaan. North (1990) mendefinisikan kelembagaan sebagai kerangka kerjadi mana interaksi diantara manusia terjadi. Lebih jauh ia membedakan antara kelembagaan (institusi) dan organisasi. Menurutnya, organisasi memberikan struktur bagi interaksi manusia berdasarkan kerangka kelembagaan yang dibuat. Ada beberapa alasan pokok mengapa kelembagaan menjadi kekuatan utama dalam model *cooperative farming* ini:

1. Kelembagaan adalah alat untuk memfasilitasi kegiatan bersama (*connected action*) dalam mencapai kemajuan sosial ekonomi dalam pembangunan (Brinkerhoff dan Goldsmith, 1992).
2. Kelembagaan membentuk pola interaksi di antara manusia dan hasil-hasil yang bisa dicapai oleh individual dalam proses interaksi tersebut (Ostrom, 1992).
3. Kelembagaan dapat meningkatkan manfaat yang dapat diperoleh dari sejumlah input (masukan tertentu), atau sebaliknya dapat menurunkan efisiensi hingga seseorang harus bekerja lebih keras untuk mencapai hasil yang sama (Ostrom, 1992).
4. Kelembagaan membentuk perilaku individu melalui dampak insentif yang ditimbulkannya (Ostrom, 1992).

Di antara insentif yang dimaksudkan oleh Ostrom adalah insentif material dalam bentuk uang atau barang dan insentif lainnya seperti kondisi kerja yang lebih baik, terbentuknya hubungan sosial yang menyenangkan, dan perasaan keikutsertaan dalam kegiatan penting dan berskala besar.

Paling tidak terdapat empat perhatian pokok yang perlu ditekankan dalam penguatan kelembagaan usaha tani pedesaan, yaitu

terkait kelembagaan alih/transfer teknologi, keuangan dan permodalan usaha tani, produksi/usaha tani, dan pemasaran hasil (Sudaryanto dan Agustian, 2003). Penguatan kelembagaan pedesaan harus memiliki makna peningkatan daya saing usaha tani. Menurut Lauer (Pranadji, 2006) bahwa isu penting dari kelembagaan adalah tata nilai yang menghidupkan kelembagaan. Jika kelembagaan ekonomi diisi oleh tata nilai maju (mengalami peningkatan) maka dipastikan daya saing ekonomi (usaha tani) yang digerakkan oleh kelembagaan ekonomi desa akan tinggi dan berkelanjutan, dan sebaliknya.

Mekanisme Kerja *Cooperative Farming*

Model *cooperative farming* yang direkomendasikan oleh para pakar dan petani pada dasarnya memiliki mekanisme yang hampir sama dengan model *estate farming* dan *corporate farming*. Namun demikian, mekanisme kerja dari *cooperative farming* lebih bersifat perpaduan atau sinergi antara mekanisme konseptual dengan mekanisme sosial hasil kesepakatan. Secara riil, mekanisme kerja *cooperative farming* adalah sebagai berikut (Setiawan, 2002):

1. Kelompok tani sehamparan merupakan lembaga milik dan kepercayaan bersama petani sebagai lembaga yang memayungi petani anggota kelompok. Petani adalah anggota kelompok dan sekaligus berperan sebagai pihak yang mengusahakan lahan usaha taninya, mereka harus sadar dan patuh atas kesepakatan-kesepakatan bersama.

2. *Cooperative farming* didirikan oleh petani melalui musyawarah mufakat antara para anggota dengan memperhatikan aspirasi dan aspek sosial budaya setempat.
3. *Cooperative farming* dipimpin oleh seorang tokoh tani atau ketua kelompok tani yang dipercaya oleh anggotanya dan memiliki profesionalisme. Ia dipilih oleh petani anggota kelompok tani dan didampingi oleh seorang sarjana profesional.
4. Pengelolaan lahan dilakukan oleh masing-masing petani anggota kelompok tani dan tidak diserahkan kepada suatu lembaga agribisnis lainnya.
5. Perencanaan pengelolaan dan pengalokasian sumberdaya usaha tani termasuk teknologi yang akan diterapkan dibuat dan disepakati secara partisipatif berdasarkan kepada aturan-aturan yang telah direkomendasikan para ahli atau institusi dan disinergikan dengan pengalaman petani atau pengetahuan lokal.
6. Dalam *cooperative farming*, kelompok tani juga bekerjasama dengan kelembagaan-kelembagaan pertanian setempat, termasuk dengan kelembagaan desa, Dinas Pertanian, dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
7. Pada tahap awal *cooperative farming*, kelompok melakukan beberapa langkah preventif, seperti penyeleksian dan pembatasan anggota kelompok. Hal ini ditujukan untuk mengefektifkan pengelolaan pada tahap prakondisi, dan mencegah masuknya petani yang bias orientasi. Secara sosial hal ini ditujukan pula untuk mendidik dan menanamkan

kepercayaan kepada petani yang belum menjadi anggota kelompok.

8. Pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan secara partisipatif dan intensif, hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pengendalian dini permasalahan-permasalahan teknis di lapangan.
9. Dana awal yang digulirkan di dalam kelompok pada mulanya merupakan dana pinjaman dengan tingkat bunga rendah, dan sebagian merupakan hibah atau dana stimuli dari pemerintah daerah.

Menurut Simatupang (2002), usaha pertanian pada umumnya bersifat *constant return to scale* yang berarti biaya rata-rata bersifat konstan artinya tidak berhubungan dengan volume produksi usahatani. Kalaupun ada, skala ekonomi terdapat pada aktivitas di luar usahatani seperti pemasaran dan pengolahan hasil. Hal ini terjadi karena teknologi pertanian pada umumnya *netral scale*. Teknologi biologis (benih) dan kimiawi (pupuk dan pestisida) bersifat divisible (terbagikan sampai satuan terkecil) sehingga dapat diterapkan secara optimal baik pada usahatani kecil maupun pada usahatani besar. Beberapa mekanisme kerja yang bersifat sosiologis, ekonomis, dan teknis dalam *cooperative farming* yang telah berhasil diterapkan pada kelompok tani adalah sebagai berikut:

1. Semua kebutuhan usahatani anggota disediakan oleh kelompok tani dan anggota diharuskan mengalokasikan semua sumberdaya yang telah disediakan tersebut. Harapannya pengelolaan usahatani dapat berjalan optimal.

2. Alokasi sarana produksi pertanian diharuskan tepat waktu, tepat guna, dan tepat jumlah. Untuk itu pendistribusiannya dikelola oleh kelompok secara tepat pula.
3. Secara teknis, sistem pengairan dan pengendalian hama penyakit juga dikelola secara kolektif.
4. Pemasaran hasil usahatani semuanya dikelola oleh kelompok.
5. Pembayaran pinjaman (kredit) dilakukan oleh kelompok melalui mekanisme pemotongan hasil penjualan.

Peranan *Cooperative Farming*

Berbicara tentang peranan *cooperative farming* secara sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan sesungguhnya tidak berbeda dengan Kelompok Tani di Taiwan, Thailand, Malaysia, dan India. Di Banglades terdapat organisasi irigasi yang mengelola air tanah, ternyata berhasil melakukan fungsi bisnis yang mencakup usaha perkreditan, pemasaran hasil pertanian, pengadaan sarana produksi dan penyewaan mesinmesin pertanian.

Di beberapa negara lain, organisasi petani seperti kelompok tani dan perhimpunan petani pemakai air banyak yang sudah mampu berperan dalam banyak hal. Di Malaysia dan Thailand yang pemeberdayaan kelompok dan pemuda taninya telah dilakukan sejak tahun 1992, telah ada kelompok tani yang mampu berperan dalam kegiatan ekonomi seperti: pengadaan saprotan, perkreditan, pemasaran hasil-hasil pertanian, pengolahan pascapanen, dan pemberian pelayanan penyuluhan pertanian. Begitu pun di Gujarat India terdapat organisasi petani yang mengelola irigasi yang mampu melakukan kegiatan bisnis, seperti pengadaan sarana produksi

pertanian, perkreditan, pemasaran hasil pertanian, pengolahan pasca panen, dan pemberian penyuluhan pertanian. Peranan *cooperative farming* sesungguhnya tidak hanya dalam pengelolaan usahatani dan pemasaran hasilnya saja, tetapi juga mampu menumbuhkan kaum perempuannya (ibu-ibu tani). Melalui *cooperative farming* ibu-ibu juga bisa melakukan pengembangan ekonomi melalui pengembangan agro industri, seperti membuat makanan ringan, menjual beras dalam kemasan-kemasan khusus, dan ikut serta mengelola lumbung. Secara riil, *cooperative farming* cukup berperan dalam pemberdayaan usahatani petani (Candra, 2001).

Secara sosial, keberadaan *cooperative farming* juga berperan dalam meningkatkan komunikasi antara petani dan dengan pihak-pihak luar, seperti para bandar beras, para mahasiswa yang melakukan kunjungan dan penelitian, dan perusahaan sarana produksi pertanian. Melalui *cooperative farming* posisi tawar dan akses anggota menjadi lebih kuat, sehingga mereka tidak menjadi bulan-bulanan pengusaha saprotan, tengkulak, dan peminjam modal liar.

Secara ekonomi, keberadaan *cooperative farming* berperan dalam penyediaan modal kerja, sarana produksi pertanian, bibit, dan sebagainya yang dapat diperoleh dengan harga lebih murah dan mudah. Pemasaran hasil produksi ditampung oleh kelompok dan dijual pada saat harga menguntungkan. Posisi tawar petani menjadi meningkat karena pengambilan keputusan harga ditentukan secara bersama-sama didalam musyawarah kelompok. Adanya lumbung menumbuhkan kesadaran petani untuk menyimpan atau

menabungkan hasil panennya dalam bentuk gabah. Penjualan dengan sistem kolektif juga meningkatkan efisiensi biaya pengangkutan dan transportasi. Secara teknis, pengelolaan usahatani anggota berjalan optimal, segala kebutuhan dan permasalahan dapat diselesaikan. Berdasarkan kesepakatan kelompok, setiap petani dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman modal dan sarana produksi pertanian. Pola tanam dapat berjalan tepat waktu (serempak) karena pelaksanaannya berada dibawah komando kelompok. Dengan demikian serangan hama dan penyakit dapat ditekan. Kekurangan air pada musim kemarau dapat diantisipasi dengan pompanisasi yang murah, karena menggunakan mesin pompa milik bersama (kelompok). Secara riil, optimalisasi penerapan teknologi budidaya dan ketepatan dalam aspek lainnya telah meningkatkan hasil panen padi petani per hektar, yakni dari rata-rata 4.7 ton per hektar meningkat menjadi 5.5 ton sampai 6 ton per hektar (Candra, 2001). Secara kelembagaan, adanya pelayanan yang meyakinkan dari *cooperative farming* telah mendorong petani untuk patuh atas kesepakatan kelompok. Kelompok yang jaringannya dengan lembaga desa cukup erat, juga dapat dengan efektif dalam mengkomunikasikan jadwal tanam, pertemuan petani tingkat desa, dan dalam pengendalian hama penyakit tanaman. Hubungan kelompok dengan dinas terkait dan pihak-pihak terkait lainnya, baik terkait dengan modal, sarana produksi pertanian, maupun pasar juga terjalin cukup erat. Hadirnya sarjana pendamping sedikit banyak dirasakan oleh para petani. Karena disamping aktif dan komunikatif, juga dapat membenahi administrasi kelompok, seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),

pembukuan, dan badan hukum. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian pada gapoktan Simantri, dimana hubungan komunikasi interpersonal antar petani dalam satu kelompok dengan anggota gapoktan Simantri lainnya, dan dengan tenaga pendamping serta pemerintah mempengaruhi pembentukan sikap dari petani dalam melaksanakan adopsi teknologi yang diterapkan pada program Simantri sehingga mempengaruhi kesempatan kerja yang diperoleh dalam gapoktan Simantri (Sanatana, 2018).

Dampak *Cooperative Farming* terhadap Keberdayaan Petani

Keberdayaan sebenarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu keberdayaan jangka pendek dan jangka panjang. Secara konseptual keberdayaan yang dikehendaki oleh sebuah upaya pemberdayaan (*empowerment*) adalah kedua-duanya, hanya penekanannya lebih kepada yang jangka panjang (Chambers et.al., 1993). Keberdayaan jangka pendek biasanya terwujud oleh karena adanya stimuli, misalnya bantuan dana KUT dan sebagainya. Keberdayaan jangka panjang adalah keberdayaan dalam bentuk kemauan, kemampuan, kesanggupan, kematangan, dan kesiapan masyarakat untuk mandiri, baik dalam mengembangkan, memenuhi, maupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya (Adimihardja, 1999).

Inti dari pemberdayaan adalah bahwa dalam melakukan pembangunan pedesaan dan pembangunan pertanian, pengelola program pembangunan tersebut harus mempunyai kemampuan bersikap membiarkan masyarakat tani menentukan sesuatu yang mereka kehendaki dengan cara-cara yang mereka anggap baik. Pada model pendekatan pembangunan yang demikian, manajemen

partisipatif merupakan hal penting yang harus diusung oleh kelembagaan-kelembagaan yang terjun ke pedesaan. Kelembagaan diyakini akan mempengaruhi bentuk perilaku dan pola kegiatan terorganisasi yang muncul dalam kaitan dengan pembangunan pertanian.

Model *cooperative farming* sesungguhnya berangkat dari perspektif pertanian yang bersifat melibatkan mayoritas kaum tani (egalit) sebagai subyek, yang memungkinkan akses mereka terhadap nilai tambah komoditas agribisnis di hulu dan hilir serta di pertanian primer sendiri mengalami peningkatan. Dalam sistem *cooperative farming* salah satu sumbangan yang paling penting dari petani adalah modal sosial berupa jejaring sosial yaitu kelompok tani sehamparan, disamping sumbangan modal ekonomi, modal alami, dan modal sosial lainnya. Kelompok tani merupakan wadah pengikat yang memungkinkan setiap petani memetik manfaat berupa tindakan kolektif yang menjamin ketepatan, keserempakan dan keterpaduan aplikasi teknologi dan manajemen agribisnis modern dalam usahatani. Potensi kelompok tani dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura akan memegang peranan yang sangat besar.

Pendekatan *cooperative farming* pun menghadirkan warna baru atas kelembagaan pedesaan, seperti dengan hadirnya tenaga pendamping (*community organizer*), kredit lunak, kelompok tani sehamparan, dan sebagainya (Sa'iddan Intan, 2001). Beberapa lembaga keuangan seperti BRI, BPR, Bank Mandiri, dan Bank Bukopin turut serta mengucurkan berbagai skim kredit kepada petani. Kehadiran kelembagaan keuangan formal semakin

menambah pembendaharaan kelembagaan-kelembagaan keuangan nonformal yang sudah lebih dulu eksis dalam masyarakat (Setiawan, 2008).

Beberapa dampak *cooperative farming* atas keberdayaan petani yang bersifat jangka pendek adalah: 1) Petani dapat melaksanakan dan menerapkan teknologi usaha tani secara optimal; 2) Petani dapat mengapresiasi atau menyalurkan aspirasinya, kebutuhan dan permasalahannya dalam komunikasi kelompok; 3) Posisi tawar petani meningkat, karena mampu secara partisipatif terlibat dalam pengambilan keputusan dan penentuan harga; 4) Akses petani terhadap informasi dan sumberdaya produktif lainnya meningkat, seperti terhadap informasi harga, sarana produksi pertanian, dan modal pinjaman; 5) Petani terhindar dari kecurangan-kecurangan para tengkulak, bandar, dan para penjual sarana produksi pertanian liar, karena segala sesuatu sudah disepakati dan diselesaikan melalui kelompok.

Sedangkan dampak *cooperative farming* atas keberdayaan petani dalam jangka panjang adalah pemasaran hasil dan pengelolaan hasil melalui kelompok tani. Satu hal yang dapat terjaga keberlanjutannya adalah keberdayaan ekonomi dalam bentuk agroindustri makanan ringan yang karena keterkaitannya dengan ketersediaan bahan baku di tingkat local memungkinkan untuk tetap berdiri dan dikembangkan.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa model *cooperative farming* dalam penerapannya dapat secara efektif memberdayakan petani melalui kelompok tani. Kendala keterbatasan modal dapat diatasi melalui kemitraan kerja. pencapaian target efisiensi usahatani

dapat dilakukan melalui keterpaduan kegiatan penyediaan saprodi, pola tanam yang serentak, keseragaman teknologi, pascapanen terpadu, dan pemasaran yang terorganisasi. Hak pribadi masing-masing petani atas kepemilikan lahan tidak terusik dengan tidak adanya konsolidasi lahan.

Cooperative farming secara langsung telah memberdayakan lembaga tani yang ada, yaitu kelompok tani, mengembangkan kualitas SDM melalui penyuluhan tentang pentingnya kemitraan, kesepakatan dan kebersamaan. Selain itu, jalinan kerjasama yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal dengan pihak swasta, dengan fasilitator pemerintah telah mampu mengurangi cara-cara koordinasi yang bersifat *topdown* dan sentralistik. Pemerintah memfasilitasi petani dengan pemberdayaan secara *bottomup* dan terdesentralisasi, sehingga lebih mengenai sasaran utama, yaitu mengembangkan kualitas SDM petani. Petani akan secara aktif terlibat di setiap kegiatan dan mempunyai *sense of belonging* yang tinggi akan keberhasilan usaha kelompoknya karena organisasi tersebut berasal/ beranggotakan mereka sendiri, dikelola oleh mereka sendiri, dan keberhasilannya akan diambil manfaatnya untuk mereka sendiri. Tujuan akhirnya, rantai pemasaran menjadi pendek dan lebih efisien, sehingga petani dapat memperoleh harga yang sesuai dan pendapatannya meningkat. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian pada gapoktan Simantri di Provinsi Bali, dimana petani gapoktan Simantri turut berperan aktif dalam membuka akses pasar dengan membentuk Asosiasi Simantri Bali yang mengumpulkan dan menjual produk pupuk organik hasil olahan petani anggota Simantri (Sanatana, 2018).

4.4 PEMBAHASAN

Kebijakan Korporasi Pertanian

Mengkorporasikan petani dapat dilakukan dengan peningkatan skala usaha tani, daya saing dan industrialisasi hulu ke hilir. Untuk itu perlu dianalisis dan dibuatkan kebijakan operasional terkait dengan korporasi pertanian dengan fokus sebagai berikut :

1. Mempercepat industrialisasi petani
2. Peningkatan skala usaha dan daya saing produk
3. Penguatan kelembagaan ekonomi petani dan kapasitas SDM
4. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian
5. Peningkatan kerja sama pemasaran
6. Penguatan dukungan inovasi dan teknologi
7. Peningkatan pembiayaan usaha tani
8. Digitalisasi pertanian

Persoalan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang dihadapkan pada keterbatasan dan kemampuan sumberdaya manusianya, terus diupayakan dengan berbagai fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diantaranya dengan menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada Poktan/Gapoktan/ Kelembagaan tani lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Bantuan alsintan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian yang diindikasikan dengan meningkatnya index pertanaman, meningkatkan efisiensi biaya produksi usahatani, meningkatkan hasil, kualitas dan pendapatan petani. Bantuan alsintan yang disalurkan Pemerintah sejak 5 tahun terakhir belum dimanfaatkan secara optimal, karena terbatasnya

tenaga operator yang terampil, teknisi alsintan serta terbatasnya managerial pengelolaan alsintan secara bisnis; yang berakibat pada terbatasnya kemampuan maintenance alsintan di lapangan.

Masalah kelangkaan kapital yang seringkali menjadi kendala pengembangan agribisnis memerlukan kebijakan secara lebih hati-hati. Pemberian kredit yang murah seringkali justru dapat berakibat buruk bagi perkembangan kegiatan usaha dalam jangka panjang, jika tidak diikuti dengan upaya-upaya pengendalian yang baik. Alternatif yang dinilai lebih sesuai adalah dengan mengembangkan koperasi agribisnis yang menyediakan fasilitas kredit yang mudah, yaitu kredit yang memiliki kemudahan dalam perolehannya, kesesuaian dalam jumlah, waktu serta metode peminjaman dan pengembaliannya. Disamping itu pemberian kredit tersebut perlu di atur sedemikian sehingga kemungkinan reinvestasi dan keberhasilan usaha dapat lebih terjamin. Dalam hal ini bentuk supervised credit dapat menjadi alternatif model pemberian kredit. Banyak contoh sukses koperasi kredit di bidang agribisnis yang kuat dan besar, seperti Credit Agricole di Perancis, Rabobank di Belanda, dan lain-lain.

Transformasi Kelembagaan Petani Menjadi Korporasi Petani

Mengorporasikan petani merupakan upaya untuk mengumpulkan, menyatukan dan mengonsolidasikan petani dalam pelaksanaan kegiatan bersama untuk kepentingan petani bersama. Dengan demikian, korporasi petani adalah wadah konsolidasi petani dalam melaksanakan kegiatan usaha tani. Secara teoritis, korporasi petani adalah salah satu bentuk kelembagaan petani berbasis

kebersamaan dan kemitraan. Dalam bahasa sederhana, korporasi petani ideal berdasarkan pada prinsip gotong royong. Untuk mewujudkan tujuan akhir pengembangan korporasi maka korporasi petani dapat dikembangkan melalui tiga alternatif model, yaitu:

1. korporasi petani berbasis koperasi;
2. korporasi petani berbentuk perseroan terbatas (PT); dan
3. kombinasi kedua model (model 1 dan 2) atau korporasi petani dengan keterpaduan model.

Untuk memilih model tersebut perlu dipertimbangkan aspek: Sosial, Teknis, Ekonomi dan Lingkungan. Dalam implementasinya, korporasi petani akan mengombinasikan berbagai pendekatan manajemen, yaitu:

1. manajemen sosial (menumbuhkan tindakan kolektif);
2. manajemen ekonomi (penguatan akses terhadap modal finansial dan pasar);
3. manajemen teknologi (penguatan akses terhadap teknologi unggul dan input produksi);
4. manajemen nilai tambah yang terdistribusi secara berkeadilan (melalui on farm, off farm, semi-finished products, dan/atau peningkatan mutu produk).

Pengembangan korporasi petani dilaksanakan secara terencana dan terprogram dengan sistem tata kelola yang baik untuk meningkatkan akses petani terhadap sumber daya produktif, memberi nilai tambah dan daya saing bagi produk pertanian, memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan kapasitas dan posisi tawar petani, yang bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Program pengembangan korporasi petani mencakup:

1. peningkatan kapasitas produksi;
2. pengembangan kapasitas SDM, kelembagaan, dan usaha;
3. pendampingan teknologi;
4. pengembangan industri hilir dan pemasaran;
5. pengembangan diversifikasi usaha; dan
6. pengembangan promosi usaha dan networking bisnis.

Konsep dasar korporasi petani

Korporasi petani adalah suatu satu kesatuan badan usaha yang dibentuk dari, oleh dan untuk petani. Melalui korporasi petani, asas *economic of scale* dapat diterapkan sehingga pengelolaan sumber daya dalam suatu kawasan pertanian bisa lebih optimal. Hal ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi keseluruhan rantai nilai dari hulu ke hilir; subsistem prasarana, sarana dan budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran, serta jasa pendukung dan industri penunjang dengan budidaya pertanian sebagai simpul inti.

Transformasi pertanian dari semula berdasarkan asas ekonomi konvensional menjadi berbasis ekonomi modern adalah esensial dalam membangun korporasi petani. Transformasi tersebut ditempuh melalui tiga jalan secara bersamaan, yaitu: (1) Transformasi pengembangan bisnis/usaha sehingga potensi berusaha para petani ditumbuh kembangkan dan kemudian diimplementasikan menjadi sumber pendapatan yang optimal; (2) Transformasi pengembangan kelembagaan petani sehingga peluang berusaha dapat didistribusikan, dan modal ekonomi dan modal sosial disinergikan, serta potensi

manfaat/keuntungan berusaha dapat dibagikan secara berkeadilan; dan
(3) Transformasi teknologi melalui adopsi inovasi modern.

Kendala pengembangan

Pengembangan korporasi petani mulai diintruksikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Terbatas Kabinet Kerja, 12 September 2017, namun hingga saat ini belum berjalan secara optimal di lapangan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan korporasi petani, adalah: (1) Belum adanya payung hukum korporasi petani dan nelayan melalui suatu Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata laksana, pembagian tugas dan kewenangan di tiap K/L dalam membangun korporasi petani; (2) Belum terkoordinasi dan terintegrasinya kegiatan pengembangan korporasi petani antar K/L sehingga perencanaan dan pelaksanaannya masih berjalan sendiri-sendiri dengan skema dan lokasi yang berbeda-beda; (3) Belum adanya penguatan kebijakan afirmasi untuk mendorong terbentuknya korporasi petani yang profesional; (4) Masih terbatasnya jejaring kerjasama bisnis dan akses pembiayaan untuk korporasi petani dalam menjalankan bisnisnya; (5) Masih belum memadainya prasarana dan sarana pendukung kegiatan produksi serta pengelolaan dan pemasaran hasilnya; (6) Tidak mudahnya menkonsolidasi petani karena petani terbiasa bekerja sendiri-sendiri dengan manajemen mandiri; dan (7) Masih terbatasnya kapasitas SDM petani dalam mengelola korporasi petani secara professional.

Strategi Akselerasi

Dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan korporasi petani, maka tujuan dan sasaran pengembangan korporasi petani yang tertuang dalam RPJM 2020-2024, yaitu terjadinya peningkatan produktivitas dan pendapatan petani rata-rata 5 persen per tahun tidak mudah dicapai. Karena itu, diperlukan suatu terobosan strategi, mengingat pengembangan korporasi bukan semata persoalan manajemen bisnis di tingkat mikro, namun sangat berkait dengan kebijakan di tingkat makro.

Keterpaduan formasi strategi makro-mikro yang diperlukan dalam pengembangan korporasi petani pertama dengan membuat payung hukum pengembangan korporasi petani dan nelayan melalui suatu Peraturan Presiden (Perpres), sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mempercepat pengembangan korporasi petani. Regulasi tersebut akan menjadi arah bagi pengembangan korporasi petani yang efisien, bentuk hukum, skema/sumber pembiayaan, dan keterlibatan stakeholders terkait dalam mendukung pengembangan korporasi petani.

Kedua yakni penguatan kelembagaan petani (kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan) yang dilakukan secara integratif dan konsolidatif melalui; (a) Peningkatan kapasitas SDM petani; (b) Pengembangan investasi sosial; (c) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung; (d) Peningkatan jejaring kerjasama bisnis; dan (e) Penguatan manajemen kelembagaan petani. Kelembagaan petani ini diupayakan menjadi basis utama dalam pengembangan korporasi petani.

Ketiga dengan pendampingan kepada petani, kelompok tani dan Gapoktan dalam proses awal pengembangan korporasi petani, fasilitasi bantuan sarana dan prasana, membangun tata kelola yang baik dalam sistem korporasi yang terbentuk. Hal ini sangat penting karena pengembangan korporasi petani membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga termasuk Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.

Keempat, pelibatan sektor usaha swasta serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mengintegrasikan bisnisnya dalam korporasi petani, yang sekaligus menjalankan fungsi pemberdayaan untuk kemandirian dan keberlanjutan korporasi petani. Kelima, menyempurnakan berbagai dokumen terkait dengan pengembangan korporasi petani khususnya *Grand Design*, Pedoman Umum, dan Petunjuk Pelaksanaan pengembangan korporasi petani supaya menjadi lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh para pihak yang terlibat.

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa membangun korporasi petani bukanlah pekerjaan yang mudah karena spektrum korporasi petani mencakup berbagai aspek kelembagaan, legal, permodalan, organisasi, bisnis dan kebijakan yang harus disiapkan. Korporasi petani harus dibangun secara komprehensif dengan menjalankan prinsip dan nilai korporasi petani serta melakukan perubahan dan percepatan tata kelola bisnis yang lebih modern melalui berbagai strategi yang mengedepankan upaya peningkatan daya saing, inovasi, dan kreativitas pengembangan tata kelola bisnis dengan mensinergikan keterlibatan stakeholders terkait

dalam satu pola sikap dan pola tindak pengembangan korporasi petani untuk kesejahteraan petani.

4.5 Kesimpulan

Keberadaan kelembagaan petani bagi petani sudah menjadi keniscayaan untuk memperbaiki taraf hidup, harkat dan martabatnya. Kelembagaan petani harus ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan harapan, keinginan, dan pemenuhan kebutuhan petani. Kelembagaan petani yang efektif diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kemandirian dan martabat petani. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian perlu dirancang dengan memberikan muatan (content area) pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan petani. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan, terutama pemerintah adalah: (a) Meningkatkan kapasitas para penyuluh lapangan, (b) Menggunakan cara-cara atau pendekatan partisipatif yang berorientasi pada kebutuhan petani dalam melakukan kegiatan penyuluhan, dan (c) Memperkuat kelembagaan penyuluhan.

Memodernisasi pertanian Indonesia dengan mengoptimalkan pemanfaatan bantuan alsintan dengan orientasi keberlanjutan usaha tani bermekanisasi dengan Misi:

1. Mengurangi Biaya usaha tani.
2. Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan Keuntungan Hasil Produksi

3. Meningkatkan Pemanfaatan alsintan dalam mempercepat modernisasi pertanian
4. Mendorong minat kaum milenial dalam pengelolaan pertanian korporasi berbasis mekanisasi.
5. Kesejahteraan petani di pedesaan.

Menyusun model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi dapat dilakukan dengan beberapa opsi dengan melakukan studi pada daerah lain di Indonesia. Kegiatan Sosialisasi, ataupun Pendampingan kegiatan percontohan model dilakukan dengan menggunakan Konsep Pentahelix, yakni sebuah konsep yang Kolaborasi kerjasama antar lini/bidang Pemerintah, Universitas, Investor, Media dan Petani, dengan sasaran :

1. Terlaksananya kegiatan percontohan model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi
2. Pengembangan model standar manajemen organisasi untuk terlaksananya pertanian korporasi di daerah lainnya,
3. Terwujudnya pertanian korporasi yang modern/digital farming dalam peningkatan produksi pertanian yang lebih efisien dan efektif.

BAB V

ISU PERENCANAAN APSEK PENDIDIKAN

5.1 Latar Belakang

Wabah corona virus memberikan dampak pada sektor penting di seluruh negara yang terdampak virus corona, salah satunya adalah pada sektor pendidikan. Penyebaran Covid-19 di seluruh dunia sejak akhir tahun 2019 menyebabkan pembelajaran tatap muka dihentikan sementara di banyak negara.

Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 tidak secara otomatis menghentikan pembelajaran tatap muka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat surat edaran Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 Pada Satuan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2020. Sistem pembelajaran masih dilaksanakan secara tatap muka di Indonesia termasuk di perguruan tinggi. Pada tanggal 16 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru mengeluarkan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dirjen Dikti mulai mengarahkan untuk melakukan sistem pembelajaran berbasis online.

Pendidikan merupakan pemberian informasi kepada anak didik di mana berdasarkan pengamatan dan kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan dan terobosan teknologi informasi akan terus berlanjut ke depan. Oleh karena itu, tidak sulit untuk memperkirakan bahwa salah satu ujian bagi kemahiran dan keandalan manajemen di masa depan adalah kemampuannya memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut.

Pembelajaran teknologi informasi memang sudah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, pembelajaran daring yang berlangsung sebagai kejutan dari pandemi COVID-19, membuat kaget hampir di semua lini, dari kabupaten/kota, provinsi, pusat bahkan dunia internasional.

Di Indonesia sendiri, selain Universitas Terbuka, terdapat 6 universitas lain yang menerapkan pembelajaran daring diantaranya Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada, Universitas Teknologi Surabaya, Universitas Binus, dan AMIKOM Yogyakarta (Kompas 2015).

Namun kali ini, pembelajaran daring dilakukan sebagai bentuk upaya merespons edaran dari Kemendikbud untuk membuat belajar dari rumah lebih fleksibel. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mengimbau agar perguruan tinggi dengan otonomi yang dimilikinya dapat memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa darurat COVID-19.

Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022), jumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2021 berjumlah 3.115 perguruan tinggi. Sementara itu jumlah dosen sebanyak 265.452 orang dengan jumlah mahasiswa sebanyak 7.665.516 orang. Dosen dan mahasiswa tersebut belum semuanya menguasai sistem pembelajaran berbasis online baik menggunakan *e-learning*, *zoom*, *google meet*, *google class* dan platform pembelajaran online lainnya.

Dengan belajar daring tentunya mahasiswa dan dosen juga dituntut untuk lebih lihai dalam penggunaan teknologi dimasa sekarang

ini. Belajar daring merupakan belajar yang menggunakan jaringan internet.

Selama pandemi ini masih berlangsung, sistem pembelajaran daring ini tentu saja tidak akan ditinggalkan. Begitu juga pada saat pasca pandemi, adanya indikator penilaian pada borang akreditasi yang menuntut perguruan tinggi untuk bisa mengimplementasikan sistem pembelajaran online ataupun hybrid maka pembelajaran daring ini akan tetap digunakan. Agar dapat merencanakan sistem pembelajaran daring yang efektif dan dapat memberikan kepuasan baik bagi dosen maupun mahasiswa, maka diperlukan formulasi strategi yang tepat untuk bisa diterapkan baik di masa pandemi maupun pasca pandemic covid-19 ini.

Pembelajaran jarak jauh berbasis online yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini dianggap kurang efektif, karena terjadi berbagai masalah yang ditimbulkan dengan adanya keterbatasan seperti sarana-prasarana, orang tua yang mengalami kesulitan dalam memantau kegiatan belajar jarak jauh sang anak serta kurang memahami materi pelajaran anak, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas pendidikan yang cenderung menurun. Meningkatkan kualitas pendidikan pada masa pandemi Covid-19 menjadi hal yang sangat penting.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam tulisan ini ada beberapa rumusan masalah yang dikemukakan:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan/kelebihan dari penerapan sistem pembelajaran daring?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kelemahan dari penerapan sistem pembelajaran daring?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi peluang dari penerapan sistem

pembelajaran daring?

4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi tantangan dari penerapan sistem pembelajaran daring?

5.2 Landasan Teori

5.2.1 Definisi Perencanaan

Ada beberapa pendapat para ahli terkait definisi perencanaan yang penulis angkat dalam makalah ini. Menurut Louise E. Boone dan David L. Kurtz (1984) bahwa: *planning may be defined as the proses by which manager set objective, asses the future, and develop course of action designed to accomplish these objective*. Maksudnya adalah bahwa seorang pimpinan membuat tujuan yang harus dicapai, pengembangan dan melakukan sesuatu yang telah disusun sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu, T. Hani Handoko (1995) mengemukakan bahwa : “ Perencanaan (*planning*) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.”

Plato mengatakan bahwa *Planing is The beginning is the most important part of the work*. Perencanaan merupakan awalan dari setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Abdulrachman (1973), mendefinisikan perencanaan sebagai pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (*estimate*) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian. Siagian (1994), mengartikan perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan

penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.

Pendapat dari para ahli lainnya seperti Terry (1975), perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Sedangkan Hadari Nawawi (1983) menyatakan bahwa perencanaan merupakan langkah menyusun penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Garth N. Jone menyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses. Proses pemilihan dan pengembangan dari suatu tindakan yang paling baik atau menguntungkan untuk mencapai tujuan tertentu. Mc. Farland menyatakan bahwa perencanaan sebagai suatu fungsi manajemen. Seorang pimpinan dapat mempengaruhi bawahannya untuk melakukan perubahan terhadap tujuan yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Terakhir pendapat dari W.H. Newman bahwa perencanaan adalah keputusan yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang atau rencana yang diproyeksikan dalam suatu tindakan.

Beberapa pendapat di atas telah memberikan definisi perencanaan menurut sudut pandang yang berbeda. Hal tersebut dapat membuat suatu kesimpulan bahwa perencanaan tidak terlepas dari suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai, sehingga perencanaan merupakan suatu proses penentuan tujuan yang diharapkan dengan cara-cara konkrit untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan tersebut.

5.2.2 Definisi Pendidikan

Beberapa definisi pendidikan menurut beberapa ahli yang dimasukkan dalam makalah ini diantaranya oleh John Dewey, yang mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman. Hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok dimana dia hidup.

Edgar Dalle menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Sementara Ki Hajar Dewantara menyatakan “Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.”

M.J. Longeveled berpendapat bahwa pendidikan merupakan usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Sementara Richey dalam bukunya *‘Planning for teaching, an Introduction to Education’* menjelaskan Istilah ‘Pendidikan’ berkenaan

dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat terutama membawa warga masyarakat yang baru (generasi baru) bagi penuaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

Ibnu Muqaffa (salah seorang tokoh bangsa Arab yang hidup tahun 106 H-143 H, pengarang Kitab Kalilah dan Daminah) mengatakan bahwa : “Pendidikan itu ialah yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita seperti makanan dan minuman, dengan yang lebih kita butuhkan untuk mencapai peradaban yang tinggi yang merupakan santaan akal dan rohani.” Sedangkan Soekidjo Notoatmodjo (2003) berpendapat, pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Adapun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2002) menyatakan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. UU RI No. 20 Tahun 2003 (tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1), Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan Elisa dkk (2001) menyatakan bahwa pendidikan luas dikenal di masyarakat adalah pendidikan dalam arti formal, yaitu pendidikan yang diterima

oleh peserta didik melalui pendidik dan biasanya dilakukan pada suatu lembaga atau institusi.

Secara keseluruhan pengertian pendidikan yang diberikan oleh para ahli mengacu pada sebuah usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk dapat mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan, baik dari pendidikan formal, nonformal maupun pendidikan informal.

5.2.3 Definisi Perencanaan Pendidikan

Definisi Perencanaan Pendidikan menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Depdiknas (2006) mendefinisikan perencanaan pendidikan sebagai suatu proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan/tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada definisi tersebut dinyatakan bahwa perencanaan ditujukan untuk merubah masa depan. Masa depan pendidikan yang diinginkan adalah pendidikan berkualitas yang disiasati secara terstruktur dan terprogram melalui perencanaan sejak awal sehingga masa depan bukanlah hasil dari kebetulan semata.
- b. Coombs (1982), perencanaan pendidikan merupakan kegiatan rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien.
- c. Albert Waterston (1975), perencanaan pendidikan merupakan suatu bentuk investasi pendidikan yang dapat dijalankan dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang didasarkan kepada pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial.
- d. Guruge (1972) perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan.

- e. Beeby, C.E., perencanaan pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas, dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi system pendidikan nasional memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh system tersebut.
- f. Y. Dror (1975), perencanaan pendidikan adalah suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan social secara menyeluruh dari suatu negara.
- g. Yusuf Enoch, perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya serta menyeluruh suatu Negara.
- h. Endang Sunarya, (2000) perencanaan pendidikan merupakan proses perumusan kebijakan dan instrumen sekaligus juga teknik penentuan prioritas, dan merupakan bagian yang terintegrasi dengan pembangunan secara nasional sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan secara nasional.
- i. Engkoswaran dan Komariah (2010) perencanaan pendidikan ialah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, teknik/metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan

tindakan yang telah disusun sehingga pelaksanaannya dapat secara efektif dan efisien.

- j. Don Adam (1975), merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara.

Pengertian yang diberikan oleh ahli memang memiliki redaksi yang berbeda, akan tetapi substansi dari pengertian tersebut memiliki kesamaan yaitu perencanaan pendidikan merupakan sebuah proses untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai, dan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

5.3 Penelitian Terdahulu

1. Platform Pendidikan Online

Banyak ahli dan sarjana termasuk (Andersen, 2007) dan (Sultan, 2010) dan lain-lain dari berbagai negara telah melakukan penelitian tentang pendidikan online dengan perkembangan yang pesat pendidikan online. Beberapa studi khas adalah sebagai berikut: (Chan et al., 2015) menggambarkan teknik baru yang menggabungkan metode berbasis Internet dan cloud untuk secara digital menambah kelompok studi klasik yang digunakan oleh penduduk tahun terakhir yang belajar untuk pemeriksaan *Royal College of Physicians and Surgeons of Canada*. (Gofine & Clark, 2017) mengujicobakan integrasi Slack ke dalam tim peneliti mereka dari satu anggota fakultas, satu koordinator penelitian, dan sekitar 20 asisten peneliti. Statistik yang menggambarkan penggunaan aplikasi dihitung dua belas bulan setelah implementasinya dan hasilnya menunjukkan penggunaan berat oleh para profesional

penelitian dan asisten disajikan. (Thor et al., 2017) meneliti dampak format online pada kualitas diskusi dan hasil survei menunjukkan bahwa siswa lebih suka menggunakan *Voice Thread* untuk menyajikan, belajar dari presentasi lain, dan mendiskusikan konten presentasi dengan melakukan proses ini di kelas. (J Botelho, V Machado, L Proença, 2019) menilai kegunaan, kemudahan penggunaan, kemudahan belajar dan kepuasan dari catatan praktik perkembangan klinis berbasis cloud bila dibandingkan dengan catatan praktik kertas tradisional. Hasilnya menunjukkan bahwa buku klinis digital, menggunakan alat kolaborasi berbasis cloud gratis, lebih berguna, lebih mudah digunakan dan dipelajari serta lebih memuaskan daripada sistem perekaman kertas tradisional. (Chapman et al., 2016). mengusulkan empat dimensi penting dari cakupan, partisipasi, kualitas dan prestasi siswa, dan membangun kualitas kursus online terbuka (MOOC) besar-besaran kerangka penilaian, membantu organisasi MOOC membuat serangkaian langkah untuk memantau dan meningkatkan. (Hrastinski, 2009) mengajukan teori dalam penelitiannya: jika kita ingin meningkatkan pembelajaran online, kita perlu meningkatkan partisipasi pelajar online. (Miri, Barak & Gizell, 2020) menunjukkan dalam penelitian mereka perlunya memikirkan kembali cara kursus etika online konvensional dikembangkan dan disampaikan; Mendorong siswa untuk membangun kepercayaan diri dalam belajar dari jarak jauh, melibatkan mereka dalam pengalaman aktif dan interaktif online. (Andersen, 2007) menunjukkan bahwa profesional kesehatan dapat berbagi keahlian mereka melalui pendidikan online dan memasukkan pengajaran ini ke dalam pembelajaran tahunan mereka. (Kianmehr & Kamali, 2015) menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap

pendidikan online semakin meningkat, sementara minat lembaga pendidikan dalam pendidikan online menurun. Mereka memegang pandangan bahwa untuk mengubah efek negatif dari pendidikan online, perlu untuk memberikan siswa dengan setelan jas. (Roca et al., 2006) menganalisis kepuasan belajar online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan belajar online pengguna terutama ditentukan oleh persepsi pengguna tentang kegunaan dan kualitas kursus, kualitas platform dan layanan situs web serta tingkat pencapaian yang diharapkan. (Wang, 2012) percaya bahwa kepuasan siswa akan dipengaruhi oleh di erence teknologi, karakteristik guru, siswa dan kursus. (Panchenko, 2013) berpandangan bahwa mode pengajaran MOOC dapat mengembangkan karir guru, meningkatkan keterampilan mengajar, dan memungkinkan guru untuk mempertimbangkan dan memeriksa kegiatan mengajar mereka dari lebih banyak perspektif. (Kravvaris et al., 2016) menyatakan bahwa jejaring sosial berkontribusi pada pengembangan MOOC.

Menurut hasil penelitian di atas, banyak peneliti mempelajari pendidikan online dan menetapkan banyak model evaluasi. Namun, dalam proses pelaksanaan pendidikan online selama pandemi Covid-19 ini, banyak masalah baru muncul dalam bentuk baru pendidikan online. Hal ini mengharuskan faktor-faktor baru kepuasan pengguna penting diperhitungkan dalam penelitian ini. Berdasarkan hal ini, penelitian ini mengumpulkan data komentar pengguna online untuk mendapatkan faktor-faktor baru kepuasan pengguna yang penting dan menetapkan sistem evaluasi yang dapat lebih mencerminkan kepuasan platform pendidikan online selama pandemi Covid-19.

5.4 Pembahasan

Konsep perencanaan pendidikan ini bersumber dari literatur perencanaan pendidikan oleh Udin Syaifudin dan Abin Syamsudin. Dari hasil data yang telah dikumpulkan dengan observasi pada media sosial, media online, media cetak yang memberikan info mengenai penurunan kualitas pendidikan yang disebabkan oleh pandemi maka perencanaan pendidikan yang dilakukan :

1) Perencanaan

a) Diagnosis

Pada tahap diagnosis ini, perencana membuat rumusan masalah sesuai kebutuhan yang terjadi di masyarakat mengenai kebutuhan pendidikan, dari mulai sebab penurunan kualitas pendidikan hingga kebutuhan lain yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan setelah pandemi.

b) Perumusan Kebijaksanaan

Setelah melakukan diagnosis, maka langkah selanjutnya adalah mencetuskan poin-poin strategi yang akan digunakan sebagai solusi permasalahan yang ada.

c) Perkiraan Kebutuhan

Perencana juga sebaiknya memperhitungkan kebutuhan yang akan dilakukan pada masa pasca pandemi, hal ini penting dilakukan dalam perencanaan sebagai tolok ukur kebutuhan biaya dan lain-lain.

d) Pembiayaan

Alokasi dana juga menjadi salah satu tahapan yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh perencana, mengingat

anggaran dana pasti terbatas pada masa pasca pandemi karena kondisi yang mungkin belum sepenuhnya stabil.

e) Penentuan Prioritas

Penentuan prioritas ini dapat disimpulkan melalui diagnosis masalah yang telah dilakukan, dari berbagai masalah yang ada di lapangan perencana melakukan klasifikasi masalah sehingga kebutuhan yang prioritasnya lebih tinggi dapat dilakukan terlebih dahulu.

2) Tahap Perumusan Rencana

Pada tahap perumusan rencana ini, semua poin-poin yang ada di tahap perencanaan akan lebih dikerucutkan, sehingga solusi yang ditawarkan dapat onpoint. Pada tahap ini juga solusi yang diberikan juga seharusnya sudah menjadi bentuk program pelaksanaan yang akan diimplementasikan.

3) Tahap Implementasi Rencana

Proses ini merupakan pelaksanaan dari perumusan rencana yang telah disepakati.

4) Tahap Revisi dan Perencanaan Kembali

Pada proses pelaksanaannya tentunya akan dinilai dari proses dan hasilnya, sehingga penilaian tersebut dapat menjadi tolok ukur keberhasilan perencanaan yang dilakukan. Apabila dinilai kurang memuaskan maka akan dilakukan perencanaan kembali sehingga kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan di masa pasca Pandemi Covid-19 dapat teratasi.

Hasil identifikasi terhadap kelebihan, kekurangan, peluang dan tantangan dari sistem pembelajaran online adalah sebagai berikut:

A. Kelebihan sistem pembelajaran online

Berdasarkan hasil diagnosis/identifikasi penulis, ada beberapa kelebihan dari sistem pembelajaran online atau daring ini, yaitu:

1. Melatih kemandirian.

Pembelajaran daring ini dapat melatih kemandirian mahasiswa. Dengan belajar daring disini mahasiswa tidak bertemu tentunya dengan dosen mereka, dalam hal ini mahasiswa dituntut agar lebih mandiri belajar tanpa adanya pengawasan dari seorang dosen. Disini mahasiswa belajar dalam melakukan sebuah riset secara mandiri yang dilakukan melalui media internet atau sumber lain.

2. Terlatih menggunakan teknologi informasin.

Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi terus berkembang. Dengan pembelajaran ini mahasiswa dapat lebih menguasai dan juga mengenal aplikasi yang terdapat dalam pembelajaran daring tentunya.

3. Menambah wawasan.

Pembelajaran daring dapat menambah wawasan seorang mahasiswa. Mengapa demikian? Karena dengan pembelajaran daring mahasiswa dapat mencari segala sesuatunya tentang pelajaran melalui media internet dan juga sumber lainnya yang bisa kita ketahui bahwa hal ini sangat banyak refrensi yang ada di internet.

4. Waktu dan tempat yang fleksibel.

Mahasiswa dapat melakukan proses pembelajaran dimana saja dan kapan saja, dengan yang paling penting adalah terhubung dengan koneksi internet. Sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran daring sesuai waktu yang disepakati oleh dosen.

5. Biaya relatif lebih murah dan tentunya dapat diakses dengan mudah.

Pembelajaran daring tentunya menjadi lebih murah dari pembelajaran tatap muka bagi mahasiswa yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari kampus. Karena dengan pembelajaran daring mereka hanya harus memikirkan kuota internet saja, tidak memikirkan kos-kosan, uang makan dan sebagainya. Akses pembelajaran daring dapat diakses dengan mudah hanya menggunakan Hp, laptop ataupun komputer saja.

B. Kekurangan/Kelemahan sistem pembelajaran online

Tentunya dibalik kelebihan pastinya akan ada kekurangan yang dimiliki dalam pembelajaran daring, yaitu :

1. Kurangnya interaksi antara mahasiswa dan dosen.

Pembelajaran daring membuat mahasiswa dan dosen tidak pernah bertemu, hal ini membuat kurangnya interaksi terhadap mahasiswa dan dosen. Terlebih lagi pengawasan dari seorang dosen yang berkurang, dikarenakan pembelajaran yang tidak bertemu karena jarak.

2. Fokus mahasiswa yang terganggu.

Dengan pembelajaran daring mahasiswa kebanyakan mengalami fokus yang terganggu, biasanya seperti keadaan rumah yang berisik, mahasiswa yang chatting dengan mahasiswa yang lainnya ketika dosen sedang menjelaskan karena tidak diawasi secara langsung dan sebagainya.

3. Jaringan yang tidak stabil.

Belajar daring tentunya berkaitan dengan jaringan, dimana dengan jaringan yang tidak stabil akan membuat mahasiswa ataupun dosen mengikuti proses pembelajaran daring. Bagi mahasiswa ataupun

dosen yang rumahnya tidak memiliki infrastruktur jaringan sering sekali mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring ini.

4. Kurangnya pemahaman terhadap materi.

Pembelajaran daring membuat mahasiswa kurang mengerti terhadap materi yang disampaikan. Dengan belajar daring, maka mahasiswa tidak dapat bertanya kepada dosen tentang materi yang tidak dapat mereka kuasai secara langsung. Mungkin mahasiswa bisa bertanya, tetapi sangat sulit untuk memahami materi apabila tidak dijelaskan secara langsung. Begitupun seorang dosen yang kesulitan mengetahui apakah mahasiswanya paham atau tidak.

5. Dosen kesulitan memberikan penilaian.

Ketika belajar daring, dosen sangat sulit dalam menilai perilaku, sikap, kedisiplinan seorang mahasiswa dikarenakan tidak dapat bertemu secara langsung dan melihat secara langsung bagaimana seorang mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada.

C. Tantangan Sistem Pembelajaran Online

Persebaran virus Corona yang massif di berbagai negara, memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik hingga pendidikan di tengah krisis akibat Covid-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Sampai 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya 1,5 milyar anak usia sekolah yang terdampak Covid 19 di 188 negara termasuk 60 jutaan diantaranya ada di negara kita.

Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya: (1) ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah, (2) keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran, (3) keterbatasan sumberdaya untuk pemanfaatan teknologi Pendidikan seperti internet dan kuota, (4) relasi guru-murid-orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral.

Sebagai ujung tombak di level paling bawah suatu lembaga pendidikan, Rektor dituntut untuk membuat keputusan cepat dalam merespon surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharuskan perguruan tinggi untuk memberlakukan pembelajaran dari rumah. Pendidik merasa kaget karena harus mengubah sistem, silabus dan proses belajar secara cepat. Mahasiswa terbata-bata karena mendapat tumpukan tugas selama belajar dari rumah.

Jadi, kendala-kendala itu menjadi catatan penting dari dunia pendidikan kita yang harus mengejar pembelajaran daring secara cepat. Padahal, secara teknis dan sistem belum semuanya siap. Selama ini pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknis, belum sebagai cara berpikir, sebagai paradigma pembelajaran. Padahal, pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital, bukan pula membebani mahasiswa dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Pembelajaran secara online harusnya mendorong mahasiswa menjadi kreatif mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, mengasah wawasan dan ujungnya membentuk mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat.

D. Kesempatan/Peluang Sistem Pembelajaran Online

Dari tantangan-tantangan di atas, kita harus berani melangkah untuk menjadikan pembelajaran online sebagai kesempatan mentransformasi pendidikan kita. Ada beberapa langkah yang dapat menjadi renungan bersama dalam perbaikan sistem pendidikan kita khususnya terkait pembelajaran daring: Pertama, semua guru atau dosen harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene harus menggunakan teknologi. Peningkatan kompetensi pendidik di semua jenjang untuk menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh mutlak dilakukan. Memang jumlahnya sangat banyak, untuk memastikan sekitar 3 jutaan guru dan 265.452 dosen di Indonesia memiliki kompetensi yang memadai dalam memanfaatkan teknologi tentu bukan perkara mudah. Kompetensi minimal TIK guru/dosen level 2 harus segera diwujudkan termasuk kemampuan melakukan *vicon (video conference)* dan membuat bahan ajar online. Level 2 ini merupakan pengelompokan kompetensi TIK guru/dosen yang ideal berdasarkan *Teacher ICT Competencies Framework* oleh UNESCO. Level tertinggi adalah level 4 dimana guru/dosen sudah mampu menjadi trainer bagi guru/dosen yang lain. Jika kompetensi guru/dosen sudah level 2, maka guru/dosen akan mampu menyiapkan sistem belajar, silabus dan metode pembelajaran dengan pola belajar digital atau online.

Pemerintah tidak harus sendiri, upaya menggandeng banyak pihak penyedia portal daring sangat tepat dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun leading sektor urusan kebijakan pembelajaran daring harus dikendalikan di bawah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, pemakaian teknologi pun juga tidak asal-asalan, ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat mewujudkan tujuan Pendidikan yakni teknologi Pendidikan (TP). Pembelajaran online tidak hanya memindah proses tatap muka menggunakan aplikasi digital, dengan disertai tugas-tugas yang menumpuk. Ilmu teknologi pendidikan mendesain sistem agar pembelajaran online menjadi efektif, dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan secara khusus.

Prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi yang harus menjadi acuan guru/dosen dalam memanfaatkan teknologi yaitu mampu menghadirkan fakta yang sulit dan langka ke dalam kelas, memberikan ilustrasi fenomena alam dan ilmu pengetahuan, memberikan ruang gerak siswa untuk bereksplorasi, memudahkan interaksi dan kolaborasi antara siswa-guru dan siswa-siswa, serta menyediakan layanan secara individu tanpa henti. Namun sangat sedikit guru/dosen yang memahami prinsip-prinsip di atas. Hal ini menuntut stakeholder terkait utamanya para Pengembang Teknologi Pembelajaran harus lebih banyak berinovasi dan mencari terobosan pembelajaran di masa darurat seperti Covid-19 saat ini.

Ketiga, pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran meskipun hanya sebagai komplemen. Intinya supaya guru/dosen membiasakan mengajar online. Pemberlakuan sistem belajar online yang mendadak membuat sebagian besar pendidik kaget. Ke depan, harus ada kebijakan perubahan sistem untuk pemberlakuan pembelajaran online dalam setiap mata pelajaran. Guru/dosen harus sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai kapasitas dan ketersediaan teknologi. Inisiatif kementerian

menyiapkan portal pembelajaran daring Rumah Belajar patut didukung meskipun urusan daring saat covid 19 yang memaksa siswa dan guru menjalankan aktifitas di rumah tetap perlu dukungan penyedia layanan daring yang ada di Indonesia.

Empat, guru maupun dosen harus punya perlengkapan pembelajaran online. Peralatan TIK minimal yg harus dimiliki guru/dosen adalah laptop dan alat pendukung *video conference*. Keberadaan perangkat minimal yang harus dimiliki guru/dosen sangat perlu dipikirkan bersama baik pemerintah kab/kota, provinsi dan pusat termasuk ortang tua untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sudah banyak *fintech* yang bergerak di bidang pemberian bantuan pengadaan perangkat teknologi baik untuk siswa, guru maupun sekolah.

Kelima, ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijawab dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang kekurangan. Akses internet harus diperluas dan kapasitas bandwidthnya juga harus ditingkatkan. Pemerintah Indonesia sudah berhasil membangun infrastruktur komunikasi Palapa Ring yang diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2019 menjadi tulang punggung infrastruktur digital dari Aceh hingga Papua. Tapi, jangkauan akses harus diperluas agar sebanyak mungkin sekolah, pendidik dan siswa merasakan manfaatnya.

5.5 Kesimpulan

Penurunan kualitas pendidikan pada masa pandemi Covid-19 memang tidak dapat dihindari, hal ini dikarenakan dampak dari pandemi yang memberikan dampak yang signifikan terhadap

penurunan kualitas dan mutu pada kebutuhan Negara termasuk pendidikan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kegiatan perencanaan pendidikan setelah masa pandemi, sebagai salah satu upaya dalam mengejar penurunan mutu dan kualitas pendidikan pada masa pandemi.

Adapun proses perencanaan pembelajaran pasca pandemi covid-19 dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan perencanaan seperti diagnosa masalah, kemudian penyusunan rencana, implementasi rencana dan revisi perencanaan. Sedangkan perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Universitas Lambung Mangkurat sendiri melakukan perencanaan dari aspek administrasi pendidikan, sarana dan prasarana, juga pada aspek perencanaan pembelajaran guna meningkatkan mutu dan kualitas proses dan hasil pendidikan pasca pandemi covid-19.

Pandemi Covid-19 memang menjadi efek kejut bagi kita semua. Dunia seolah melambat dan bahkan terhenti sejenak. Negara-negara besar dan modern terpukul dengan sebaran Virus Corona yang cepat, mengakibatkan ribuan korban meninggal yang tersebar di berbagai negara. Indonesia mendapatkan banyak tantangan dari Covid-19 ini, yang membuat kita semua harus bersama-sama saling menjaga.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan oleh semua guru. Kita memasuki era baru untuk membangun kreatifitas, mengasah skill siswa, dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang dan pola interaksi kita dengan teknologi.

BAB VI

ISU PERENCANAAN ASPEK KESEHATAN

6.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kesehatan mengamanahkan bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Program Unit Eselon I.

Indonesia mengalami beban ganda, di satu sisi PTM naik dengan signifikan, namun masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas. Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko biologi, kimia,

terorisme, radio-nuklir, penyakit zoonosis (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (new emerging diseases). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (new emerging diseases), khususnya dalam Rencana Aksi Program P2P 2020-2024 menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru adalah penyakit zoonosis, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya. Penduduk Indonesia yang padat dengan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru.

Dilihat dari beban penyakit (diseases burden) yang diukur dengan Disability Adjusted Life Years (DALYs), telah terjadi transisi epidemiologi dalam tiga dekade terakhir; penyakit menular/P2P/gizi telah menurun dari 51,3% pada tahun 1990 menjadi 23,6% pada tahun 2017, penyakit tidak menular (PTM) naik dari 39,8% pada tahun 1990 menjadi 69,9% pada tahun 2017, serta cedera turun dari 8,9% pada tahun 1990 menjadi 6,5% pada tahun 2017. Indonesia mengalami beban ganda, di satu sisi PTM naik dengan signifikan, namun masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas.

Penyakit tidak menular (NCD) terdiri dari kondisi kronis, seperti penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan kronis, kanker, diabetes dan kesehatan mental. Pada tahun 2018, NCD bertanggung jawab atas 71% dari semua kematian di seluruh dunia, lebih dari kombinasi penyakit ibu, infeksi, perinatal dan terkait nutrisi (Bennett et al., 2018)

(WHO, 2018) dengan beban yang secara tidak proporsional jatuh pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. (Perk, 2017). Selain itu, biaya NCD sangat besar dan kemungkinan akan tumbuh setiap tahun dengan populasi yang semakin menua, teknologi kesehatan yang mahal dan meningkatnya paparan faktor risiko. Diperkirakan bahwa, tanpa tindakan, NCD akan menyebabkan 52 juta kematian setiap tahun dan diperkirakan US \$ 47 triliun akan hilang pada tahun 2031 (Hulse et al., 2021).

Kematian NCD lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan, setidaknya di negara-negara berpenghasilan tinggi, pada orang dengan status sosial-ekonomi yang lebih rendah, 1-2 membuat NCD menjadi hambatan penting untuk mengurangi ketidaksetaraan kesehatan global dan nasional (Ezzati et al., 2018) Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyebab utama kematian global dan kesehatan yang buruk, berkontribusi terhadap lebih dari 73% dari semua penyebab kematian global setiap tahun (WHO, 2018). Setiap tahun, 15 juta orang antara usia 30 dan 69 meninggal sebelum waktunya karena PTM, dengan lebih dari 85% dari kematian ini terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2018).

Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) dan faktor risikonya di Indonesia, terus mengalami peningkatan, (Kemenkes RI, 2018). Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi Penyakit Tidak Menular mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013, antara lain kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi. Prevalensi kanker naik dari 1,4 permil (Riskesdas 2013) menjadi 1,8 permil; prevalensi stroke naik dari 7 permil menjadi 10,9 permil; dan penyakit ginjal kronik naik dari 2 permil menjadi 3,8

permil. Berdasarkan pemeriksaan gula darah, diabetes melitus naik dari 6,9% menjadi 8,5%; dan hasil pengukuran tekanan darah, hipertensi naik dari 25,8% menjadi 34,1%. Kenaikan prevalensi penyakit tidak menular ini berhubungan dengan pola hidup, antara lain merokok, konsumsi minuman beralkohol, aktivitas fisik, serta konsumsi buah dan sayur.

Prevalensi PTM di Provinsi Kalimantan selatan cenderung meningkat dari tahun 2007 s.d. 2013 berdasarkan hasil Riskesdas 2013 antara lain: diabetes melitus (DM), stroke, prevalensi kanker 2,0 per mil di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan terbanyak keempat di Indonesia. Perilaku hidup bersih dan sehat masih rendah di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain terlihat dari banyak masyarakat yang merokok pada tahun 2013 yakni sebanyak 37% dari jumlah penduduk (Kemenkes RI, 2013)

Berdasarkan penelitian Women Research Institute (WRI) pada tahun 2008 di lima wilayah yang meliputi Mataram (Lombok), Surakarta (Jawa Tengah), Kupang (Timor Barat), Subang (Jawa Timur), dan Jembrana (Bali) data terkait alokasi anggaran untuk layanan kesehatan di lima wilayah menunjukkan bahwa kurang dari 9% atau hanya sekitar 5.8-8.9% dari total APBD yang dialokasikan untuk layanan kesehatan. Menurut MDGs, pengeluaran untuk kesehatan yang ideal adalah Rp. 120.000,00 per kapita. Sedangkan pada kenyataannya, pengeluaran kesehatan di sebagian besar wilayah di Indonesia adalah Rp. 40.000,00 per kapita. Hanya Jembrana saja yang telah mampu memenuhi kriteria ideal MDGs yaitu dengan mengalokasikan Rp151.000,00 per kapita. Sementara itu, Indramayu yang memiliki tingkat kematian ibu sebesar 281/100.000 hanya

mengalokasikan Rp41.000,00 per kapita. Data terkait alokasi anggaran untuk layanan kesehatan bagi perempuan untuk tahun 2007 menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan hanya sebesar 2% saja atau antara 0-1.76%.

Hasil penelitian Fitra tahun 2010 dalam Laksmiarti dkk., (2013) tentang APBD di 41 kabupaten/kota menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk kesehatan dalam anggaran daerah sangat minim. Hanya 12 dari 41 kabupaten/kota yang diteliti mengalokasikan 10-16% anggaran APBD untuk kesehatan, sementara sisanya hanya mengalokasikan kurang dari 10%. Dari 34 kabupaten/kota yang dianalisis, 32 diantaranya memiliki belanja program P2P per kapita kurang dari Rp46.000,00 sementara hasil penelitian lain menetapkan standar kelayakan program P2P setidaknya sebesar Rp65.000,00 per kapita.

Penelitian Vincente, et al., (2013) menjelaskan bahwa keberhasilan program P2P di Philipina sangat didukung oleh proporsi anggaran yang disediakan dengan program kesehatan lainnya. Pendekatan perencanaan berbasis bukti dan alokasi anggaran secara proporsional dapat menurunkan permasalahan P2P di Philipina. Pendekatan analisa perencanaan berbasis bukti adalah dengan mengidentifikasi data dan informasi yang objektif tentang keadaan kesehatan ibu dan anak di semua wilayah seperti data proporsi jumlah fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk, dan jumlah kemampuan ekonomi daerah.

Penelitian Faulia, dkk., (2009) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menemukan bahwa porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selama kurun waktu 2007-2008 cenderung menurun dari 0,7% menjadi

0,6%, dan di tahun 2009 menurun menjadi 0,4% dari alokasi belanja langsung, dan dari sejumlah anggaran tersebut salah satu alokasi anggaran terendah justru pada kegiatan dan upaya penurunan kasus kematian ibu dan anak. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk program P2P cenderung lebih didukung oleh sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti dana dekonsentrasi dan dana bersumber dari bantuan lembaga donor seperti *United Nation International Children's Emergency Fund (UNICEF)* dan *United States Agency for International Development (USAID)*.

Penelitian Iswarno, dkk., (2013), menunjukkan bahwa komitmen pemerintah di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu terhadap program P2P masih rendah. Hal ini terbukti dengan minimnya alokasi anggaran program P2P pada tahun 2008 yang hanya 2 % dari total anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. Penelitian Erpan, dkk., (2012) di Kabupaten Lombok Tengah, mendeskripsikan bahwa alokasi anggaran program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2010 sebesar 4,2% dari belanja langsung Dinas Kesehatan, dan dari sejumlah anggaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tersebut 81,9% diperuntukkan untuk jaminan persalinan gratis, namun pada tahun 2011 menurun drastis menjadi 0,8% dari belanja langsung Dinas Kesehatan, hal ini disebabkan adanya sharing dana dari APBN berupa program Jampersal.

Kondisi disparitas proporsi anggaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit juga terjadi di Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian Dodo, dkk., (2012), bahwa alokasi anggaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2010 sebesar 0,8% dari belanja langsung yang bersumber APBD Dinas Kesehatan,

sedangkan alokasi anggaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari APBD Propinsi NTT sebesar 11,9%, dan bersumber dari pemerintah pusat berupa dana BOK, dan Jampersal sebesar 45,93%. Permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah adanya porsi anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat, sehingga alokasi anggaran diarahkan kepada pemenuhan sarana dan prasarana. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana proses perencanaan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan ?

6.2 Tinjauan Pustaka

A. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko dan meningkatkan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Program pencegahan dan pengendalian sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM, termasuk pencapaian cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2. Pengembangan real time surveilans melalui penguatan sistem survailans nasional dan penguatan sistem jejaring laboratorium nasional, termasuk penguatan laboratorium kesehatan masyarakat.

3. Peningkatan inovasi pengendalian vektor, termasuk pengendalian vektor terpadu, dan pengendalian vektor secara biologis.
4. Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;
5. Penguatan legislasi, kebijakan dan pembiayaan untuk kegawatdaruratan kesehatan masyarakat
6. Peningkatan advokasi dan komunikasi
7. Peningkatan program pencegahan resistensi antibiotika, penyakit zoonosis, keamanan pangan, manajemen biorisiko
8. Penguatan sistem laboratorium nasional
9. Penguatan reporting dan real time surveillance
10. Membangun sistem kewaspadaan dini
11. Membangun kemampuan fasyankes untuk respon cepat
12. Peningkatan kemampuan SDM (Kemenkes RI, 2020)

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Target Indikator Kinerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) sebesar 60 persen pada akhir tahun 2024.
2. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate) sebesar 90 persen pada akhir tahun 2024.
3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 405 kab/kota pada akhir tahun 2024.

4. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta sebanyak 514 kab/kota pada akhir tahun 2024.
5. Jumlah kabupaten/kota endemis sebanyak 190 kab/kota pada akhir tahun 2024.
6. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia kurang dari 18 tahun sebanyak 350 kab/kota pada akhir tahun 2024.
7. Jumlah Kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM sebanyak 514 kab/kota pada akhir tahun 2024.
8. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan sebesar 95,0 persen pada akhir tahun 2024.
9. Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan Napza 514 kab/kota pada akhir tahun 2024.
10. Persentase kab/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86 persen pada akhir tahun 2024.
11. Jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan sebanyak 472 kab/kota pada akhir tahun 2024.
12. Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
13. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 100% pada akhir tahun 2024.

Untuk mencapai target indikator program tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Surveilans dan Karantina Kesehatan
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
6. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
7. Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kemenkes RI, 2020)

B. Perencanaan

Perencanaan (*Planning*) adalah fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing, staffing, directing, dan controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan bersifat dinamis, ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Perencanaan adalah masalah “memilih”, artinya memilih tujuan, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan (Malayu, 2011). Untuk jelasnya ada beberapa pengertian perencanaan yang penulis kutip antara lain:

- a. Menurut Malayu (2011) yang mengutip pendapat Louis A. Allen, perencanaan adalah serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- b. Menurut Arsyad (2002) yang mengutip pendapat Conyers dan Hills (1991), perencanaan adalah proses yang kontiniu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.
- c. Menurut Handoko (2009) Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilaksanakan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang.
- d. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 1 dinyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- e. Menurut Azwar (2008), perencanaan adalah suatu proses kerja yang terus menerus yang meliputi pengambilan keputusan yang bersifat pokok dan penting dan yang akan dilaksanakan secara sistimatik, melakukan perkiraan-perkiraan dengan mempergunakan segala pengetahuan yang ada tentang masa depan, mengorganisir secara sistimatik segala upaya yang dipandang perlu untuk melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan, serta mengukur keberhasilan dari pelaksanaan keputusan tersebut dengan membandingkan hasil yang dicapai terhadap target yang telah ditetapkan melalui

pemanfaatan umpan balik yang diterima dan yang telah disusun secara teratur dan baik.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur, dan program yang dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

1. Ciri-ciri dan Unsur Rencana

Penyusunan perencanaan yang baik harus memperhatikan ciri-ciri sebagai berikut (Azwar, 2008):

- a) Bagian dari sistem administrasi
Menempatkan perencanaan yang disusun sebagai bagian dari sistem administrasi secara keseluruhan.
- b) Dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
Perencanaan dibuat untuk dilaksanakan, apabila hasilnya telah dinilai dilanjutkan lagi dengan perencanaan, demiP2Pn seterusnya sehingga terbentuk suatu spiral yang tidak mengenal titik akhir.
- c) Berorientasi pada masa depan
Artinya hasil pelaksanaan perencanaan tersebut akan mendatangkan berbagai kebaikan tidak hanya pada saat ini tetapi juga pada masa yang akan datang.
- d) Mampu menyelesaikan masalah
Penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap, yang harus tercermin pada pentahapan perencanaan yang akan datang.

e) Mempunyai tujuan

Perencanaan harus mempunyai tujuan yang dicantumkan secara jelas. Tujuan biasanya dibedakan menjadi dua yakni tujuan umum yang berisikan uraian secara garis besar dan tujuan khusus yang berisikan uraian lebih spesifik.

f) Bersifat mampu kelola

Artinya bersifat wajar, logis objektif, jelas runtun fleksibel serta telah disesuaikan dengan sumber daya.

2. Jenis-jenis Perencanaan

Perencanaan ditinjau dari jangka waktu berlakunya rencana dibagi menjadi tiga yaitu (Azwar, 2008):

a) Perencanaan jangka panjang (*long-range planning*), jika masa berlakunya rencana antara 12 sampai 20 tahun.

b) Perencanaan jangka menengah (*medium-range planning*), jika masa berlakunya rencana antara 5 sampai 7 tahun.

c) Perencanaan jangka pendek (*short-range planning*), jika masa berlakunya rencana selama 1 tahun.

Adapun perencanaan ditinjau dari tingkatan rencana terdiri dari

(Azwar, 2008):

a) Perencanaan induk (*master planning*)

b) Rencana yang dihasilkan lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan, mempunyai ruang lingkup yang amat luas serta berlaku untuk jangka waktu yang panjang.

- c) Perencanaan operasional (*operational planning*)
- d) Rencana yang dihasilkan lebih menitikberatkan pada aspek pedoman pelaksanaan yang akan dipakai sebagai petunjuk pada pelaksanaan kegiatan.
- e) Perencanaan harian (*day to day planning*)
- f) Rencana yang dihasilkan telah disusun rinci, biasanya disusun untuk program yang telah bersifat rutin.

3. Model-model Perencanaan

Prinsip-prinsip dalam perencanaan sangat tergantung pada asumsi dan tujuan dari perencanaan, asumsi dan tujuan dari perencanaan tidak ada yang seragam melainkan tergantung pada model perencanaan. Adapun beberapa model-model perencanaan antara lain (Azwar, 2008):

a) Model Rasional *Komprehensif*

Prinsip utama dalam model ini bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang teratur dan logis sejak dari diagnosis masalah sampai pada pelaksanaan kegiatan atau penerapan program. Model ini sangat menekankan pada aspek teknis metodologis yang didasarkan atas fakta-fakta, teori-teori dan nilai-nilai tertentu yang relevan. Pada model ini, masalah yang ditemukan harus didiagnosis, ditentukan pemecahannya melalui perancangan program yang komprehensif, kemudian diuji efektivitasnya sehingga diperoleh cara pemecahan masalah dan pencapaian tujuan yang baik.

b) Model Inkremental (penambahan)

Prinsip utama model ini mensyaratkan bahwa perubahan-perubahan yang diharapkan dari perencanaan tidak bersifat radikal (keras menuntut perubahan), melainkan perubahan-perubahan kecil atau penambahan-penambahan pada aspek- aspek program yang sudah ada. Model ini menyarankan bahwa perencanaan tidak perlu menentukan tujuan-tujuan dan kemudian menentukan kebijakan-kebijakan untuk mencapainya, yang diperlukan menentukan pilihan terhadap kebijakan yang berbeda secara marginal (bebas) saja.

c) Model Pengamatan Terpadu

Model pengamatan terpadu atau penyelidikan campuran (mixed scanning model) merupakan jalan tengah dari model rasional komprehensif dan model inkremental, yang memadukan unsur-unsur yang terdapat pada kedua pendekatan tersebut. Keputusan yang fundamental dilakukan dengan menjajagi alternatif-alternatif utama dihubungkan dengan tujuan, tetapi tidak seperti pendekatan rasional hal-hal yang detail dan spesifikasi diabaikan sehingga pandangan yang menyeluruh dapat diperoleh. Adapun keputusan yang bersifat tambahan atau *inkremental* dibuat di dalam konteks yang ditentukan oleh keputusan-keputusan fundamental.

d) Model Transaksi

Pada model ini menekankan bahwa perencanaan melibatkan proses interaksi dan komunikasi antara

perencana dan para penerima pelayanan. Oleh karena itu, model ini menyarankan bahwa perencanaan harus dapat menutup jurang komunikasi antara perencana dan penerima pelayanan yang membutuhkan rencana program.

4. Batasan Perencanaan Kesehatan

Perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut (Muninjaya, 2004).

Dalam buku-buku manajemen dijelaskan berbagai macam batasan dalam perencanaan. Dari batasan di atas, perencanaan akan menjadi efektif jika perumusan masalah sudah dilakukan berdasarkan fakta-fakta, dan bukan berdasarkan angan-angan dan emosi saja. Fakta-fakta diungkap dengan menggunakan data untuk menunjang perumusan masalah. Perencanaan juga proses pemilihan alternatif tindakan terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Keputusan untuk mengerjakan sesuatu di masa yang akan datang yaitu suatu tindakan yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Tugas manajer dalam perencanaan menetapkan tujuan jangka panjang dan pendek berdasarkan analisis situasi di luar (eksternal) dan di dalam (internal) organisasi (Muninjaya, 2004).

5. Manfaat Perencanaan

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh staf dan pimpinan jika organisasi memiliki sebuah perencanaan. Mereka akan mengetahui (Muninjaya, 2004) :

- a) Tujuan yang ingin dicapai organisasi dan cara mencapainya.
- b) Jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan.
- c) Jenis dan jumlah staf yang diinginkan, dan uraian tugasnya.
- d) Sejauh mana efektifitas kepemimpinan dan pengarahan yang diperlukan.
- e) Bentuk dan standar pengawasan yang diperlukan.

Selain itu perencanaan akan diperoleh keuntungan sebagai berikut:

- a) Perencanaan akan menyebabkan berbagai macam aktifitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat dilakukan secara teratur.
- b) Perencanaan akan mengurangi dan menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif.
- c) Perencanaan dapat dipakai untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai karena dalam perencanaan ditetapkan sebagai standar.
- d) Perencanaan memberikan suatu landasan pokok fungsi manajemen lainnya, terutama untuk fungsi pengawasan.

Sebaliknya pimpinan dan staf organisasi juga perlu memahami bahwa perencanaan juga memiliki kelemahan yaitu (Muninjaya, 2004) :

- a) Perencanaan mempunyai keterbatasan mengukur informasi dan fakta-fakta dimasa yang akan datang dengan tepat.
- b) Perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana.
- c) Perencanaan mempunyai hambatan psikologi bagi pimpinan dan staf karena harus menunggu dan melihat hasil yang ingin dicapai.
- d) Perencanaan juga akan menghambat tindakan baru yang harus diambil oleh staf. Sedangkan kelemahan perencanaan menurut Handoko (2009) yaitu :
 - a) Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata.
 - b) Perencanaan cenderung menunda kegiatan.
 - c) Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi.
 - d) Kadang-kadang hasil yang baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi, dan
 - e) Ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten.

6. Langkah-langkah Perencanaan

Penyusunan perencanaan yang baik harus memperhatikan ciri-ciri yaitu (Azwar, 2008) :

- a) Menempatkan perencanaan yang disusun sebagai bagian dari sistem administrasi secara keseluruhan.
- b) Dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan
Perencanaan dibuat untuk dilaksanakan, apabila hasilnya telah

dinilai dilanjutkan lagi dengan perencanaan, demiP2Pn seterusnya sehingga terbentuk suatu spiral yang tidak mengenal titik akhir.

c) Berorientasi pada masa depan

Artinya hasil pelaksanaan perencanaan tersebut akan mendatangkan berbagai kebaikan tidak hanya pada saat ini, tetapi juga pada masa yang akan datang.

d) Mampu menyelesaikan masalah

Penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap, yang harus tercermin pada pentahapan perencanaan yang akan datang.

e) Mempunyai tujuan

Perencanaan harus mempunyai tujuan yang dicantumkan secara jelas. Tujuan biasanya dibedakan menjadi dua yakni tujuan umum yang berisikan uraian secara garis besar dan tujuan khusus yang berisikan uraian lebih spesifik.

f) Bersifat mampu kelola

Artinya bersifat wajar, logis objektif, jelas runtun fleksibel serta telah disesuaikan dengan sumber daya.

Penyusunan perencanaan disusun dengan mengikuti tahapan atau siklus tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan. Secara garis besar perencanaan dapat dirumuskan menjadi lima tahapan yang meliputi (Azwar, 2008):

a) Identifikasi masalah

Identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan asesmen kebutuhan (*need assesment*). Kebutuhan dapat

didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya. Pengkajian kebutuhan dapat diartikan sebagai penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki atau penentuan kekurangan dalam kondisi yang ingin direalisasikan.

b) Penentuan Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Penentuan tujuan dimaksudkan untuk membimbing program kearah pemecahan masalah. Ada dua jenis atau tingkat tujuan yaitu tujuan umum (*goal*) dan tujuan khusus (*objective*). Tujuan umum dirumuskan secara luas sehingga pencapaian tidak dapat diukur sedangkan tujuan khusus merupakan pernyataan yang spesifik dan terukur. Rumusan tujuan khusus yang baik memiliki beberapa ciri yaitu berorientasi pada keluaran (*output*) bukan pada proses atau masukan (*input*); dinyatakan dalam istilah yang terukur; tidak hanya menunjukkan arah perubahan (misalnya meningkatkan) tetapi juga tingkat perubahan yang diharapkan (misalnya persen); menunjukkan jumlah populasi secara terbatas; realistis dalam arti dapat dicapai dan menunjukkan usaha untuk mencapainya; dan relevan dengan kebutuhan dan tujuan umum.

c) Penyusunan dan pengembangan rencana program

Rencana biasanya dikembangkan dalam suatu pola yang sistematis dan pragmatis dimana bentuk-bentuk kegiatan dijadwalkan dengan jelas. Program dapat dirumuskan sebagai suatu perangkat kegiatan yang saling tergantung dan diarahkan pada pencapaian satu atau beberapa tujuan khusus. Penyusunan program dalam proses perencanaan mencakup keputusan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses perumusan program yaitu identifikasi program *alternative*, penentuan hasil program, penentuan biaya, dan kriteria pemilihan program.

d) Pelaksanaan program

Tahap implementasi program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Ada dua prosedur dalam melaksanakan program yaitu merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program dan merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana.

e) Evaluasi Program

Dalam tahap evaluasi program, analisis kembali kepada peramalan proses Perencanaan untuk menentukan

apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Evaluasi menjadikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Evaluasi dapat dilaksanakan kalau rencana sudah dilaksanakan. Namun demi P2Pn perencanaan yang baik harus sudah dapat menggambarkan proses evaluasi yang akan dilaksanakan. Pada tahap evaluasi perlu diperhatikan apakah rencana sudah dilaksanakan, tujuan sudah tercapai, kebijakan atau program sudah berjalan secara efektif dan efisien.

6.3 Pembahasan

Proses perencanaan dan penganggaran program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit antara lain analisis situasi dan perumusan masalah, penentuan tujuan, identifikasi kegiatan/program, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, dan integritas perencanaan.

A. Analisis Situasi dan Perumusan Masalah dan Penentuan Tujuan Program

Dalam proses perencanaan dan penganggaran program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada langkah analisis situasi, perumusan masalah, dan penentuan tujuan program melibatkan 3 unsur seperti Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Puskesmas. Hal yang dibahas di Musrembang kecamatan dan kabupaten. g secara umum didominasi oleh pembangunan fisik seperti pembangunan poskesdes untuk tempat bersalin di desa, pembuatan sarana air bersih, rehap fasilitas pelayanan kesehatan,

pengadaan Puskesmas, dan perumahan bidan desa (Mawaddah, 2019).

Analisis situasi adalah langkah pertama dalam penyusunan perencanaan kesehatan. Analisis situasi bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada dengan mengumpulkan berbagai jenis data dan fakta yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang dijadikan dasar dalam menyusun perencanaan. Analisis masalah dalam suatu perencanaan program kesehatan khususnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dimaksudkan untuk mengkaji kebutuhan (need assesment) yang didasarkan pada fakta yang objektif tentang permasalahan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit . Proses analisis situasi harus menghasilkan rumusan masalah kesehatan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan penecagahan dan pengendalian penyakit yang sedang diamati serta potensi Dinas Kesehatan yang dapat digunakan untuk melakukan intervensi.

Kriteria dasar yang digunakan untuk menentukan intervensi kesehatan prioritas adalah efesiensi. Efesiensi mencakup dua prinsip kunci yaitu Opportunity cost dan mengukur pertambahan marginal. Memilih dan memprioritaskan intervensi yang telah terbukti efektif dan terbukti secara ilmiah dalam mengurangi angka kematian dan kesakitan yang diakibatkan oleh masalah P2P merupakan salah satu langka penting yang diambil dalam proses perencanaan berbasis bukti setelah melakukan identifikasi masalah Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau prioritas masing-masing daerah. Proses penentuan prioritas masalah sangat

tergantung pada tujuan perencanaan dan para aktor yang terlibat dalam proses.

Tahap analisis situasi dan perumusan masalah kesehatan di Dinas Kesehatan tidak dilakukan analisis secara mendalam lagi, Dinas Kesehatan membuat perencanaan dari laporan Puskesmas kemudian bagian perencanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membuat perencanaan berdasarkan data dan laporan dari Puskesmas. Itu artinya analisis situasi seperti penentuan prioritas masalah pencegahan penyakit masih belum dilakukan secara sistematis dan belum mengarah pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang penting untuk diusulkan dalam anggaran.

Siklus perencanaan kesehatan daerah terikat pada siklus perencanaan daerah yang diatur oleh Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan rencana untuk tahun mendatang disusun setahun sebelumnya. Proses analisis situasi sudah harus mulai dikerjakan sejak bulan Desember. Analisis situasi seluruhnya sudah harus selesai pada bulan Januari kemudian ada rapat kerja perencanaan I dilakukan pada bulan Januari dan II yang dilaksanakan pada akhir Februari atau awal Maret, yaitu sebelum Musrebang kabupaten/kota dilaksanakan.

Proses analisis situasi, perumusan masalah dan penentuan tujuan program kesehatan dilakukan sebelum dibahas di Musrebang desa dan kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa analisis situasi dan masalah Pencegahan dan Pengendalian Penyakit cenderung tidak dilakukan oleh perwakilan desa atau kecamatan,

dan umumnya hanya dilakukan analisis masalah kesehatan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian hal-hal yang dibicarakan dalam Musrembang secara umum lebih dominan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayahnya seperti pembangunan poskesdes untuk tempat bersalin di desa, pembuatan air sarana air bersih, rehap fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan Puskesmas, dan perumahan bidan desa. Sedangkan usulan kegiatan terkait program Pencegahan penyakit jarang diusulkan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa permasalahan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit belum menjadi perhatian oleh pihak desa dan kecamatan, masyarakat lebih fokus kepada pembangunan fisik.

Pada level Musrembang desa dan kecamatan, masalah Pencegahan dan Pengendalian Penyakit diharapkan menjadi perhatian penting masyarakat sehingga dapat menjadi masukan dan menjadi prioritas program saat Musrembang desa dan kecamatan. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan memastikan ketersediaan sumber daya bagi kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui proses Musrembang desa. Intinya adalah pelibatan perempuan dalam proses perencanaan di tingkat desa.

Suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai pemberdayaan bila mampu memperkuat, meningkatkan atau mengembangkan potensi masyarakat setempat. Organisasi kemasyarakatan sebagai potensi masyarakat di bidang kesehatan perlu mendapat perhatian karena kegiatannya sampai pada tingkat operasional. Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) diantaranya adalah posyandu, desa siaga posbindu, tanaman obat keluarga, pos obat desa, dan sebagainya.

Secara konseptual posyandu dan desa siaga merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada, dimana masyarakat sebagai pelaku upaya kesehatan dan sangat besar manfaatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 564/MENKES/SK/VI II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.

B. Identifikasi Program/Kegiatan dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada tahap identifikasi kegiatan dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran adalah berkaitan dengan keseluruhan bentuk dan jenis program/kegiatan yang telah diprioritaskan, kebutuhan, indikator, dan tolak ukur serta sinkronisasi program/kegiatan. Cara menentukan prioritas masalah program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dilakukan yaitu dari pendataan surveilan dan screening yang beresiko melalui posbindu, pandu PTM.

Kebutuhan biaya untuk program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit cara menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yaitu dibuat berdasarkan analisis dan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Bagian perencanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit hanya bertugas menyusun dan mengusulkan RKA dan bagian programlah yang menganggarkannya dan menyetujui RKA tersebut. Kebutuhan biaya dilihat dari ketersediaan dana yang ada dan perkiraan dana yang dibutuhkan (Mawaddah, 2019).

Identifikasi kegiatan sangat penting dalam perencanaan karena kaitannya yang erat dengan perhitungan kebutuhan anggaran. Identifikasi program kesehatan yang diusulkan sesuai dengan hasil analisis situasi dan perumusan masalah, penentuan tujuan program, dan hasil rekapitulasi didasarkan pada rapat Musrembang kecamatan, kemudian didiskusikan kembali pada forum SKPD. Pada tahapan ini komponen yang terlibat adalah seluruh unsur di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Identifikasi program biasanya sudah diarahkan pada jenis, kuantitas, dan jumlah biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah teknis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten pada tahapan ini yaitu dengan cara membuat dan menyusun RKA yang akan diusulkan sebagai usulan program dan anggaran. RKA yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten berdasarkan analisis dan evaluasi program tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa model perencanaan yang digunakan adalah model inkremental (penambahan). Perubahan-perubahan yang diharapkan dari perencanaan tidak bersifat radikal (keras menuntut

perubahan), melainkan perubahan-perubahan kecil atau penambahan-penambahan pada aspek-aspek program yang sudah ada.

Secara normatif bentuk kegiatan yang diusulkan harus disesuaikan visi-misi Pemerintah Daerah terpilih. Disamping hal tersebut juga diselaraskan dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten dan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun jangka panjang, kebijakan strategis serta berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya agar dapat dialokasikan dalam bentuk anggaran. Dengan demikian rumusan visi-misi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan di bersinergi dengan arah pembangunan nasional .

Dalam penyusunan program P2 di Dinas Kesehatan Kabupaten terlebih dahulu dibuat atau disusun oleh bagian yang bertanggung jawab terhadap program P2P, kemudian setelah disusun dimasukkan ke bagian program yang nantinya bagian program lah yang menentukan usulan yang akan dimasukkan ke RKA dan jumlah alokasi dana per kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap identifikasi program kurang memperhatikan kebijakan yang ada, identifikasi program atau kegiatan hanya didasarkan pada semua usulan yang telah ada dari Musrembang dan dari laporan Puskesmas sehingga berimplikasi terhadap pencapaian program P2.

Kegiatan program P2 cenderung merupakan kegiatan berulang dari tahun-tahun sebelumnya dan tidak adanya inovasi program

kerja. Fakta diatas menjelaskan bahwa kurangnya analisis berbasis kinerja terhadap semua usulan kegiatan program P2P, usulan hanya didasarkan pada usulan yang telah ada pada tahun sebelumnya, sementara secara terus-menerus permasalahan yang ada belum tentu itu saja yang menjadi kebutuhan program di tahun berikutnya, walaupun pada perencanaan lima tahunan usulan suatu program diharapkan dapat berkesinambungan.

Pertimbangan lain dalam penyusunan program P2 di Dinas Kesehatan. menunjukkan adanya penetapan pagu anggaran SKPD berimplikasi terhadap skala prioritas program, sehingga pada rapat forum SKPD adanya batasan-batasan anggaran masing-masing bidang membuat seluruh usulan program P2 dari hasil Musrembang kecamatan tidak dapat diakomodir. Kebutuhan biaya dilihat dari ketersediaan dana dan perkiraan biaya untuk program P2.

C. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Identifikasi kegiatan sangat penting dalam perencanaan karena kaitannya yang erat dengan perhitungan anggaran. Berikut akan dijelaskan langkah-langkah dalam pengusulan anggaran, pertimbangan yang perlu diperhatikan agar program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit menjadi program prioritas di SKPD, masalah dalam perencanaan dan penganggaran, dan yang terlibat dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program P2. Adapun langkah-langkah dalam pengusulan anggaran dalam pelaksanaan program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit berdasarkan wawancara dengan informan disesuaikan dengan Permendagri No. 54 tahun 2010 (Mawaddah, 2019).

Perencanaan di Dinas Kesehatan Kabupaten secara umum dilakukan dengan merekapitulasi semua usulan program dari kecamatan dan Puskesmas, kemudian ditentukan program apa saja yang menjadi prioritas. Pertimbangan prioritas program PP terbentur dengan jumlah anggaran yang tersedia. Sementara diharapkan usulan program dan prioritas program adalah benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang ditemukan dalam penganggaran program P2P terbatasnya dana untuk program P2P sehingga tidak semua kegiatan dapat ditampung. Peningkatan jumlah alokasi anggaran P2P dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kapasitas staff yang mendampingi dokumen anggaran. Kapasitas staff perlu ditingkatkan salah satunya dengan penekanan penggunaan intervensi berbasis bukti. Perencanaan yang sistematis dan didukung oleh data serta bukti dapat berkontribusi meningkatkan alokasi dana kesehatan melalui advokasi di level daerah (Marthias dkk, 2014).

Penyusunan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dimulai dari usulan yang didapat dari Puskesmas dihimpun dan direvisi oleh bagian perencanaan P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal untuk disatukan dalam usulan RKA. Kemudian RKA dikumpulkan pada sub bagian program sebelum diusulkan ke Bappeda Kabupaten Mandailing Natal sebagai Rencana Kerja (RK) untuk tahun yang akan dilaksanakan. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal sudah

disesuaikan dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Yang terlibat dalam pembuatan perencanaan dan penganggaran program P2 P di Dinas Kesehatan yaitu semua pejabat structural maupun fungsional yaitu Kepala Dinas Kabupaten Kepala Subbagian Program, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Bidang Pelayanan dan Promosi Kesehatan, Kepala Bidang Pengendalian, Kepala Seksi P2P, dan staff, akan tetapi untuk perencanaan program P2 bagian keuangan tidak diikutkan, mereka hanya diikutsertakan dalam penganggaran, yang membuat RKA untuk program P2 adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Promosi Kesehatan, Kepala Seksi P2 dan staff. Kemudian RKA dimasukkan ke subbagian program Dinas Kesehatan sebagai bagian yang menangani usulan program/kegiatan yang telah diusulkan sampai ditetapkannya anggaran oleh Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kabupaten.

Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan yang perlu diperhatikan agar usulan program P2P menjadi salah satu usulan program prioritas di SKPD yaitu dilihat dari data pendukung untuk mengadvokasi pengambil keputusan agar program P2 dijadikan sebagai prioritas. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dapat diketahui seberapa besar masalah yang akan dihadapi.

Dalam forum SKPD, Dinas Kesehatan menyampaikan RK kesehatan dan perlu melakukan advokasi untuk meyakinkan pengambilan keputusan. Dalam hal ini tentunya sangat dibutuhkan

dedikasi dan kemampuan tenaga perencanaan bidang promosi dan pelayanan kesehatan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kebutuhan anggaran dan prioritas masalah programP2.

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dalam forum SKPD di Kabupaten yaitu semua usulan kegiatan masing-masing SKPD yang mempunyai keterlibatan dan keterkaitan dengan usulan kegiatan di Dinas Kesehatan. Seperti kegiatan-kegiatan di Dinas Kesehatan yang ada kaitannya dengan lintas sektoral. Dalam kesempatan ini Dinas Kesehatan melakukan advokasi dengan memajukan pendapat yang dapat menguatkan program dan kerja sama dengan lintas sektoral.

Sebelum RK disusun perlu dilakukan kajian terhadap hambatan atau kelemahan yang bersumber dari Dinas Kesehatan agar program yang akan dilaksanakan tidak akan terhambat oleh faktor internal Dinas Kesehatan. Faktor lingkungan diluar Dinas Kesehatan seperti peran serta masyarakat dan kerja sama lintas sektoral penting dikaji sebagai strategi pengembangan program di lapangan (Muninjaya, 2004).

Penyusunan rencana kerja dan anggaran yang merupakan output dari forum SKPD harus bersifat performance based budgeting sehingga menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas (Sancoko, dkk, 2008).

D. Integritas Perencanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Analisis evaluasi usulan SKPD yaitu semua bidang di Bappeda dan semua kabid di bagian penelitian dan pengembangan. Adapun mekanisme pengambilan keputusan di Bappeda agar yang di usulkan oleh SKPD itu diterima berdasarkan hasil wawancara yaitu usulan disesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kabupaten, kalau sudah sesuai akan diterima dan sebaliknya apabila tidak sesuai tidak akan diterima.

Integritas perencanaan merupakan langkah penting dalam penyusunan program dan pengambilan keputusan anggaran. Pemerintah Pusat mengintruksikan untuk mengintegrasikan target SDGs kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 tahun 2010, yang berlaku sejak januari 2010. Pemerintah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), memperkenalkan Road Map MDGs pada April tahun 2010, sebuah dokumen kebijakan yang menguraikan strategi untuk mengutamakan dan mempercepat pencapaian MDGs. Bappenas juga menerbitkan Panduan Rencana Kerja Daerah tentang MDGs dan Dukungan Keuangan pada tahun 2011. Dokumen yang merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan dan menghasilkan rencana kegiatan untuk percepatan realisasi target MDGs (Dwicaksono dan Donny, 2013).

Menurut Kemnkes RI (2007), Setelah dokumen RK selesai maka Dinas Kesehatan akan menyampaikan usulan rencana dan

anggaran sektor kesehatan tahun mendatang dalam Musrembang yang biasanya diselenggarakan pada bulan Maret dan April. Dinas Kesehatan juga mengakomodir usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrembang yang akan digunakan untuk memperbaiki draf RK. Pada bulan yang sama draf RK disampaikan dalam forum SKPD dimana pesertanya yaitu Pemda/Bappeda dengan SKPD termasuk Dinas Kesehatan. Dalam forum ini Dinas Kesehatan menyampaikan RK kesehatan dan perlu melakukan advokasi untuk menyakinkan pengambilan keputusan. Berdasarkan penelitian yang dibahas dalam forum SKPD yaitu semua usulan RK dari setiap SKPD dan usulan-usulan yang mempunyai keterlibatan dan keterkaitan dengan usulan kegiatan program P2P di Dinas Kesehatan Kabupaten dengan lintas sectoral.

Langkah-langkah dalam penyusunan anggaran di DPRD yaitu proses perencanaan dan penganggarannya dimasukkan oleh Pemerintah Daerah ke DPRD dalam bentuk KUA PPAS dan dibahas oleh panitia anggaran DPRD bersama dengan SKPD. Perencanaan dan penganggaran harus berdasarkan aturan-aturan mekanisme keuangan daerah. Dalam proses penyusunan anggaran di DPRD yaitu pertama pemerintah memasukkan dalam bentuk KUA PPAS yang akan dibahas bersama di komisi 4 yang bermitra dengan Dinas Kesehatan Kabupaten . Kemudian KUA PPAS dibahas untuk menentukan kebijakan apa yang akan dibuat setiap tahun anggaran. Setelah didapat kebijakan umum anggaran dilanjutkan dengan penentuan PPAS (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara) anggaran tahun yang akan datang apa kegiatan masing-masing SKPD, setelah PPAS disepakati, Kepala

Daerah akan menyurati SKPD masing-masing agar SKPD masing-masing itu membuat yang namanya RKA sesuai dengan hasil PPAS kesepakatan PP dengan Kepala Daerah.

Di RKA nanti masing-masing SKPD menuangkan program-program kegiatan yang juga akan disampaikan ke DPRD untuk dibahas yang pertama komisi-komisi terkait sesuai bidangnya dengan SKPD-SKPD, kemudian nanti baru dibahas kembali oleh badan anggaran DPRD dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Berikut pernyataan informan perihal proses penyusunan anggaran di DPRD.

Mengingat program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan isu penting yang menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN dan menjadi salah satu agenda pencapaian SDGs harusnya Dinas Kesehatan Kabupaten memberi perhatian lebih dan perlu memprioritaskan program P2 di Dinas Kesehatan Kabupaten.

6.4 Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa sebagai berikut:

1. Proses perencanaan dan penganggaran program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan belum menggunakan perencanaan dan anggaran berbasis kinerja dan masih mengikuti model inkremental.

2. Alokasi anggaran untuk program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit masih belum memenuhi kebutuhan yang ada.
3. Kemampuan manajerial Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten masih kurang.
4. Kemampuan teknis pada bagian perencanaan dan penganggaran program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit masih kurang.
5. Kerja sama dan koordinasi lintas sektoral antara Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas, dan Kecamatan dalam kegiatan program Pencegahan Dan Pengendalian masih sangat kurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan manajerial pemimpin di semua lini kesehatan.
2. Perlu adanya peningkatan kemampuan teknis petugas di bagian perencanaan dan penganggaran program Pencegahan Dan Pengendalian Perlu ada pendidikan dan pelatihan teknis penyusunan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Dinas Kesehatan perlu menelaah kembali pengalokasian dana APBD untuk semua kegiatan agar sesuai dengan tujuan organisasi untuk mengatasi keterbatasan dana APBD dan kelemahan sistem inkremental.

4. Bagi Koordinator program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten agar berperan aktif dalam mempertahankan usulan kegiatan program dalam forum SKPD agar program yang dibutuhkan terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
5. Dinas Kesehatan perlu melakukan advokasi dan sosialisasi secara intens kepada Pemerintah Daerah sebagai upaya meningkatkan alokasi dana APBD Dinas Kesehatan, sehingga kegiatan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mendapatkan alokasi yang lebih banyak dan memadai tanpa mengurangi alokasi untuk kegiatan lainnya.
6. Perlu adanya peningkatan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dalam semua kegiatan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan peningkatan pemahaman mengenai tupoksi masing-masing.

BAB VII

ISU PERENCANAAN ASPEK LINGKUNGAN

7.1 Latar Belakang

Pencemaran lingkungan merupakan masalah populer yang banyak dijumpai dan dibahas hampir di seluruh belahan dunia, sehingga diperlukan upaya-upaya serius dan sungguh-sungguh dari semua pihak, baik upaya pencegahan maupun penanganan jika pencemaran telah terjadi. Dalam era modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Manusia merupakan satu-satunya komponen lingkungan hidup biotik yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidup.

Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi memberikan dampak yang luas, termasuk dampak pada lingkungan hidup. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di satu sisi, manusia membutuhkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya manusia melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia juga harus memikirkan dampak terhadap kegiatan yang dilakukan mengingat bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28H ayat (1). Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi menimbulkan juga peningkatan kebutuhan manusia yang cukup tinggi pula. Kegiatan-kegiatan ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, sedikit banyak menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Maraknya usaha-usaha ekonomi mikro dan kecil terutama di kota-kota besar seringkali menimbulkan masalah pada lingkungan akibat limbah yang dihasilkan.

Dalam upaya penanganan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pelaku usaha tersebut, maka Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka (2) menyebutkan: *“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”*.

Undang-undang tersebut dengan tegas telah memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah mempunyai kontrol dalam setiap izin yang dikeluarkan. Izin merupakan instrument yang paling banyak digunakan oleh pemerintah sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Adapun prosedur perizinan yakni pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Tujuan dari sistem perizinan itu sendiri adalah untuk kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan dan lain sebagainya.

Tingginya perkembangan usaha mikro dan kecil di kalangan masyarakat saat ini juga dapat mengancam lingkungan jika tidak diiringi dengan usaha pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu upaya preventif yang dapat diberlakukan kepada para pelaku usaha adalah dengan mewajibkan para pelaku usaha untuk memenuhi pengurusan izin lingkungan. Usaha dan/atau kegiatan dilihat dari perspektif lingkungan hidup di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu: usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, dan kegiatan dan/atau usaha wajib SPPL.

Pemerintah dalam mengatur dan memberikan izin usaha kepada para pelaku usaha mempunyai berbagai macam kebijakan. Bahwa untuk menjalankan amanat dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 35 ayat (3) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Kemudian, pemerintah pada tahun 2007 telah mengeluarkan UU. No. 26 tentang Penataan Ruang, namun demikian hingga kini efektifitas penerapan UU tersebut di dalam tataran praktis masih menghadapi banyak kendala dan tantangan. Di samping kesadaran masyarakat untuk hidup tertib dan teratur masih rendah, yang juga tidak kalah penting adalah dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang begitu cepat belum dapat diimbangi oleh kesiapan pemerintah untuk mengantisipasinya. Salah satu alasan klasik dari ketidakberdayaan pemerintah tersebut adalah keterbatasan sumber daya yang dimilikinya baik secara finansial maupun sumber daya aparatur pemerintah (kuantitas maupun kualitas).

7.2 Permasalahan

Dengan melihat kecenderungan yang berlangsung belakangan ini, bahwa di satu sisi pembangunan terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yang secara bersamaan berdampak domino pada semakin sedikitnya ketersediaan lingkungan. Sekaligus di saat bersamaan pertumbuhan dan geliat ekonomi memaksa ekspansi lingkungan dilakukan untuk memastikan perputaran ekonomi terus berjalan. Sinergitas antara pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang kondusif menjadi pertalian yang menentukan keberhasilan kemajuan suatu daerah. Bersamaan dengan itu, sebagaimana yang telah di singgung sebelumnya makalah ini setidaknya mengangkat persoalan mengenai ketiga aspek tersebut. Adapun yang menjadi

rumusan masalah pada makalah ini adalah :

1. Bagaimana proses dan mekanisme perencanaan sektor lingkungan dengan mendorong partisipasi masyarakat?
2. Apa faktor-faktor yang membuat kerusakan pada lingkungan?
3. Bagaimana mengedepankan perencanaan sektor lingkungan yang berbasis mitigasi bencana?

7.3 Tinjauan Pustaka

Kolaboratif (*Collaborative Planning*) di Sektor Lingkungan

Perencanaan kolaborasi merupakan perencanaan yang berorientasi pada para pemangku kepentingan, melibatkan stakeholders (Healey, 2006: xii; Ellin, dalam Graham and Healey, 1999; Allmendinger, P. and Mark Tewdwr-Jones, 2002: 206), dan tidak dibatasi oleh tempat - *Euclidian space* - dan waktu (Graham and Healey, 1999). Perencanaan kolaborasi didasari oleh konsep structuralist dari Giddens dan *communicative action* dari Habermas, sehingga dalam prosesnya perencanaan kolaborasi meliputi proses komunikasi, dialog, dan transaktif (Graham and Healey, 1999; Healey, 2006). Proses ini merupakan proses saling belajar antar pelaku, sehingga masing-masing mendapatkan pengetahuan akan permasalahan yang dihadapi melalui dialog yang terstruktur, yang pada akhirnya akan saling menguntungkan.

Perencanaan kolaborasi akan berhasil jika ada ketergantungan antar pelaku (Innes and Booher, 2000) dan konsensus (Healey, 2006; Innes, 1996; Forester, 1989: 47; Margerum, 2002). Saling ketergantungan tersebut memupuk partisipasi dan komitmen untuk proses kolaborasi yang bermakna, dan sangat memungkinkan untuk membangun kepercayaan dalam

situasi saling ketergantungan yang tinggi (Ansell dan Gash, 2008). Saling ketergantungan akan menimbulkan keinginan untuk berkompromi, untuk akhirnya bisa mencapai konsensus.

Hal yang mendasar dari proses kolaborasi adalah negosiasi yang terstruktur dalam pengambilan keputusan, dan konsensus merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan bersama (Gunton and Day, 2003). Dengan demikian, terbentuknya konsensus merupakan suatu hasil dari proses yang bersifat demokratis, partisipasi yang terstruktur, serta membutuhkan waktu dan kesabaran. Lebih jauh, menurut Innes dan Booher (2000), dialog yang dilakukan untuk mencapai konsensus harus merupakan *Authentic Dialogue*, bukan retorik atau ritual. Masing-masing pembicara memiliki legitimasi, berbicara dengan sungguh-sungguh, membuat pernyataan yang dapat dipahami oleh orang lain, serta menyampaikan pernyataan yang akurat. Dialog demikian akan menghasilkan *reciprocity, relationships, learning, and creativity*.

Dengan mengelaborasi konsep Collaborative Governance dan Collaborative Planning di atas, maka dapat dilihat bahwa proses kolaborasi merupakan aspek utama dalam perencanaan kolaborasi. Proses kolaborasi merupakan suatu proses "*penggodogan*" pendapat dari berbagai pihak yang akhirnya menghasilkan suatu pendapat yang disepakati bersama, yaitu sebuah konsensus. Dalam proses yang terdiri dari berbagai tahapan yaitu upaya terbangunnya komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, hasil sementara, dialog otentik, dan kepercayaan. Tahapan-tahapan ini merupakan suatu siklus sehingga terjadi proses pembelajaran didalamnya.

Beberapa penelitian berkaitan tentang proses kolaborasi sudah dilakukan. Anshell dan Gash (2007) mengemukakan Model *Collaborative Governance* dengan inti proses kolaborasi, yang dipengaruhi oleh kondisi awal (partisipasi), rancangan kelembagaan, dan kepemimpinan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kepercayaan dan saling ketergantungan merupakan faktor kontingensi inti dan terjadi dampak interaktif antara keduanya. Adanya ketergantungan antar pelaku dalam proses kolaborasi didukung oleh Kraft dan Johnston (2003) serta Innes dan Booher (2000). Johnston (2010) menindaklanjuti penelitian Anshell dan Gash, menyimpulkan bahwa proses keterlibatan pada struktur *collaborative governance* dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan penguatan siklus kepercayaan, komitmen, pengertian, komunikasi.

Meski terlihat ideal, proses kolaboratif masih banyak ada yang meragukan keefektifannya, baik karena prosesnya maupun landasan ideologinya. Menyatukan beberapa pendapat yang berbeda dan kemudian menghasilkan suatu kesepakatan, terlihat sangat ideal, tapi bukan pekerjaan mudah. Proses kolaborasi sulit diterapkan karena merupakan proses yang memiliki banyak tuntutan dan hal tersebut membutuhkan banyak waktu, memberikan hasil yang kepastiannya rendah, dan kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan yang menyebabkan perselisihan dalam kelompoknya (Johnston, 2010). Selain itu, keterlibatan publik yang bebas dan tanpa hambatan untuk mengatasi masalah-masalah bersama, merupakan ketidakmungkinan secara konseptual (Mouffe, 1999). Berkaitan dengan perencanaan kolaborasi, Palermo dan Ponzini

(2010) berpendapat bahwa perencanaan kolaboratif yang dikemukakan Healey memiliki resiko penyederhanaan ideologi dan pemikiran yang keliru.

Gunton dan Day (2003) telah melakukan pengamatan terhadap beberapa penelitian evaluasi tentang perencanaan kolaborasi yang diterapkan pada permasalahan lingkungan yaitu dalam tata guna lahan, pengelolaan sampah, daerah aliran sungai.

Kesimpulannya adalah bahwa perencanaan kolaborasi sangat memberikan manfaat. Keberhasilan penerapan perencanaan kolaboratif tidak terlepas dari adanya tantangan- tantangan keterbatasan penerapan. Adapun kriteria keberhasilan perencanaan kolaborasi yang digunakannya adalah: 1. pencapaian kesepakatan 2. efisiensi proses kolaborasi dibandingkan dengan proses alternatif lain 3. kepuasan para pemangku kepentingan terhadap proses dan hasilnya 4. manfaat untuk modal sosial seperti memperbaiki hubungan antar para pemangku kepentingan dan peningkatan keterampilan. Tahap-tahap kolaborasi yang diidentifikasi yang perlu diperhatikan adalah tahap pranegosiasi, negosiasi, dan pasca-negosiasi. Perencanaan kolaborasi memerlukan adanya partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terlibat karena berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Bahkan menurut tangga partisipasi Arnstein (1969), kolaborasi hanya dapat terjadi bila partisipasi masyarakat berada pada tangga tertinggi. Namun hal ini tidak berarti masyarakat Indonesia tidak dapat melakukannya. Penataan kawasan Kali Code menjadi bukti nyata terjadinya proses kolaborasi. Kawasan tersebut disulap dari kawasan kumuh yang penuh dengan resiko, tidak layak dijadikan hunian, menjadi

kawasan yang layak huni dan sedap dipandang (Mitchell, Setiawan, Rahmi, 1997). Saat itu terjadi proses yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat secara aktif. Mereka terlibat dari mulai perencanaan sampai dengan implementasinya. Selain itu, pelajaran dapat diambil dari pemindahan pedagang kaki lima di kota Solo pada tahun 2006. Ardiansyah (2009) menulis bahwa keberhasilan tersebut telah melewati proses dialog panjang, hingga 54 kali pertemuan. Bersama wakilnya, dan para kepala dinas, setiap Jumat pagi (dua minggu sekali) Jokowi bersepeda berkeliling kampung. Dia ajak pedagang makan siang atau makan malam. Mereka yang bersuara vokal didatangi. Keinginan mereka seperti apa, lalu didengarkan. Tempat dialog bisa di mana saja, mulai dari warung kecil, pinggir jalan, lokasi PKL Banjarsari, hingga di Loji Gandrung (rumah dinas wali kota). Ketika komunikasi sudah terjalin, konsep penataan PKL disusun Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan disosialisasikan kepada pedagang. Proses berlanjut dengan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, baru relokasi. Model pendekatan yang digunakan adalah dialogis dan komunikatif yang mengusung misi *nguwongke wong cilik* (memberi martabat pada orang kecil) membuahkan hasil. Pada Juli 2006 sebanyak 989 pedagang yang berusaha di Monumen 45 Banjarsari sejak 1998 mau pindah ke Pasar Klithikan Notoharjo, Semanggi, tanpa paksaan. Karena itu penerapannya pada pengelolaan sampah, bukanlah hal yang mustahil.

University of Michigan (2006) melakukan penelitian terhadap perencanaan kolaborasi pada perencanaan tata guna lahan, pengelolaan hutan, lingkungan ketetanggan (*neighbourhood*) di

delapan wilayah State Trust Land. Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap proses kolaborasi, maka diketahui bahwa tahapan kolaborasi yang dilakukan adalah:

- a) Memutuskan kapan berkolaborasi
- b) Menyusun proses untuk mencapai keberhasilan
- c) Menentukan siapa yang berpartisipasi
- d) Mengorganisasikan proses
- e) Menyusun struktur pembuatan keputusan
- f) Membantu peserta bekerja bersama
- g) Membagi informasi
- h) Mengimplementasikan kesepakatan

Terlepas dari keterbatasannya, bila tahapan tersebut diaplikasikan dalam pengelolaan sampah, maka tahapan proses kolaborasi dapat dilihat kemungkinannya sebagai berikut:

1. Ketika memutuskan kapan berkolaborasi, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kelompok/individu pemangku kepentingan yang potensial untuk berkolaorasi. Para pemangku kepentingan adalah mereka yang menghasilkan sampah, yang terkena dampak, dan yang menangani sampah. Mereka yang menghasilkan sampah diantaranya adalah rumah tangga, industri, pasar, perkantoran, rumah sakit, yang terkena dampak adalah masyarakat umum, dan yang menangani adalah pemerintah dan masyarakat. Harus dipastikan bahwa yang akan diajak dalam proses kolaborasi adalah pemangku kepentingan yang memiliki potensi untuk memberikan pendapat, kontribusi,

tidak memiliki masalah hukum. Kontribusi yang mereka dapat berikan adalah dalam bentuk keuangan, pendapat, atau profesionalitas.

2. Selanjutnya adalah menghubungi para pemangku kepentingan yang potensial, dan menilai seberapa besar ketertarikan dan kepentingan mereka dalam proses partisipasi. Kemudian menganalisis situasi dan kemungkinan-kemungkinan para pemangku kepentingan dalam memberikan waktu, pendapat, dana, dan upaya. Juga melihat apakah masalah dapat dikelola dalam diskusi secara efektif dan alternative proses yang mungkin. Yang tak kalah penting adalah mendapatkan dukungan dan sumber daya dari lembaga pembuat keputusan, misalnya instansi pemerintah terkait seperti Badan Perencanaan Daerah dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Menentukan siapa yang berkolaborasi. Orang yang ditunjuk adalah orang yang benar-benar mewakili kepentingan para pemangku kepentingan, bukan kepentingan pribadi. Misalnya untuk kelompok rumah tangga, apakah kemungkinannya seorang ketua RT (Rukun Tetangga)? Selain itu juga menentukan rencana yang jelas untuk memilih mereka, menentukan peran dan tanggung jawab mereka, dan melibatkan aparat pemerintah terkait.
4. Mengorganisasikan proses kolaborasi, dengan mengambil variasi struktur kolaborasi yang sudah teruji, dan memungkinkan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu juga menyusun jadwal perencanaan. Proses

kolaborasi mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama, karena suatu tahapan mungkin dilakukan dalam beberapa kali. Selain itu bisa disebabkan karena sulitnya mendapatkan waktu yang sesuai diantara para individu yang mewakili para kelompok pemangku kepentingan. Proses yang dilakukan di Kali Code memakan waktu lima tahun (1989-1995), proses pemindahan para pedagang kaki lima (PKL) di Kota Solo memakan waktu setahun dengan komunikasi intensif antara walikota dengan pedagang, sampai akhirnya para PKL mau pindah tanpa paksaan.

5. Membuat struktur pembuatan keputusan yang menjelaskan pembagian peran dan wewenang. Harus dibedakan antara kekuasaan dan kewenangan untuk membuat keputusan dan dijelaskan bagaimana kekuasaan didistribusikan pada proses kolaborasi tersebut. Hal tersebut harus disepakati dan tertulis. Semua peserta harus memahami aturan pembuatan keputusan yang disepakati. Catatan minor harus dikumpulkan, sehingga memudahkan ketika terjadi kesulitan dalam pengambilan keputusan.
6. Membangun partisipasi aktif semua peserta dalam aktivitas formal and informal selama proses kolaborasi berjalan. Kepentingan-kepentingan yang tersirat harus teridentifikasi. Kesalahan komunikasi harus dihindarkan, serta dapat membangun saling kepercayaan satu sama lain. Membangun komunikasi efektif dan mendorong masyarakat umum untuk memberikan masukan dan umpan balik

7. Menyusun agenda pertemuan secara rutin diantara para peserta sehingga setiap informasi dan kemajuan diketahui dan dipahami semua peserta. Jangan menganggap semua peserta paham hanya karena mereka mengikuti proses yang terjadi. Menggali informasi ilmiah dan mencari sumber daya lain yang diperlukan sebelum melangkah lebih lanjut.
8. Untuk mengimplementasikan kesepakatan, maka pertama fokus pada penyusunan kesepakatan, membuat indikator untuk keberhasilannya, menyusun struktur implementasinya, serta menyusun agenda pertemuan untuk memonitor implementasi kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang dihasilkan untuk pengelolaan sampah tersebut harus difahami dan dapat diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan.

Langkah-langkah tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kondisi di lapangan. Perubahan dan penyesuaian akan terjadi tergantung dari dinamika yang terjadi. Perencana tidak hanya memahami secara proses perencanaan, tetapi karakteristik dan kebiasaan masyarakat yang dan pihak-pihak lain yang terlibat. Untuk masyarakat Indonesia yang masih belajar melaksanakan demokrasi, melakukan proses kolaborasi tentu bukan suatu hal yang mudah. Peran kepemimpinan yang mampu menggerakkan masyarakat sangat penting. Selanjutnya, Brand dan Graffikin (2007), berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa pada lingkungan yang tidak kolaborasi (dengan kehidupan demokrasi yang rendah dalam sistem politiknya dimana situasi sosial didepolitisasi dan marketised), pendekatan yang dilakukan

menegaskan politik keterhubungan (connectivity) dan keakraban (propinquity). Dengan demikian, pada masyarakat non-collaboratif, daripada berupaya mentransfer pengetahuan melalui advokasi lebih baik berupaya untuk bertukar pengetahuan dalam pluralism secara cerdas, melalui persuasi bukan pemaksaan. Secara metodologi, para perencana saat ini seyogyanya tidak hanya memfasilitasi dan memediasi keterlibatan secara aktif, tetapi juga memiliki keahlian dalam menafsirkan untuk selanjutnya melakukan analisis.

Aspek-aspek Perencanaan Lingkungan

Mumford (1954) menjelaskan bahwa tujuan dari perencanaan skala lingkungan tidak hanya sebatas perencanaan fisik saja akan tetapi juga untuk menemukan kembali rasa intim (sense of intimacy) dan kedekatan seseorang (sense of innerness) dengan lingkungan tempat dimana mereka hidup. Mumford menilai bahwa selama ini keintiman dan kedekatan seseorang dengan lingkungan tempat dimana dia hidup ini semakin sirna karena meningkatnya kegiatan skala kota dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi transportasi. Kemajuan ini telah memberikan kecepatan barang dan orang untuk melakukan perpindahan semakin tinggi dan bahkan dengan skala jangkauan yang lebih luas.

Selanjutnya Rohe (2009) menambahkan bahwa satu hal penting yang membedakan perencanaan skala lingkungan dengan skala kota (city planning) adalah melalui perencanaan skala lingkungan (planning at the neighborhood scale) diharapkan dapat ditangani berbagai issue secara lebih luas yang sedang dihadapi di kota-kota baik lokal, propinsi, nasional bahkan international seperti:

segregasi sosial, kriminalitas, kemiskinan, apatisme politik dan persepsi tidak berdaya, diskriminasi ekonomi dan penurunan kualitas lingkungan. Usaha-usaha perencanaan lingkungan itu jauh di luar hanya sebatas usaha mewujudkan perancangan desain fisik atau pengembangan estetika semata akan tetapi lebih jauh dari itu dia sekaligus bertujuan untuk mewujudkan kepentingan sosial secara lebih luas (Rohe, 2009) seperti: penciptaan komunitas sosial yang sehat, memberdayakan komunitas bermukim, mengembangkan ekonomi masyarakat di dalam suatu lingkungan, atau pelestarian kualitas lingkungan dan semua itu dicapai melalui perubahan lingkungan fisik yang dapat berimplikasi pada proses-proses politik dan sosial (good governance). Tentu saja usaha-usaha perencanaan lingkungan yang sangat ambisius dan luar biasa ini haruslah dijalankan dalam prinsip-prinsip yang rendah hati dan penuh kesabaran.

Aktifitas-aktifitas dan Proses Perencanaan Lingkungan

Perencanaan pada hakekatnya adalah suatu proses terus menerus (continuous) dan berulang (cyclical) di dalam mengambil suatu keputusan yang terbaik. Dalam rangka mencapai keputusan yang "terbaik" maka dia harus rasional yang tercermin dari rangkaian aktifitas-aktifitas yang dikelompokkan ke dalam tahapan-tahapan yang saling terkait, sistematis dan teratur (Conyers & Hills, 1984, p. 67). Keputusan yang rasional tersebut baik ditinjau dari sisi "proses" ataupun "hasil" diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan sesuatu yang maksimum dengan usaha (in put) tertentu. Ditinjau dari sisi hasil rasionalitas diartikan dengan

masuk (input) usaha yang seminimal mungkin untuk mendapatkan keluaran (output) semaksimal mungkin. Adapun dari sisi proses pendekatan rasionalitas di dalam pembuatan keputusan dijelaskan oleh Carley dalam Conyer dan Hills (1984) melalui serangkaian urutan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Menemukan dan merumuskan masalah (problem identification and definition)
2. Mengelompokkan dan mengorganisasikan tujuan-tujuan (goals), nilai-nilai (values), dan sasaran-sasaran (objectives) yang terkait dengan masalah
3. Menemukenali berbagai alternatif tindakan (alternative courses of action) untuk menjawab masalah atau mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan
4. Memperkirakan berbagai dampak sebagai akibat (consequencies) dari masing-masing alternatif tindakan dan kemungkinan dari hal itu akan terjadi
5. Membandingkan dari akibat-akibat yang akan terjadi dari pilihan-pilihan tindakan dalam kaitan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
6. Memilih suatu tindakan yang berakibat paling dekat dengan tujuan dan sasaran atau yang paling dapat menjawab masalah. Tentu saja pilihan tersebut juga yang paling menguntungkan: yang bisa dilihat dari sisi hasil yang lebih baik dari keluaran biaya yang sama atau dari sisi hasil yang sama dari pengeluaran biaya yang paling ringan (kecil)

Dalam kaitan dengan perencanaan lingkungan Burkholder, Chupp, & Star (2003) menekankan sisi lain dari proses rasional di

atas bahwa perencanaan lingkungan merupakan sebuah proses pembelajaran sosial (social learning process) dimana warga (penduduk) dan pemangku kepentingan lainnya belajar bersama tentang lingkungan mereka, merumuskan visi bersama, dan mengembangkan strategi-strategi untuk mewujudkan hal itu dan menjaga keberlanjutannya dalam waktu yang lama atau jangka panjang (long term strategic planning). Adapun secara fisik, produk dari kegiatan perencanaan tersebut adalah pada akhirnya menghasilkan sebuah Dokumen Rencana (plan) yang selanjutnya menjadi acuan bersama dalam mendorong dan mengarahkan investasi sosial dan ekonomi di masa yang akan datang. Tentu saja secara umum tujuan yang diharapkan adalah menuju pembangunan lingkungan yang lebih sehat, asri, serasi, produktif, berkelanjutan dan sebagainya.

Sebagai suatu proses pembelajaran bersama (social learning process) maka dia harus dilakukan secara partisipatif. Pengertian partisipasi sendiri memiliki banyak perspektif. Partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari dua sudut pandang (Abers, 2000) pemberdayaan masyarakat (people empowerment) dan dari sudut pandang instrumen (instrumental participation). Dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat partisipasi dilihat sebagai proses politik yang pada akhirnya dapat membuka akses masyarakat dalam pengambilan keputusan atau memperkuat posisi masyarakat agar dapat memiliki kekuatan (*borgeinig power*) yang seimbang dengan pemangku kepentingan yang lain untuk ikut serta di dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan sudut pandang instrumen pemahaman partisipasi diletakkan pada pelibatan masyarakat

sebagai pengguna akhir (end user) untuk ikut berkontribusi dalam proses pembangunan artinya masyarakat pengguna akhir yang berkepentingan akan bahu membahu menggali dan memobilisasi segala sumber daya yang dimilikinya untuk membantu mewujudkan tujuan pembangunan atau memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya.

Dari uraian dua pandangan di atas Manaf (2007) berpendapat bahwa salah satu ciri atau prinsip pokok dari pendekatan partisipatif adalah pemberian wewenang yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pengguna akhir (*end user*) untuk mengelola sumber daya (*resources*) pembangunan yang tersedia secara lebih mandiri (*autonomous*).

Perencanaan Top Down dan Bottow Up for Environment

Idealnya, untuk menjaga keberlanjutan ruang untuk hidup (life space) bagi masyarakat suatu kota maka pola pemanfaatan ruang harus direncanakan dan dikelola secara sistemik, menyeluruh, hierarkis, dan organis (Ernawi, 2010). Namun demikian bila pemikiran normatif ini diterapkan maka pendekatan perencanaan yang bersifat terpusat (top down) akan lebih dikedepankan. Padahal telah banyak akademisi yang mengkritik pemikiran dan pendekatan perencanaan dari atas (top down) ini. Mereka menilai produk-produk perencanaan yang dihasilkan dengan pendekatan ini kurang relevan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah para perencana sering kali kurang memperhatikan suatu kenyataan bahwa rencana yang disusun pada umumnya tidak berada di ruang yang kosong akan

tetapi sebagian besar sudah terbangun dan memiliki karakteristik dan identitas lokal yang unik (Soerjodibroto, 2007).

Sebagai antitesis dari pendekatan dari atas tersebut mereka menyarankan bahwa kegiatan perencanaan di era masyarakat yang semakin tersegregasi seperti saat ini perlu ditempuh pendekatan-pendekatan yang lebih dialogis, kollaboratif, partisipatif dan inklusif (Abbott, 1996; Day & Parnell, 2003; Healey, 2006; Sirianni, 2007). Bila perlu basis perencanaan ditempatkan di tingkat paling bawah yaitu pada tingkat lingkungan bertetangga (neighborhood) yang berkaitan langsung dengan realitas keseharian kehidupan masyarakat (James, 2009; Jones, 1990; Rohe, 2009).

7.4 Pembahasan

Perencanaan Sektor Lingkungan Berbasis Partisipasi Masyarakat

Perencanaan lingkungan (Desain for Environment) adalah pendekatan sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi dampak lingkungan dari produk dan proses-prosesnya, dan dampaknya pada kesehatan manusia dan lingkungan (Fiksel, 1996). Fokus utama adalah identifikasi kandungan dan implikasi lingkungannya, menentukan dampak yang dipunyai produk dan proses pada lingkungan selama siklus hidupnya, dan pengembangan produk dan proses yang cocok secara lingkungan.

Tujuan program perencanaan Lingkungan adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi pekerja, masyarakat, dan ekosistem. Program DFE memenuhi tujuan ini dengan mempromosikan perubahan sistem dalam cara perusahaan mengelola perhatian lingkungannya. Pendekatan dan prinsip-

prinsipnya program DFE berguna dalam memenuhi kebutuhan peraturan dan memperbesar perlindungan lingkungan setelah pemenuhan.

Prinsip-prinsip utama DFE meliputi :

1. Memperbaiki keselamatan pekerja, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan sementara juga menjaga atau memperbaiki kinerja dan kualitas produk. Cara lain meletakkan hal ini adalah mengurangi resiko pada pekerja, masyarakat, dan lingkungan.
2. Menggunakan sumberdaya secara bijaksana.
3. Menggabungkan pertimbangan lingkungan kedalam disain dan redisain produk, proses,, dan teknis sistem manajemen.

Identifikasi Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan diartikan sebagai bagian dari kegiatan yang berinteraksi dengan lingkungan sedangkan dampak adalah akibat dari suatu aspek. Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat antara aspek dan dampak lingkungan. Hasil identifikasi merupakan suatu daftar aspek lingkungan dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aspek lingkungan. Selayaknya daftar aspek lingkungan ini harus memuat keseluruhan aspek lingkungan secara lengkap baik dalam kondisi normal, abnormal dan darurat, seluruh komponen lokasi seperti bagian produksi, gedung perkantoran, gudang yang terletak diluar pagar,. kondisi darurat adalah kondisi diluar normal yang memberikan dampak seketika besar dan tidak dapat dicegah kecuali mengurangi dampak setelah terjadi. Sedangkan kondisi abnormal merupakan kondisi di luar kondisi

normal yang sudah diperkirakan dan terkendali.

Identifikasi harus dilakukan tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan di dalam areal perusahaan dan terkait dengan sumber limbah terbesar semata, tetapi menjangkau kepada aspek dari produk atau jasa. aspek dari produk memiliki cakupan yang lebih luas seperti tinjauan terhadap produk ketika disimpan di gudang, pemuatan produk/bahan baku ke alat transportasi, selama pengangkutan dan ketika digunakan oleh konsumen. Contoh paling ilustratif adalah produk penyulingan minyak mentah menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Ketika pengangkutan terdapat aspek potensi tumpahan dan ledakan; ceceran ketika bongkar muat dan emisi gas-gas hasil pembakaran termasuk yang bersifat beracun (PB) ketika dikonsumsi dalam kendaraan bermotor. Berbagai macam dampak jelas ditimbulkan dari aspek-aspek tersebut dan memiliki kategori yang berat.

Identifikasi dampak lingkungan merupakan pondasi dari sistem manajemen lingkungan dimana kelengkapan dari sistem, kesesuaian lingkup dan prioritas pekerjaan dihasilkan dari elemen Standar ini. Keberhasilan sistem sangat tergantung pada pemahaman yang baik terhadap aspek/dampak lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Hal yang perlu ditumbuhkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah timbulnya kesadaran bahwa, mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya. Kemudian, berdaya

yaitu mampu melakukan tuntutan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya, mandiri dalam kemampuan berkehendak menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya. Dan, secara aktif tidak saja memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat secara terus menerus, tetapi juga melakukan inisiatif lokal.

Demikian pula halnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan dan peran berbagai kelompok/organisasi masyarakat dalam penyaluran aspirasi masyarakat ke DPRD melalui mekanisme demokrasi telah menciptakan suatu momentum menuju suatu rasa memiliki dan berkehendak serta berkelanjutan bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan perwujudan good environmental governance

Ada beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk memberdayakan masyarakat mengelola lingkungannya :

1. Mengembangkan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mampu menyampaikan pesan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungannya.
2. Mengembangkan kerjasama yang intensif dengan media massa dalam hal sosialisasi dan pemberitaan mengenai peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
3. Memberikan apresiasi terhadap kelompok masyarakat yang

berhasil mengelola lingkungannya.

4. Pengintegrasian aliansi mitra strategis ke dalam program lingkungan dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan peran kelompok masyarakat secara aktif. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan dukungan dan pengakuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai potensi tawar (*bargaining power*) dalam hal isu lingkungan.

Tapi yang terpenting dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan adalah masyarakat sadar sebagai bagian dari lingkungan dimana ia berada, tumbuhnya kearifan lokal dalam mengelola lingkungan.

Evaluasi Lingkungan

Setelah jelas dengan lingkup identifikasi dan kemudian di implementasikan, organisasi harus melakukan evaluasi terhadap keseluruhan aspek tersebut untuk menentukan aspek-aspek yang dikategorikan sebagai aspek penting atau yang akan mendapatkan prioritas penanganannya (berdasarkan dari kajian resikonya). Standar tidak mensyaratkan suatu metoda evaluasi tertentu, termasuk apakah harus dengan metoda kualitatif atau kuantitatif. Tetapi yang perlu dibuat adalah suatu metoda evaluasi yang sesuai dengan tingkat kerumitan kegiatan organisasi itu sendiri. Parameter-parameter evaluasi yang dapat digunakan antara lain:

- a. Frekuensi aspek atau dampak,
Menggambarkan seberapa sering dampak tersebut akan muncul dengan penjelasan bahwa semakin sering suatu dampak dilepaskan semakin penting dampak tersebut.

Dampak yang muncul pada kondisi normal memiliki frekuensi lebih besar dari dampak dalam kondisi abnormal atau darurat.

b. Tingkat bahaya dampak.

Berdasarkan karakteristik dampak maka dapat diketahui bahwa suatu dampak dikategorikan sebagai berbahaya (limbah asam sulfat), sedikit berbahaya (limbah organik kandungan tinggi) atau tidak berbahaya (limbah cair berkonsentrasi rendah). Karakter bahan atau limbah dapat dipelajari dari MSDS atau hasil analisa kimia.

c. Luas sebaran dampak.

Seberapa luas dan banyak komponen lingkungan akan terkena. Secara mudah dikatakan bahwa dampak dari emisi gas memiliki potensi untuk mendapatkan nilai tinggi karena dari sifat gas-nya, dampak atau pencemaran yang ditimbulkan bisa mencapai dalam radius lokal (beberapa km dari lokasi perusahaan), regional (hujan asam di kawasan asia, misalnya) atau global (pemanasan global, perusakan lapisan ozon). Berbeda dengan dampak dari limbah padat karena sifat fasanya, yang terbatas pada jangkauan lokal (propinsi) atau mungkin nasional.

d. Dampak kepada masyarakat.

Parameter ini mewakili unsur ketidakpastian yang dimiliki publik terhadap suatu dampak, yang umumnya muncul berdasarkan persepsi yang tumbuh pada masyarakat tersebut. Limbah gas berupa bau (pengolahan karet atau pulp) biasanya menimbulkan penilaian yang negatif

dibandingkan gas lain yang relatif tidak berbau tetapi sebenarnya memberikan ancaman dampak pengurangan kesehatan lebih besar (contoh, uap amoniak dari pabrik pupuk atau emisi gas dari kendaraan bermotor). Jadi perusahaan harus mengkaji persepsi yang berkembang di masyarakat sekitar dan memberikan penilaian yang jujur kepada dampak tersebut.

e. Biaya.

Berapa biaya yang diperlukan untuk memulihkan dampak tersebut jika suatu pencemaran atau perusakan lingkungan terjadi. Semakin besar dana yang diperlukan semakin penting aspek lingkungan tersebut. Contoh, biaya untuk membangun IPAL agar buangan limbah cair di bawah baku mutu membutuhkan dana lebih besar dari biaya untuk menyediakan ember-ember penampung tetesan limbah cair karena bocor.

Memahami Masalah Dalam Merencanakan Lingkungan

Kesadaran tiap individu dalam masyarakat, mengenai pengelolaan lingkungan yang sehat dan menguntungkan generasi dari generasi dalam pemanfaatan potensi alam yang begitu melimpah di Indonesia ini amatlah di perlukan. Dalam pengelolaan lingkungan yang sehat dan berorientasi kepada pengelolaan lingkungan yang konservatif, artinya memanfaatkan lingkungan sekitar untuk kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang selanjutnya.

Kesadaran terhadap lingkungan yang minim sekarang ini,

lebih disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya memiliki lingkungan yang sehat, bersih, indah dan nyaman. Agar tercipta kehidupan masyarakat yang sehat, teratur, dan memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan yang ada sehingga menjadikannya lebih peduli terhadap lingkungan yang ia tempati

Sekarang ini keadaan lingkungan sudah tidak seperti yang dulu, kita bisa melihat betapa kompleknya permasalahan pencemaran lingkungan ini, karena lingkungan merupakan sesuatu yang esensial bagi manusia, tanpa lingkungan manusia tidak bisa hidup jangankan tanpa lingkungan dengan lingkungan saja tapi yang sudah tercemar dengan segala macam bahan kimia yang dapat menghambat pertumbuhan manusia secara normal saja manusia sudah kerepotan dalam artian manusia membutuhkan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman. Bukan hanya sekedar lingkungan yang dapat ditempati tapi lebih dari pada itu.

Solusi Bagaimana Harus Diterapkan

1. Mengenai penegakkan hukum lingkungan yang tidak maksimal itu lebih disebabkan karena minimnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan- permasalahan yang timbul di masyarakat mengenai penegakkan hukum lingkungan. Hal itu bisa kita lihat dari pengelolaan sampah di tiap kota/kabupaten yang belum maksimal.
2. Masalah pencemaran lingkungan ini adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah atau yang berkepentingan didalamnya akan pentingnya pengelolaan

lingkungan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan artinya masyarakat yang ada di setiap wilayah di manapun di Indonesia ini atau di belahhan bumi manapun juga, masyarakat hendaknya memiliki pemahaman dan memiliki wawasan tentang lingkungan hidup sebagai upaya untuk menjamin kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang.

Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan

Jumlah kerusakan flora dan fauna akan terus bertambah dan berlangsung lama jika dalam penggunaannya masyarakat tidak memperhatikan keseimbangan terhadap ekosistem lingkungan. Kerusakan ekosistem membawa dampak bukan hanya pada keanekaragaman terhadap flora dan fauna, tetapi juga dapat membawa pengaruh lain terhadap masyarakat itu sendiri seperti longsor, banjir, dan erosi.

Dalam lingkungan hidup di Indonesia, banyak terjadi permasalahan di sungai, laut, tanah dan hutan yaitu sebagai berikut:

1. Pencemaran sungai dan laut

Sungai dan laut dapat tercemar karena kegiatan manusia seperti pembuangan limbah cair, pembuangan limbah logam, sampah, dll. Secara biologis, fisik, dan kimia, senyawa maupun unsur tersebut sulit bahkan tidak dapat diuraikan. Oleh karena itu semua hal tersebut dapat mencemari lingkungan.

2. Pencemaran Tanah

Tanah dapat tercemar karena penggunaan pupuk dan bahan

pestisida yang berlebihan. Pencemaran tanah terlihat dari tanah yang mengalami perubahan menjadi kering dan keras. Hal ini disebabkan oleh jumlah kandungan garam yang sangat besar pada tanah. Selain itu, pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh sampah plastik karena pada umumnya sampah plastik tidak mengalami proses penguraian secara sempurna.

3. Pencemaran Hutan

Hutan juga bisa mengalami kerusakan apabila pemanfaatannya tidak dilakukan dengan baik. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Salah satu contoh pencemaran atau kerusakan hutan adalah adanya penebangan secara liar. Jika kegiatan tersebut dilakukan dalam jangka panjang maka dapat mengakibatkan gundulnya hutan.

Kerusakan lingkungan hidup oleh alam dapat juga terjadi karena adanya gejala atau peristiwa alam yang terjadi sehingga memengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Peristiwa alam yang dapat memengaruhi kerusakan lingkungan meliputi:

4. Kerusakan Akibat Peristiwa Alam Letusan gunung berapi

Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma di perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat keluar melalui puncak gunung berapi. Bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi antara lain berupa:

- 1) Hujan abu vulkanik, menyebabkan gangguan pernafasan.
- 2) Lava panas, merusak, dan mematikan apa pun yang dilalui.
- 3) Awan panas, dapat mematikan makhluk hidup yang dilalui.
- 4) Gas yang mengandung racun.
- 5) Material padat (batuan, kerikil, pasir) yang dapat menimpa

perumahan, dan lain-lain.

Kerusakan Akibat Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa hal, di antaranya kegiatan magma (aktivitas gunung berapi), terjadinya tanah turun, maupun karena gerakan lempeng di dasar samudra. Manusia dapat mengukur intensitas gempa, namun tidak dapat memprediksikan kapan terjadinya gempa. Oleh karena itu, bahaya yang ditimbulkan oleh gempa lebih dahsyat dibandingkan dengan letusan gunung berapi. Pada saat gempa berlangsung terjadi beberapa peristiwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung, di antaranya:

- 1) Bangunan roboh.
- 2) Tanah di permukaan bumi retak, jalan menjadi putus.
- 3) Terjadi banjir, akibat rusaknya tanggul.
- 4) Tanah longsor akibat guncangan.
- 5) Gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami (gelombang pasang).

Kerusakan Akibat Siklon (topan)

Angin topan terjadi akibat aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju ke kawasan bertekanan rendah. Perbedaan tekanan udara ini terjadi karena perbedaan suhu udara yang mencolok. Bahaya angin topan bisa diprediksi melalui foto satelit yang menggambarkan keadaan atmosfer bumi, termasuk gambar terbentuknya angin topan, arah, dan kecepatannya. Serangan angin topan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk:

- 1) Merobohkan bangunan.

- 2) Membahayakan penerbangan.
- 3) Rusaknya areal pertanian dan perkebunan.
- 4) Menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal.

Musim Kemarau Panjang

Bencana ini terjadi karena adanya penyimpangan iklim yang terjadi di suatu daerah sehingga musim kemarau terjadi lebih lama dari biasanya. Bencana ini menimbulkan berbagai kerugian, seperti munculnya titik api penyebab kebakaran hutan, mengeringnya sumber-sumber air, dan gagalnya berbagai upaya pertanian petani serta banyaknya tumbuhan yang mati sehingga dapat mengancam kehidupan makhluk hidup lainnya.

Erosi dan Abrasi

Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan (sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya) akibat transportasi angin, air atau es. Dampak dari erosi adalah menipisnya lapisan permukaan tanah bagian atas, yang akan menyebabkan menurunnya kemampuan lahan (degradasi lahan). Akibat lain dari erosi adalah menurunnya kemampuan tanah untuk meresapkan air (infiltrasi). Penurunan kemampuan lahan meresapkan air ke dalam lapisan tanah akan meningkatkan limpasan air permukaan yang akan mengakibatkan banjir di sungai.

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut.

Dampak negatif yang diakibatkan oleh abrasi antara lain: Penyusutan lebar pantai sehingga menyempitnya lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai, Kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai, karena terpaan ombak yang didorong angin kencang begitu besar, Kehilangan tempat berkumpulnya ikan ikan perairan pantai karena terkikisnya hutan bakau

5. Kerusakan Akibat Ulah Manusia

Manusia sebagai penguasa dan pengelola lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal, mampu merubah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun seringkali yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan untuk kehidupan generasi berikutnya.

Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain:

- a) Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri.
- b) Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.
- c) Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:
- d) Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan).

- e) Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS).
- f) Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas.
- g) Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman.
- h) Pembuangan sampah di sembarang tempat.

Perencanaan Sektor Lingkungan Berbasis Mitigasi Bencana

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan hasil KTT Bumi di Rio de Jeniro tahun 1992. Di dalamnya terkandung 2 gagasan penting, yaitu:

1. Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup.
2. Gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Upaya yang dilakukan untuk memelihara lingkungan hidup diantaranya adalah:

Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam

upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan pemerintah antara lain:

- a) Memberlakukan Peraturan Pemerintah tentang AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).
- b) Menerbitkan UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Mengeluarkan UU yang mengatur tentang Tata Guna Tanah.
- d) Pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan, dengan tujuan pokoknya:
 - 1) Menanggulangi kasus pencemaran.
 - 2) Mengawasi bahan berbahaya dan beracun (B3).
 - 3) Melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup oleh Masyarakat

Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

a. Pelestarian Tanah

Bencana tanah longsor dan banjir yang terjadi menunjukkan peristiwa yang berkaitan dengan masalah tanah. Banjir dapat menyebabkan terkikisnya lapisan tanah oleh aliran air yang disebut erosi yang berdampak pada hilangnya kesuburan tanah serta terkikisnya lapisan tanah dari permukaan bumi. Tanah longsor disebabkan karena tak ada lagi unsur yang menahan lapisan tanah

pada tempatnya sehingga menimbulkan kerusakan. Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara menggalakkan kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali (reboisasi) terhadap tanah yang semula gundul. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang posisi tanahnya miring perlu dibangun terasering atau sengkedan, sehingga mampu menghambat laju aliran air hujan.

b. Pelestarian Udara

Udara merupakan unsur vital bagi kehidupan, karena setiap makhluk hidup bernapas memerlukan udara. Di dalam udara terkandung beranekaragam gas, salah satunya oksigen. Udara yang kotor karena debu atau pun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang. Keadaan ini sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup setiap organisme. Maka perlu diupayakan kiat-kiat untuk menjaga kesegaran udara lingkungan agar tetap bersih, segar, dan sehat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat antara lain:

Menggalakkan penanaman pohon atau pun tanaman hias di sekitar kita

Tanaman dapat menyerap gas-gas yang membahayakan bagi manusia. Tanaman mampu memproduksi oksigen melalui proses fotosintesis. Rusaknya hutan menyebabkan jutaan tanaman lenyap sehingga produksi oksigen jauh berkurang, di samping itu tumbuhan juga mengeluarkan uap air, sehingga kelembapan udara tidak lagi terjaga dengan alami.

Mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin

Asap yang keluar dari knalpot kendaraan dan cerobong asap merupakan penyumbang terbesar kotornya udara di perkotaan dan kawasan industri. Salah satu upaya pengurangan emisi gas berbahaya ke udara adalah dengan menggunakan bahan industri yang aman bagi lingkungan, serta pemasangan filter pada cerobong asap pabrik.

Mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer

Gas freon yang digunakan untuk pendingin pada AC maupun kulkas serta dipergunakan di berbagai produk kosmetika, adalah gas yang dapat bersenyawa dengan gas ozon, sehingga mengakibatkan lapisan ozon menyusut. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer yang berperan sebagai filter bagi bumi, karena mampu memantulkan kembali sinar ultraviolet ke luar angkasa yang dipancarkan oleh matahari. Sinar ultraviolet yang berlebihan akan merusakkan jaringan kulit dan menyebabkan meningkatnya suhu udara. Pemanasan global terjadi di antaranya karena makin menipisnya lapisan ozon di atmosfer.

c. Pelestarian Hutan

Eksplorasi hutan yang terus menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Pembalakan liar yang

dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Selain menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, hutan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan antara lain:

- 1) Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.
- 2) Melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang.
- 3) Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.
- 4) Menerapkan sistem tebang–tanam dalam kegiatan penebangan hutan.
- 5) Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.

d. Pelestarian Laut dan Pantai

Selain hutan, laut juga sebagai sumber daya alam potensial. Kerusakan biota laut dan pantai banyak disebabkan karena ulah manusia. Pengambilan pasir pantai, terumbu karang di laut, pengrusakan hutan bakau, merupakan kegiatan-kegiatan manusia yang mengancam kelestarian laut dan pantai. Terjadinya abrasi yang mengancam kelestarian pantai disebabkan telah hilangnya hutan bakau di sekitar pantai yang merupakan pelindung alami terhadap gempuran ombak. Upaya untuk melestarikan laut dan pantai dapat dilakukan dengan:

- a) Melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di areal sekitar pantai.
- b) Melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar

pantai maupun di dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut.

- c) Melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia dalam mencari ikan.
- d) Melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan.

e. Pelestarian Flora dan Fauna.

Kehidupan di bumi merupakan sistem ketergantungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya. Terputusnya salah satu mata rantai dari sistem tersebut akan mengakibatkan gangguan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kelestarian flora dan fauna merupakan hal yang mutlak diperhatikan demi kelangsungan hidup manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna di antaranya adalah:

- a) Mendirikan cagar alam dan suaka margasatwa.
- b) Melarang kegiatan perburuan liar
- c) Menggalakkan kegiatan penghijauan

7.5 Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah di jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan sektor lingkungan dengan mengedepankan prinsip partisipasi menjadi salah satu solusi yang dapat di tempuh dalam melakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang bisa muncul dari kondisi lingkungan. Dengan kata lain bahwa:

1. Perencanaan sektor lingkungan berbasis partisipatif merupakan pola perencanaan yang secara langsung

melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dengan tetap mendudukan komunitas/masyarakat pemanfaat sebagai pelaku utama.

2. Perencanaan sektor lingkungan bertujuan untuk mencegah keselarasan lingkungan dengan aktifitas ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Sehingga pada prakteknya hal ini bisa dilakukan dengan upaya preventif baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok non governmental organization (NGO) serta kelompok *civil society*.

BAB VIII

ISU PERENCANAAN ASPEK SOSIAL

8.1 Latar Belakang

Permasalahan stunting (gagal tumbuh) masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Balita (SSGB) pada tahun 2019, prevalensi stunting Indonesia tercatat sebesar 27,67 persen. Angka itu masih di atas standar yang ditetapkan oleh WHO bahwa prevalensi stunting di suatu negara tak boleh melebihi 20 persen.

Stunting (balita pendek) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Tinggi Badan per Umur (TB/U) atau Panjang Badan per Umur (PB/U) dimana balita tersebut tinggi badannya berada dibawah standar antropometri penilaian status gizi anak. Stunting merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, sejak dalam kandungan hingga 1.000 hari pertama kelahiran (HPK), sejak itulah merupakan jendela kehidupan yang sangat penting terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, menghambat perkembangan kognitif dan motorik, serta dapat menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang.

Persoalan stunting ini tidak hanya banyak terjadi di daerah pedesaan ataupun wilayah yang terisolasi, namun di daerah perkotaan

pun kasusnya tidaklah sedikit. Seperti halnya di Kota Banjarmasin, stunting masih menjadi ancaman serius. Meminjam data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, saat ini, angka stunting di Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini, mencapai 27,8 persen, atau di urutan nomor sembilan dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Tabalong dengan angka 28,2 persen.

Kasus stunting di Kota Banjarmasin tersebar di 3 (tiga) kecamatan dari 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin, yaitu di Kecamatan Banjarmasin Timur ada 4 kelurahan yang masuk zona merah stunting (Kelurahan Sungai Bilu, Kelurahan Sungai Lulut, Kelurahan Karang Mekar dan Kelurahan Benua Anyar), di Kecamatan Banjarmasin Selatan ada 6 kelurahan yang masuk zona merah stunting (Kelurahan Kelayan Selatan, Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Pemurus Baru, Kelurahan Pemurus Dalam, Kelurahan Tanjung Pagar dan Kelurahan Mantuil) dan di Kecamatan Banjarmasin Tengah ada 1 kelurahan yang masuk zona merah stunting, yaitu di Kelurahan Teluk Dalam (Dinkes Kota Banjarmasin, 2022). Dilihat dari segi aksesibilitas kelurahan yang masuk zona merah relatif terjangkau, namun yang menarik bahwa sebagian kelurahan itu adalah berada di bantaran sungai, daerah pinggiran/perbatasan serta sebagian merupakan kelurahan-kelurahan yang memiliki keluarga miskin yang relatif banyak.

Hal ini tentu menimbulkan dugaan-dugaan bahwa apakah kasus stunting ini ada disebabkan Karena persoalan gizi semata ? Ataukah ada faktor sosial yang lebih mendasar, seperti halnya persoalan yang menyangkut latar belakang keluarga dan lingkungannya sehingga menyebabkan balitanya menjadi stunting. Ataukah persoalan ini

muncul sebagai bagian dari kurang efektifnya program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat ataupun keluarga stunting? Inilah urgensi tulisan ini.

Salah satu hal yang penting dalam pemberdayaan, adalah bahwa pemberdayaan itu tidak hanya dilakukan dengan pendekatan top down saja, melainkan juga harus melibatkan secara pro aktif masyarakat (keluarga) yang menjadi sasaran program/kebijakan. Program/kebijakan itu sendiri juga menyesuaikan dengan kondisi ataupun persoalan-persoalan sosial budaya yang terjadi pada keluarga/masyarakat setempat. Termasuk di dalamnya perlu dieksplor konstruksi sosial pada keluarga stunting di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan Data dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tahun 2022 menyatakan bahwa dari 26 puskesmas di wilayah Kota Banjarmasin, Puskesmas Pekauman merupakan puskesmas dengan angka tertinggi balita yang mengalami stunting sebanyak 1.099 yang terdiri dari balita yang berstatus gizi sangat pendek sebanyak 276 dan pendek sebanyak 823. Puskesmas Pekauman berada pada wilayah kerja 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Kelayan Selatan, Kelurahan Barat dan Kelurahan Mantuil.

Semua data tersebut menunjukkan bahwa data kejadian stunting pada balita masih tinggi dan masalah stunting di wilayah kerja Puskesmas Pekauman termasuk tertinggi diantara 26 Puskesmas di Kota Banjarmasin.

8.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Apa saja faktor determinan terjadinya balita stunting di wilayah Kerja Puskesmas Pekauman Banjarmasin ?
2. Bagaimana perencanaan sosial yang perlu dirancang pada keluarga stunting di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin ?

8.3 Tinjauan Pustaka

8.3.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani, Malisa (2018) dengan judul “Determinan Penyebab Kejadian Stunting Pada Balita: Tinjauan Literatur ditemukan bahwa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stunting pada balita diantaranya pendidikan ibu yang rendah dan pengetahuan ibu yang kurang pemahaman pemenuhan asupan nutrisi pada anak, tidak diberikan ASI eksklusif, pemberian MPASI yang tidak sesuai umur, riwayat BBLR, riwayat penyakit infeksi seperti penyakit ISPA dan diare berulang, sanitasi lingkungan yang buruk, dan status sosial ekonomi keluarga yang rendah dalam pemenuhan nutrisi pada anak. Pada tulisan ini kurang terinci apa yang dimaksud dengan status sosial ekonomi keluarga yang rendah tersebut?

Berdasarkan data *Joint Child Malnutrition Estimates* tahun 2018, negara dengan pendapatan menengah ke atas mampu menurunkan angka stunting hingga 64%, sedangkan pada Negara menengah ke bawah hanya menurunkan sekitar 24% dari tahun 2000 hingga 2017. Pada Negara dengan pendapatan rendah justru mengalami peningkatan pada tahun 2017 (Pusdatin Kemenkes RI, 2018).

Penelitian *Mustikaningrum* dkk (2016) dengan judul “Determinan Kejadian Stunting pada Bayi Usia 6 Bulan di Kota

Semarang” menyatakan bahwa proporsi responden yang mempunyai pendapatan rendah dan stunting sebesar 76,9% sedangkan proporsi responden yang mempunyai pendapatan cukup dan stunting sebesar 23,1%, dengan *p-value* 0,001, berarti adanya hubungan antara tingkat ekonomi keluarga dengan kejadian stunting pada bayi usia 6 bulan di kota Semarang. Nilai OR didapatkan sebesar 6,14 (3,20-11,77) yang artinya responden yang mempunyai pendapatan rendah berpeluang risiko 6,14 kali lebih besar terjadinya stunting pada bayi usia 6 bulan di kota Semarang dibandingkan responden yang mempunyai pendapatan cukup.

Penelitian Keino S., Plasqui G (2014) dengan judul *Determinants of Stunting and Overweight among young children and adolescents in sub Saharan Africa* menemukan bahwa “Many studies indicate that male children and those living in a rural setting are more likely to be stunted, whereas overweight among children depends more on age, household composition, occupation of the mother, and the mother's body mass index. Stunting occurred together with overweight among both boys and girls from 1 to 5 years of age. Stunting was more prevalent among boys than among girls. Indicators of socioeconomic status, such as mother's education, mother's occupation, and household income, were some of the determinants directly linked to stunting, whereas environmental factors, such as rural or urban setting and sanitation, influenced both stunting and overweight. Concurrent stunting and overweight is influenced by maternal and household factors, such as maternal height, age, and education, large household size, and lower socioeconomic status. Conclusions. Although socioeconomic, demographic, and environmental factors were

significant in determining stunting and overweight, other factors, such as nutrition and lifestyle, were important risk factors. Stunting in childhood is a risk factor that may result in overweight and obesity later in adolescence and adulthood, indicating the need to screen children below 1 year of age to identify stunting early in life. Promoting exclusive breastfeeding is reported to be important in preventing both stunting and overweight among children. More research is needed to explore the relationship between stunting and overweight and to explore policy guidelines to address the phenomenon”.

8.3.2. Grand Theory : Max Weber

Tradisi Idealisme – Historisisme Jerman

Pemikiran Weber tentang sosiologi terutama dibangun oleh serangkaian debat intelektual (*Methodenstreit*) yang berlangsung di Jerman pada masanya. Yang terpenting dari perdebatan tersebut adalah masalah hubungan sejarah dengan ilmu pengetahuan. Perdebatan ini berlangsung antara kubu positivis yang memandang sejarah tersusun berdasarkan hukum–hukum umum, dengan kubu subjektivis yang mencutkan sejarah menjadi sekedar tindakan dan peristiwa idiosinkratis. Weber menolak kedua kutub ekstrem tersebut dan berusaha mengembangkan cara sendiri untuk menangani sosiologi historis. Menurut Weber, sejarah terdiri dari sejumlah peristiwa empirik unik, tidak mungkin ada generalisasi pada level empiris. Dengan demikian, sosiolog harus memisahkan dunia empiris dari jagat konseptual yang mereka bangun. Konsep ini tidak pernah sepenuhnya mampu memahami dunia empiris, namun dapat digunakan sebagai

perangkat heuristik untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik atas realitas.

Ketika menolak pandangan para ilmuwan Jerman yang saling bertentangan menyangkut soal sejarah, Weber menawarkan perspektifnya sendiri, yang merupakan gabungan antara dua orientasi tadi. Weber merasa sejarah membahas individualitas dan generalitas. Penyatuan dilakukan melalui perkembangan dan pemanfaatan konsep umum dalam studi terhadap individu, peristiwa, atau masyarakat tertentu. Konsep-konsep umum tadi kemudian ditarik untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan individualitas pada setiap perkembangan, karakteristik yang membuat orang melahirkan kesimpulan dengan cara yang berbeda dari orang lain.

Sosiologis Interpretatif (Verstehen)

Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang memiliki kelebihan daripada ilmu alam. Kelebihan tersebut terletak pada kemampuan sosiolog untuk memahami fenomena sosial, sementara ilmu alam tidak dapat memperoleh pemahaman serupa tentang perilaku atom atau ikatan kimia. Kata pemahaman dalam bahasa Jerman adalah *verstehen*. Pemakaian istilah *verstehen* ini secara khusus oleh Weber dalam penelitian historis adalah sumbangan yang paling banyak dikenal, dan paling kontroversial, terhadap metodologi sosiologi kontemporer. Ketika kita mengerti apa yang dimaksud Weber dengan kata *verstehen*, kita akan menggarisbawahi beberapa masalah dalam menafsirkan maksud Weber, muncul dari masalah umum dalam pemikiran metodologis Weber. Seperti dikemukakan Thomas Burger, Weber tidak utuh dan konsisten dengan pernyataan metodologisnya. Ia

cenderung gegabah dan tidak tepat sasaran karena merasa bahwa ia sekedar mengulangi gagasan-gagasannya yang pada zamannya terkenal di kalangan sejarawan Jerman. Terlebih lagi, seperti ditegaskan diatas, Weber tidak terlalu memikirkan refleksi metodologis.

Pemikiran Weber tentang *verstehen* lebih sering ditemukan di kalangan sejarawan Jerman pada zamannya dan berasal dari bidang yang dikenal dengan hermeneutika. Hermeneutika adalah pendekatan khusus terhadap pemahaman dan penafsiran tulisan-tulisan yang dipublikasikan. Tujuannya adalah memahami pemikiran pengarang maupun struktur dasar teks. Weber dan lainnya berusaha memperluas gagasannya dari pemahaman teks kepada pemahaman kehidupan sosial : memahami aktor, interaksi, dan seluruh sejarah manusia. Satu kesalahpahaman yang sering terjadi menyangkut konsep *verstehen* adalah bahwa dia dipahami sekedar sebagai penggunaan intuisi, irasional, dan subyektif. Namun secara kategoris Weber menolak gagasan bahwa *verstehen* hanya melibatkan intuisi, keterlibatan berdasarkan simpati, atau empati. Baginya, *verstehen* melibatkan penelitian sistematis dan ketat dan bukannya hanya sekedar merasakan teks atau fenomena sosial. Dengan kata lain, bagi Weber *verstehen* adalah prosedur studi yang rasional. Sejumlah orang menafsirkan *verstehen*, pernyataan-pernyataan Weber, tampaknya terbukti kuat dari sisi penafsiran level individu terhadap *verstehen*. Namun sejumlah orang juga menafsirkan bahwa *verstehen* yang dinyatakan oleh Weber adalah sebagai teknik yang bertujuan untuk memahami kebudayaan. Seiring dengan hal tersebut, W.G. Runciman (1972) dan Murray Weax (1967) melihat *verstehen* sebagai alat untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa tertentu.

Max Weber juga memasukkan problem pemahaman dalam pendekatan sosiologisnya, yang sebagaimana cenderung ia tekankan adalah salah satu tipe sosiologis dari sekian kemungkinan lain. Karena itulah ia menyebut perspektifnya sebagai sosiologi interpretatif atau pemahaman. Menjadi ciri khas rasional dan positivisnya bahwa ia mentransformasikan konsep tentang pemahaman. Meski begitu baginya pemahaman tetap merupakan sebuah pendekatan unik terhadap moral atau ilmu-ilmu budaya, yang lebih berurusan dengan manusia ketimbang dengan binatang atau kehidupan non hayatilainnya. Manusia bisa memahami atau berusaha memahami niatnya sendiri melalui introspeksi, dan ia bisa menginterpretasikan perbuatan orang lain sehubungan dengan niatan yang mereka akui atau diduga mereka punyai.

Dengan kata lain *verstehen* adalah suatu metode pendekatan yang berusaha untuk mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan historis. Pendekatan ini bertolak dari gagasan bahwa tiap situasi sosial didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh para aktor yang terlibat di dalamnya.

Namun dalam berjalannya waktu teori ini banyak mendapatkan kritikan. Kritik yang berkaitan mengenai metode *verstehen* menganggap Weber terperangkap di antara dua persoalan terkait dengan *verstehen* ini. Di satu sisi, *verstehen* tidak bisa semata-mata berarti intuisi subjektif karena demikian, maka *verstehen* tidak akan ilmiah. Di sisi lain, sosiolog tidak dapat begitu saja menyatakan makna objektif fenomena sosial. Weber menandakan bahwa metode ini terletak di antara dua pilihan, tapi sayangnya dia tidak pernah menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi.

Kausalitas

Yang dimaksud Weber dengan kausalitas adalah kemungkinan suatu peristiwa diikuti atau disertai peserta lainnya. Menurut Weber tidak cukup hanya mencari kejelasan historis, pengulangan, dan kepararelisan, sebagaimana yang dilakukan sejarawan. Namun, penelitian harus melihat alasan, sekaligus makna, perubahan-perubahan historis. Max Weber bekerja dengan pendekatan multikausal dimana “sekumpulan pengaruh interaktif sering kali menjadi faktor kausal efektif”.

Hal yang perlu diingat dalam pemikiran Weber tentang kausalitas adalah keyakinan dia bahwa karena kita dapat memiliki pemahaman khusus tentang kehidupan sosial (*verstehen*), pengetahuan kausal atas ilmu-ilmu sosial berbeda dengan pengetahuan kausal tentang ilmu-ilmu alam.

Istilah kausalitas yang tepat mengadopsi pandangan bahwa hal terbaik yang dapat kita lakukan dalam sosiologi adalah membuat pernyataan probabilistik tentang hubungan antar fenomena sosial. Tujuannya adalah untuk memperkirakan sejauh mana efek tertentu didukung dengan kondisi tertentu. Ringkasan Max Weber membawa dampak positif yang lebih besar pada teori-teori sosiologi ketimbang teoretisi sosiologi lain. Pengaruh ini dapat dilacak pada kecanggihan, kompleksitas, dan kadang-kadang kebingungan terhadap teori Weberian. Karya Weber menyajikan perpaduan antara penelitian sejarah dengan teorisasi sosiologi. Sepanjang karirnya Weber bergerak secara progresif ke arah penyatuan sejarah dengan sosiologi, yaitu ke arah perkembangan sosiologi historis. Salah satu konsep metodologis paling kritis yang dikemukakannya adalah *verstehen*. Walau *verstehen* sering

ditafsirkan sebagai alat untuk menganalisis kesadaran individu, di tangan Weber dia lebih sering menjadi saran teoritis untuk menganalisis hambatan–hambatan struktural dan institusional pada aktor.

Point-Point Kontribusi Pemikiran Max Weber Lainnya

Menurutnya, ilmu sosial itu berbeda dengan ilmu alam, jadi kita tidak bisa menggunakan fenomena menggunakan hukum. Weber menggunakan pendekatan sosiologi menggunakan interpretasi (“tindakan sosial”).

Weber membagi tindakan sosial menjadi empat tipe. *Tipe pertama*, rasional-instrumental, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh rasionalitas sang aktor demi mencapai tujuan tertentu, seperti transaksi ekonomi. *Tipe kedua*, rasional nilai, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu, seperti berdoa bersama yang dilandasi oleh nilai agama. *Tipe ketiga*, afeksi, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh perasaan seorang individu, seperti menangis di pemakaman. *Tipe keempat*, tradisional, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh tradisi, atau dengan kata lain, telah dilakukan berulang-ulang sejak zaman dahulu, seperti mudik.

Selain itu, Max Weber juga menjelaskan bahwa kajian sosiologi tidak hanya pada level makro (masyarakat), tetapi juga bisa dikaji pada level mikro (individu dalam suatu masyarakat). Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu yang ditujukan kepada individu, atau kelompok lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Tujuan utama dari sosiologi — menurut Weber — adalah

memahami secara mendalam (*verstehen*) makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut.

Dalam *The Types of Legitimate Domination*, Weber membahas tentang tiga basis legitimasi seorang pemimpin: rasional, tradisional, dan karismatik. *Basis legitimasi rasional* mengacu pada seperangkat aturan hukum yang telah disepakati; seperti undang-undang pemilihan umum yang mengatur jalannya pemilihan presiden, gubernur, serta anggota dewan. *Basis legitimasi tradisional* mengacu pada kepercayaan terhadap tradisi; seperti tradisi memilih kepala suku berdasarkan garis keturunan. *Basis legitimasi yang kharismatik*, mengacu pada kesucian, kepahlawanan, atau karakter-karakter lain yang membuat seorang individu dinobatkan sebagai seorang pemimpin; contohnya seperti nabi dan pemimpin keagamaan

8.3.3. Teori Middle

Teori-teori berikut menurut penulis sangat relevan untuk mendekati persoalan faktor-faktor determinan yang berkontribusi terhadap kasus stunting, terlebih dalam perspektif sosial budaya.

1. Teori Konstruksi Sosial (Peter L. Berger)

Dalam teori Konstruksi Sosial ini, proses konstruksi sosial berkaitan bahwa terdapat Hubungan Individu dan Masyarakat

- a. Individu : Acting subject, actor-action dengan makna subjektif, tidakannya/sarana untuk mencapai tujuan.
- b. Masyarakat: (a) besar kualitasnya bukan kuantitasnya, otonom/mandiri. Misalnya keluarga, komonitas, mayarakat, asosialsi, pertain politik, Lembaga pemerintah/negara., (b) relasi antar manusia, saling mempengaruhi bagi yang terlibat.

Subjective reality, merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.

2. *Teori Sosiologi Keluarga*

Teori Sosiologi Keluarga ini berkaitan erat dengan Teori Struktural Fungsional, Teori Konflik, Teori Pertukaran Sosial, serta Teori Interaksionalisme Simbolik. Teori-teori ini memiliki perspektif masing-masing mengenai keberadaan suatu keluarga sebagai suatu sistem dalam masyarakat.

Teori Struktural Fungsional (William F. Ogburn dan Talcott Parsons) mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian diakomodasi dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem (Megawangi 1999). Teori Pertukaran Sosial menjelaskan keberadaan dan ketahanan kelompok sosial, termasuk keluarga melalui bantuan *selfinterest* dari individu anggotanya.

Teori Konflik sendiri memandang Kajian-kajian terhadap keluarga yang menerapkan pendekatan ini dapat meletakkan fokus pada topik-topik seperti kekerasan dalam keluarga, cara-cara keluarga memecahkan masalahnya dan pemusatan hubungan perkawinan. Manajemen konflik, penghindarannya dan penyelesaian adalah proses yang normal dan berkelanjutan dalam sistem keluarga.

Teori Perkembangan Keluarga (*family development theory*) merupakan *multilevel theory* yang berhubungan dengan

individualis, dan institusi keluarga. Teori ini juga berusaha untuk menjelaskan proses perubahan dalam keluarga.

Teori Interaksionalisme Simbolik memiliki pandangan bahwa di dalam keluarga selalu terdapat interaksi baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, maupun kelompok dengan kelompok, dengan cara berkomunikasi melalui symbol-simbol, baik itu melalui ucapan maupun tulisan sehingga interaksi ini merupakan salah satu aspek yang terpenting didalam suatu keluarga.

3. *Teori Perubahan Sosial*

Teori ini hadir sebagai perubahan sistem, serta struktur dan kebudayaan sosial yang mengikat masyarakat dengan peristiwa sosial yang menyangkut masa lalu.

Perubahan sosial dibedakan menjadi beberapa teori, seperti; teori evolusi, teori konflik, teori fungsional, teori siklus, dan teori pembangunan.

Teori Evolusi merupakan perubahan yang memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Perubahan evolusi ini akan terjadi secara bertahap mulai dari awal sampai perubahan terakhir. Evolusi ini berlandaskan pada teori Darwin yang dipengaruhi oleh Herbert Spencer. Teori evolusi ini mempunyai dua tokoh paling berpengaruh yaitu; Emile Durkheim dan Ferdinand Tonnies.

Teori Konflik menjelaskan perubahan sosial dapat terbentuk dari konflik. Konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan kelompok masyarakat yang termajinakan atau tertindas, sehingga melahirkan sebuah perubahan sosial yang

mengubah sistem sosial. Tokoh yang berpengaruh teori konflik: Karl Marx.

Teori Fungsionalis ini merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan sosial dalam teori ini bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan di masyarakat. Teori ini hanya menerima perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang dimana perubahan sering kali tidak bermanfaat akan dibuang atau tidak digunakan.

Teori Siklus merupakan sebuah tahap yang sama seperti teori evolusi. Namun, perubahan tidak akan berhenti pada tahap “terakhir” yang sempurna, namun akan berputar kembali seperti awal untuk peralihan ke tahap selanjutnya.

Perubahan ini sering kali digambarkan dengan berputar melingkar. Siklus ini merupakan perubahan yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan pada suatu titik, tetapi ia akan berputar melingkar menurut pola.

Teori Pembangunan terbagi atas tiga bagian: Teori modernisasi, teori dependensi, teori sistem dunia.

- a. Teori Modernisasi merupakan proses bertahap, modernisasi ini juga melibatkan proses homogenitas yang melalui berbagai masyarakat dengan karakter serta struktur yang serupa. Modernisasi ini juga merupakan proses yang bergerak maju dan tidak bergerak mundur dan tidak dapat dihentikan.
- b. Teori Dependensi. Teori ini merupakan teori dependensia. Kemunculan teori ini sebagai perbaikan sekaligus antithesis dari kegagalan teori pembangunan maupun modernisasi yang

menjalankan tugasnya mengungkap kelemahan hubungan ekonomi dua kelompok negara di dunia.

- c. Teori Sistem Dunia. Teori ini sering disebut dengan teori sistem ekonomi kapitalis dunia. Sistem dunia ini dipandang dengan mengubah unit analisisnya pada sistem dunia, sejarah kapitalis dunia, serta spesifikasi sejarah lokal. Teori ini cukup dipandang dari sistem ekonomi kapitalis.

4. Teori Kemiskinan

Ada tiga pendekatan yang cukup populer dalam memahami kemiskinan yang dikemukakan oleh Ancok (dalam Dewanta, 1995), yaitu:

“(1) *Pendekatan kultural*, yang dibidani oleh Oscar Lewis dengan konsep “*cultural poverty*” yang memandang kemiskinan sebagai suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi (*economic deprivation*) yang berlangsung lama. Inilah kemudian dipakai oleh orang miskin untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap posisi mereka yang marjinal dalam masyarakat yang memiliki kelas-kelas dan bersifat individualistik dan kapitalistik. (2) *Pendekatan situasional* yang dibidani oleh Valentine (1968) yang mengasumsikan bahwa masyarakat miskin timbul karena adanya struktur total dari sistem sosial yang ada di dalam masyarakat yang menekan mereka. (3) *Pendekatan intraksional* yang dibidani oleh Gans (1968) dengan suatu asumsi bahwa sebagian orang miskin diakibatkan oleh warisan generasi sebelumnya dan sebagian yang lainnya hanya miskin secara periodik”.

5. *Perencanaan Sosial*

Terjadinya perencanaan sosial akan senantiasa melibatkan masyarakat dan kelompok pemerintah serta [organisasi sosial](#) yang bekerja sama dalam mengatasi beragam [masalah sosial](#) kritis. Disinilah [tujuan dan fungsi sebuah organisasi sosial](#) atau sekelompok orang yang terlibat dalam perencanaan sosial dapat melakukan kegiatan seperti memberikan dukungan, penelitian, dan informasi kepada berbagai organisasi masyarakat.

Perencanaan sosial adalah praktik perencanaan strategis yang diterapkan untuk menangani tujuan sosial yang teridentifikasi dengan mempelajari kebutuhan masyarakat, memeriksa dampak sosial dari pembangunan, dan merancang strategi untuk meningkatkan dan memberi manfaat bagi [arti masyarakat](#) itu sendiri.

Secara spesifik, perencanaan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena dapat memberikan beberapa fungsi diantaranya yaitu:

a. Membawa perubahan

Perencanaan sosial dapat berfungsi untuk membawa perubahan atau reformasi pada institusi sosial, seperti sistem kasta atau institusi perkawinan dan keluarga. Perencanaan sosial melibatkan konsensus tertentu di seluruh masyarakat atau setidaknya dalam mayoritas besar. Orang harus mempertimbangkan bahwa situasi di mana mereka tinggal tidak memuaskan, dan dimungkinkan untuk mengubah situasi menjadi lebih memuaskan. Konsensus seperti itu diperlukan baik dalam perencanaan demokratis maupun perencanaan totaliter.

b. Memecahkan masalah sosial

Perencanaan sosial juga menjadi hal yang sangat penting untuk memecahkan beragam [contoh masalah sosial](#) seperti alkoholisme, kemiskinan, prostitusi, pengangguran, terorisme, kenakalan, dan lain-lain. Perencanaan sosial tersebut dapat dilakukan oleh banyak organisasi, mulai dari lembaga federal hingga organisasi masyarakat.

c. Membantu masyarakat dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya

Perencanaan sosial merupakan suatu proses yang dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi kekuatan atau kelebihan dan kelemahan atau kekurangan yang dimiliki, serta menentukan cara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

d. Menyusun kebijakan untuk melakukan pembangunan sosial dan fisik

Perencanaan sosial memanfaatkan [arti nilai](#) masyarakat melalui tujuan kebijakan untuk pembangunan sosial dan fisik. Perencanaan sosial adalah proses di mana pembuat kebijakan mencoba memecahkan masalah masyarakat atau memperbaiki kondisi di masyarakat dengan merancang dan kemudian menerapkan kebijakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan hasil tertentu.

e. Menciptakan masyarakat yang sehat

Dalam kaitannya dengan konteks kesehatan, perencanaan sosial menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Hal tersebut sering kali berhubungan dengan peningkatan lingkungan dan komunitas untuk populasi seperti anak-anak dan

remaja, manula, atau imigran, atau mengatasi tantangan seperti perumahan, transportasi atau perjudian dan kecanduan.

Contoh Perencanaan Sosial

Aktivitas yang termasuk perencanaan sosial, diantaranya;

1. **Penelitian Sosial.** Yaitu melakukan penelitian independen tentang tren sosial, kebutuhan dan isu-isu yang relevan dengan berbagai konstituen di masyarakat.
2. **Pengembangan Masyarakat.** Memfasilitasi dan mendukung perubahan positif dalam kemitraan dengan kelompok masyarakat dan individu.
3. **Perencanaan Sistem.** Menyediakan perencanaan yang berkisar dari definisi kebutuhan layanan hingga koordinasi dan evaluasi program dan pemberian layanan.
4. **Analisis dan Kolaborasi Kebijakan.** Menyediakan titik fokus masyarakat untuk memobilisasi kelompok-kelompok yang paling terpengaruh oleh masalah ke dalam kemitraan kerja dan pemecahan masalah, jaringan informasi dan koalisi aksi.
5. **Analisis dan Pengembangan Kebijakan.** Menyediakan akses ke keahlian profesional dan sukarela pada berbagai masalah sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan untuk memberikan analisis kebijakan yang cangguh dan proposal berbasis penelitian kepada pembuat kebijakan publik di tingkat lokal, provinsi, maupun nasional.
6. **Mengadakan dan Memfasilitasi.** Menyediakan “tempat pertemuan” yang tidak mengancam untuk diskusi dan penyelesaian masalah di masyarakat yang dianggap sulit.

Memfasilitasi pembangunan konsensus masyarakat tentang isu-isu dan/atau tindakan bersama.

7. **Kesadaran dan Pendidikan Komunitas.** Meningkatkan pemahaman masyarakat yang lebih luas dan mendalam tentang isu-isu pembangunan sosial yang mempengaruhi kelompok tertentu atau kualitas hidup masyarakat secara umum.
8. **Advokasi dan Aksi Sosial.** Menjadi katalisator perubahan. Memajukan kepentingan sektor masyarakat yang terpinggirkan dengan mengadvokasi posisi kebijakan tertentu kepada pemerintah.

Dari penjelasan. Dapatlah dikatakan bahwa perencanaan sosial seringkali dipandang sebagai pelengkap yang bukan inklusif dari adanya perencanaan ekonomi. Sehingga dalam hal ini, perencanaan sosial berarti perencanaan kegiatan non ekonomi masyarakat. Terlepas dari bagaimana perencanaan sosial diartikan atau dimaknai, secara umum perencanaan sosial bertujuan untuk memberikan perhatian pada proses yang dialami oleh suatu masyarakat atau komunitas untuk memecahkan tantangan yang dihadapi.

Disisi lainnya, yang setidaknya dipahami bahwa adanya badan perencanaan sosial dapat memberikan kepemimpinan dan memfasilitasi dalam hal menyatukan orang-orang yang menjadi kunci dalam suatu masalah atau isu tertentu. Kegiatan perencanaan sosial juga dapat mencakup memberikan saran atau membuat rekomendasi kepada badan-badan sipil mengenai kebijakan publik yang berkaitan dengan isu-isu sosial tertentu.

Dimana perihal keberlanjutan dalam perencanaan membahas aspek sosial, lingkungan dan ekonomi dari pembangunan dan

pengelolaan sumber daya. Elemen-elemen yang diakui dari kesejahteraan sosial yang berkelanjutan termasuk kesetaraan relatif dalam akses ke perumahan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rekreasi dan infrastruktur dan sumber daya budaya

Sehingga dalam hal ini perencanaan sosial juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sosial. Perlu kita ketahui bahwa perencanaan sosial dilakukan saat ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat atau adanya keinginan masyarakat yang belum tercapai. Oleh karena itu, perencanaan sosial dibutuhkan untuk mencapai tujuan masyarakat yang akan dicapai.

8.4 Isu Stunting

8.4.1. Pengertian

Stunting atau balita pendek adalah balita dengan masalah gizi kronik, yang memiliki status gizi berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umur balita jika dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) tahun 2005, memiliki nilai z-score kurang dari -2SD dan apabila nilai z-scorenya kurang dari -3SD dikategorikan sebagai balita sangat pendek. *Stunting* terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Permasalahan *Stunting* merupakan isu baru yang berdampak buruk terhadap permasalahan gizi di Indonesia karena mempengaruhi fisik dan fungsional dari tubuh anak serta meningkatnya angka kesakitan anak, bahkan

kejadian *stunting* tersebut telah menjadi sorotan WHO untuk segera dituntaskan (Kania, 2015 dalam Mugianti dkk., 2018).

8.4.2. Faktor yang Berhubungan dengan Stunting

Norfai (2020) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang berhubungan dengan stunting, yaitu:

1. Tingkat pendidikan ibu

Penelitian *Mustikaningrum* dkk (2016) menyatakan bahwa proporsi responden yang mempunyai tingkat pendidikan \leq SLTP dan stunting sebesar 65,9% sedangkan proporsi responden yang mempunyai tingkat pendidikan \geq SLTA dan stunting sebesar 34,1%, dengan *p-value* 0,05, berarti adanya hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian stunting pada bayi usia 6 bulan di kota Semarang. Nilai OR didapatkan sebesar 1,81 (0,99-3,29) yang artinya tingkatan pendidikan ibu \leq SLTP mempunyai peluang risiko 1,81 kali lebih besar terjadinya stunting pada bayi usia 6 bulan di kota Semarang dibandingkan responden yang mempunyai tingkat pendidikan \geq SLTA.

2. Tinggi badan ibu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nasrul dkk (2015) menyatakan bahwa Tinggi Badan Ibu $<$ 150 cm dan stunting sebanyak 71 (59,2%) sedangkan Tinggi Badan Ibu \geq 150 cm dan stunting sebanyak 95 (41,3%) dengan *p-value* 0,001, yang berarti terdapat hubungan yang bermakna antara Tinggi Badan Ibu dengan stunting usia 6-23 bulan di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan OR (95% CI) sebesar 1,970 (1,218-3,187) yang berarti Ibu yang mempunyai Tinggi Badan $<$

150 cm mempunyai peluang risiko 1,970 kali lebih besar dari Ibu dengan tinggi badan ≥ 150 cm.

3. Riwayat BBLR

Berat badan lahir adalah berat badan bayi ketika lahir atau paling lambat sampai bayi berumur 1 hari dilihat dari KMS (Kartu Menuju Sehat) dimana bila berat badan lahir kurang dari 2500 gram berarti berat badan lahir rendah dan bila lebih dari atau sama dengan 2500 gram berarti normal. Berat badan lahir rendah banyak dihubungkan dengan tinggi badan yang kurang atau *stunting* pada balita (Kusharisupeni, 2002).

4. ASI eksklusif

Asupan makanan yang tepat bagi bayi dan anak usia dini (0-24 bulan) adalah Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. ASI Eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral). Setelah usia 6 bulan selain ASI bayi diberi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). ASI Eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja bagi bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan. Namun ada pengecualian, bayi diperbolehkan mengonsumsi obat-obatan, vitamin dan mineral tetes atas saran dokter (Permenkes RI, 2014).

5. Kelengkapan Imunisasi Dasar

Sebagai salah satu kelompok yang menjadi sasaran program imunisasi, setiap bayi wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB dan atau DPT-HB-Hib, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak. Dari

imunisasi dasar lengkap yang diwajibkan tersebut, campak merupakan imunisasi yang mendapat perhatian lebih, hal ini sesuai komitmen Indonesia pada global untuk mempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90% secara tinggi dan merata. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak adalah salah satu penyebab utama kematian pada balita. Dengan demikian pencegahan campak memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kematian balita (Pusdatin Kemenkes RI, 2016).

6. Paritas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Palino dkk (2017) diketahui bahwa dari 65 pasangan balita yang telah dimatchingkan umurnya, pada kelompok kasus, balita yang memiliki ibu dengan paritas banyak relatif lebih banyak yaitu 40,0%, sedangkan pada kelompok kontrol hanya sebesar 12,3%. Sebaliknya pada kelompok kasus, balita yang memiliki ibu dengan paritas sedikit relatif lebih sedikit yaitu hanya 12,3%, sedangkan pada kelompok kontrol sebesar 40,0%. Dengan demikian secara deskriptif dapat dijelaskan bahwa pada balita stunting lebih banyak yang memiliki ibu dengan paritas banyak dibandingkan ibu dengan paritas sedikit. Sedangkan pada balita yang tidak stunting lebih banyak memiliki ibu dengan paritas sedikit dibandingkan ibu dengan paritas banyak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada balita yang stunting cenderung memiliki ibu dengan pasitas banyak, sedangkan pada balita yang tidak stunting cenderung memiliki ibu dengan paritas banyak. Hasil analisis besar pengaruh paritas terhadap kejadian stunting, setelah dimatching umur ini,

diperoleh OR sebesar 3,25. Artinya balita yang memiliki ibu dengan paritas banyak mempunyai risiko mengalami stunting 3,25 kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang memiliki ibu dengan paritas sedikit. Dengan demikian, setelah dimatching umur, paritas merupakan determinan kejadian stunting pada balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja puskesmas Puuwatu kota kendari tahun 2016. Hasil analisis antara paritas terhadap kejadian stunting menggunakan uji *McNemar* menunjukkan bahwa nilai p (0,0029) < α (0,05) sehingga disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara paritas terhadap kejadian stunting pada balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Puuwatu tahun 2016.

7. Pendapatan keluarga

Berdasarkan data *Joint Child Malnutrition Estimates* tahun 2018, negara dengan pendapatan menengah ke atas mampu menurunkan angka stunting hingga 64%, sedangkan pada Negara menengah ke bawah hanya menurunkan sekitar 24% dari tahun 2000 hingga 2017. Pada Negara dengan pendapatan rendah justru mengalami peningkatan pada tahun 2017 (Pusdatin Kemenkes RI, 2018).

8. Riwayat status gizi ibu pada saat kehamilan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dkk (2018) menunjukkan bahwa status gizi ibu yang KEK dengan status gizi anak normal berdasarkan TB/U sebanyak 6.3% dan status gizi ibu yang KEK dengan status gizi anak berdasarkan TB/U (*stunting*) sebanyak 22.1% sedangkan status gizi ibu yang normal berdasarkan LILA dengan status gizi anak berdasarkan TB/U (normal) sebanyak 44.2% dan status gizi ibu yang normal

berdasarkan LILA dengan status gizi anak berdasarkan TB/U (*stunting*) sebanyak 27.4%. Berdasarkan uji statistik diperoleh nilai $p= (0,01)$ yang lebih kecil dari nilai $\alpha (0.05)$ yang berarti ada hubungan antara status gizi ibu berdasarkan LILA dengan kejadian *stunting*.

8.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian Norfai (2020) di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Tahun 2019 didapatkan beberapa temuan yang berkaitan dengan faktor-faktor determinan pada keluarga *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Pekauman. Sebagian besar umur ibu yang mempunyai risiko rendah sebesar 70,1%. Sebagian besar tingkat pendidikan ibu rendah sebesar 59,8%. Sebagian besar ibu yang mempunyai tinggi badan sebesar 68,5%. Sebagian besar riwayat berat badan lahir normal sebesar 86,4. Sebagian besar balita ASI eksklusif sebesar 70,7%. Sebagian besar balita melakukan imunisasi dasar lengkap sebesar 71,7%. Sebagian besar ibu yang mempunyai kurang dari atau sama dengan dua anak sebesar 54,3%. Sebagian besar pendapatan keluarga rendah sebesar 54,9%. Sebagian besar ibu tidak memiliki Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada saat kehamilan sebesar 84,2%.

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin tahun 2019 diperoleh bahwa umur ibu risiko tinggi dan *stunting* pada balita sebesar 26,1% sedangkan umur ibu risiko rendah dan *stunting* pada balita sebesar 73,9%. Berdasarkan uji statistik hubungan antara umur ibu dengan *stunting* pada balita

diperoleh $p\text{-value} = 0,334$ dengan demikian $p\text{-value}$ lebih besar dari nilai α (0,05), hal ini berarti secara statistik tidak ada hubungan bermakna antara umur ibu dengan stunting pada balita.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin tahun 2019 diperoleh bahwa tingkat pendidikan ibu yang rendah dan stunting pada balita sebesar 69,6% sedangkan tingkat pendidikan ibu yang tinggi dan stunting pada balita sebesar 30,4%. Berdasarkan uji statistik hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan stunting pada balita diperoleh $p\text{-value} = 0,011$ dengan demikian $p\text{-value}$ lebih kecil dari nilai α (0,05), hal ini berarti secara statistik terdapat hubungan bermakna antara tingkat pendidikan ibu dengan stunting pada balita. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin tahun 2019 diperoleh bahwa ibu yang mempunyai tinggi badan pendek dan stunting pada balita sebesar 33,7% sedangkan ibu yang mempunyai tinggi badan tinggi dan stunting pada balita sebesar 66,3%. Berdasarkan uji statistik hubungan antara tinggi badan ibu dengan stunting pada balita diperoleh $p\text{-value} = 0,634$ dengan demikian $p\text{-value}$ lebih besar dari nilai α (0,05), hal ini berarti secara statistik tidak ada hubungan bermakna antara tinggi badan ibu dengan stunting pada balita.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin tahun 2019

diperoleh bahwa riwayat berat badan lahir rendah dan stunting pada balita sebesar 13% sedangkan riwayat berat badan lahir normal dan stunting pada balita sebesar 87%. Berdasarkan uji statistik hubungan antara riwayat berat badan lahir dengan stunting pada balita diperoleh $p\text{-value} = 1,000$ dengan demikian $p\text{-value}$ lebih besar dari nilai α (0,05), hal ini berarti secara statistik tidak ada hubungan bermakna antara riwayat berat badan lahir dengan stunting pada balita.

4. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin tahun 2019 diperoleh bahwa balita yang tidak ASI eksklusif dan stunting pada balita sebesar 28,3% sedangkan balita yang ASI eksklusif dan stunting pada balita sebesar 71,7%. Berdasarkan uji statistic hubungan antara ASI eksklusif dengan stunting pada balita diperoleh $p\text{-value} = 0,871$ dengan demikian $p\text{-value}$ lebih besar dari nilai α (0,05), hal ini berarti secara statistik tidak ada hubungan bermakna antara ASI eksklusif dengan stunting pada balita.
5. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin tahun 2019 diperoleh bahwa balita yang tidak lengkap imunisasi dasar dan stunting pada balita sebesar 34,8% sedangkan balita yang lengkap imunisasi dasar dan stunting pada balita sebesar 65,2%. Berdasarkan uji statistik hubungan antara kelengkapan imunisasi dasar dengan stunting pada balita diperoleh $p\text{-value} = 0,072$ dengan demikian $p\text{-value}$ lebih besar dari nilai α (0,05), hal ini berarti secara statistik tidak ada hubungan

bermakna antara kelengkapan imunisasi dasar dengan stunting pada balita.

6. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin tahun 2019 diperoleh bahwa ibu yang mempunyai lebih dari 2 Anak dan stunting pada balita sebesar 43,5% sedangkan ibu yang mempunyai kurang dari atau sama dengan 2 anak dan stunting pada balita sebesar 56,5%. Berdasarkan uji statistik hubungan antara paritas dengan stunting pada balita diperoleh $p\text{-value} = 0,657$ dengan demikian $p\text{-value}$ lebih besar dari nilai α (0,05), hal ini berarti secara statistik tidak ada hubungan bermakna antara paritas dengan stunting pada balita.
7. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin tahun 2019 diperoleh bahwa pendapatan keluarga yang rendah dan stunting pada balita sebesar 60,9% sedangkan pendapatan keluarga yang tinggi dan stunting pada balita sebesar 39,1%. Berdasarkan uji statistik hubungan antara pendapatan keluarga dengan stunting pada balita diperoleh $p\text{-value} = 0,138$ dengan demikian $p\text{-value}$ lebih besar dari nilai α (0,05), hal ini berarti secara statistik tidak ada hubungan bermakna antara pendapatan keluarga dengan stunting pada balita.
8. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin tahun 2019 diperoleh bahwa riwayat Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada saat kehamilan dan stunting pada balita sebesar 17,4%

sedangkan tidak ada riwayat Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada saat kehamilan dan stunting pada balita sebesar 82,6%. Berdasarkan uji statistik hubungan antara riwayat Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada saat kehamilan dengan stunting pada balita diperoleh $p\text{-value} = 0,686$ dengan demikian $p\text{-value}$ lebih besar dari nilai α (0,05), hal ini berarti secara statistik tidak ada hubungan bermakna antara riwayat Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada saat kehamilan dengan stunting pada balita.

Faktor Determinan Penyebab Terjadinya Bayi Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Pekauman Banjarmasin

Berdasarkan temuan di atas, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

1. Umur Ibu dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin didominasi mereka yang berisiko rendah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rochmah (2017) diketahui bahwa proporsi usia ibu resiko tinggi memiliki anak stunting sebanyak 60% dan usia ibu resiko rendah memiliki anak *stunting* sebanyak 33,8%. Jumlah anak *stunting* lebih didominasi oleh ibu dengan kategori usia resiko rendah. Pada penelitian ini didapatkan $p\text{-value}$ dari uji statistik 0,081 ($p > 0,05$) dan diartikan bahwa usia ibu tidak memiliki hubungan

dengan *stunting* pada balita usia 24-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Wonosari I.

Usia ibu terlalu muda atau terlalu tua pada waktu hamil dapat menyebabkan *stunting* pada anak terutama karena pengaruh faktor psikologis. Ibu yang terlalu muda biasanya belum siap dengan kehamilannya dan tidak tahu bagaimana menjaga dan merawat kehamilan. Sedangkan ibu yang usianya terlalu tua biasanya staminanya sudah menurun dan semangat dalam merawat kehamilannya sudah berkurang. Faktor psikologis sangat mudah dipengaruhi oleh faktor lain (Candra, 2013).

Tidak adanya hubungan antara umur ibu dengan *stunting* pada balita pada Kasus di wilayah kerja Puskesmas Pekauman, kemungkinan dikarenakan umur ibu yang mempunyai risiko tinggi (< 19 tahun dan > 35 tahun) hanya dapat memberikan kontribusi untuk terjadinya *stunting* pada balita sebesar 26,1%, sedangkan umur ibu yang mempunyai risiko rendah (≥ 19 tahun dan ≤ 35 tahun) memberikan kontribusi untuk terjadinya *stunting* pada balita sebesar 73,9%. Umur ibu yang mempunyai risiko rendah (≥ 19 tahun dan ≤ 35 tahun) harus tetap menjaga kesehatan bayinya selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta aktif ke fasilitas kesehatan dalam rangka memantau pertumbuhan dan perkembangan balitanya. Fenomena ini membuktikan bahwa kemungkinan variabel umur ibu bukan faktor mendasar dalam menyebabkan *stunting* pada balita.

2. Tingkat Pendidikan Ibu dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin didominasi tingkat pendidikan ibu yang rendah.

Hal ini sesuai dengan penelitian Anisa (2012), bahwa kecenderungan kejadian *stunting* pada balita lebih banyak terjadi pada ibu yang berpendidikan rendah. Ibu yang berpendidikan baik akan membuat keputusan yang akan meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anaknya dan cenderung memiliki pengetahuan gizi yang baik pula.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk (2018) menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian *stunting*. Berdasarkan analisis multivariat, faktor pendidikan ibu merupakan faktor yang memiliki hubungan paling dominan dengan kejadian *stunting* pada anak. Sejalan dengan penelitian Rahayu (2014) yang dilakukan di wilayah Puskesmas Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian *stunting* pada anak.

Sejalan dengan pendapat Soetjningsih (1998) dalam Kusumaningrum (2003) menyatakan bahwa pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam tumbuh kembang anak, karena pendidikan yang baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar, terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik.

Variabel pendidikan ibu berperan penting terhadap terjadinya *stunting* pada balita, karena pendidikan gizi kepada masyarakat, khususnya pendidikan gizi kepada ibu balita merupakan salah satu intervensi gizi sensitif serta pendidikan berkaitan dengan pola pikir seseorang dalam melihat suatu

masalah terhadap kesehatan, maka edukasi secara komprehensif dan intensif kepada ibu balita mengenai stunting pada balita akan berperan penting terhadap pola asuh selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang pada akhirnya mempunyai potensi terhadap penurunan *stunting* pada balita.

3. Tinggi Badan Ibu dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin didominasi ibu yang mempunyai tinggi badan tinggi

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasrul dkk (2015) menyatakan bahwa Tinggi Badan Ibu < 150 cm dan stunting sebanyak 71 (59,2%) sedangkan Tinggi Badan Ibu \geq 150 cm dan stunting sebanyak 95 (41,3%) dengan *p-value* 0,001, yang berarti terdapat hubungan yang bermakna antara Tinggi Badan Ibu dengan stunting usia 6-23 bulan di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan OR (95% CI) sebesar 1,970 (1,218- 3,187) yang berarti Ibu yang mempunyai Tinggi Badan < 150 cm mempunyai peluang risiko 1,970 kali lebih besar dari Ibu dengan tinggi badan \geq 150 cm.

Variabel tinggi badan ibu tidak sepenuhnya memberikan kontribusi bagi terjadinya *stunting* pada balita keturunannya, karena dengan mengatur pola asuh yang baik dengan memberikan asupan gizi balita secara seimbang, maka masa pertumbuhan dan perkembangan seluruh organ tubuh termasuk pertumbuhan tulang akan menjadi baik dan aktif dalam melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita.

4. Riwayat berat badan lahir dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin didominasi berat badan lahir normal.

Berat badan lahir adalah berat badan bayi ketika lahir atau paling lambat sampai bayi berumur 1 hari dilihat dari KMS (Kartu Menuju Sehat) dimana bila berat badan lahir kurang dari 2500 gram berarti berat badan lahir rendah dan bila lebih dari atau sama dengan 2500 gram berarti normal. Berat badan lahir rendah banyak dihubungkan dengan tinggi badan yang kurang atau *stunting* pada balita (Kusharisupeni, 2002).

Berat badan lahir rendah (BBLR), yaitu berat bayi lahir kurang dari 2.500 gram, akan membawa risiko kematian, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk dapat berisiko menjadi pendek jika tidak tertangani dengan baik (Kemenkes, 2016). Anak dengan riwayat BBLR merupakan salah satu faktor yang potensial memengaruhi pertumbuhan anak. Terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat status BBLR dengan stunting pada anak balita (Rahayu dkk, 2015).

Penelitian Azriful dkk (2018) menyatakan bahwa proporsi responden BBLR dan stunting sebesar 89,7% sedangkan proporsi responden tidak BBLR dan stunting sebesar 68,2% dengan *p-value* 0,033 yang artinya adanya hubungan yang bermakna antara Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Penelitian yang dilakukan Setiawan dkk (2018) menyatakan bahwa Berat badan lahir memiliki hubungan yang

bermakna dengan kejadian *stunting*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dkk (2015) di wilayah kerja Puskesmas Sungai Karias, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan yang menyimpulkan bahwa faktor Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) merupakan faktor risiko yang paling dominan terhadap kejadian *stunting* pada anak balita.

Kasus di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin tahun 2019 membuktikan bahwa sebagian besar balita dengan riwayat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) memberikan kontribusi untuk *stunting* sebesar 13%, berarti BBLR bukan sebagai faktor risiko yang mendasar untuk terjadinya *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin tahun 2019, karena apabila balita ada riwayat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), maka dapat diperbaiki dengan menjaga pola asuh sampai 2 tahun dan memberikan asupan gizi seimbang pada balita, sedangkan Berat Badan Lahir Normal (BBLN) sebagian besar mengalami *stunting* pada balita yaitu sebesar 87%, hal ini terjadi kemungkinan ada variabel yang mengakibatkan fenomena ini terjadi, yaitu menurut asumsi saya menyatakan bahwa ketahanan dan ketersediaan pangan setiap keluarga berpotensi mempunyai hubungan terhadap kualitas makanan yang di konsumsi, dimana kualitas konsumsi makanan, erat hubungannya terhadap pendapatan keluarga, kemudian pendapatan keluarga berpotensi terhadap daya beli masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan asupan gizi yang seimbang pada balita.

5. ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin didominasi balita yang ASI eksklusif.

ASI adalah makanan paling baik untuk bayi. Komponen zat makanan tersedia dalam bentuk yang ideal dan seimbang untuk dicerna dan diserap secara optimal oleh bayi. ASI saja sudah cukup untuk menjaga pertumbuhan bayi sampai usia 6 bulan. Tidak ada makanan lain yang dibutuhkan selama masa ini. ASI bersifat steril, berbeda dengan sumber susu lain seperti susu formula atau cairan lain yang disiapkan dengan air atau bahan-bahan dapat terkontaminasi dalam botol yang kotor. Pemberian ASI saja, tanpa cairan atau makanan lain dan tanpa menggunakan botol, menghindarkan anak dari bahaya bakteri dan organisme lain yang akan menyebabkan diare. Keadaan seperti ini di sebut disusui secara penuh (memberikan ASI Eksklusif) (Kemenkes RI, 2011).

Rendahnya pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu pemicu terjadinya *stunting* pada anak balita yang disebabkan oleh kejadian masa lalu dan akan berdampak terhadap masa depan anak balita, sebaliknya pemberian ASI yang baik oleh ibu akan membantu menjaga keseimbangan gizi anak sehingga tercapai pertumbuhan anak yang normal (Aridiyah dkk., 2015).

Penelitian dilakukan oleh Azriful dkk (2018) menyatakan bahwa proporsi responden yang mendapatkan ASI eksklusif dan stunting sebesar 89,2% sedangkan proporsi responden yang tidak

mendapatkan ASI eksklusif dan stunting sebesar 57% dengan p-value 0,000 yang artinya adanya hubungan yang bermakna antara ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Kasus di wilayah kerja Puskesmas Pekauaman justru tidak ada hubungan bermakna antara ASI eksklusif dengan *stunting* pada balita, hal ini menyatakan bahwa untuk mencegah *stunting* pada balita, tidak cukup hanya melakukan pemberian ASI eksklusif saja, akan tetapi perlu pola asuh yang dilakukan secara intensif mulai dari lahir sampai 2 tahun (1000 HPK), dengan asupan gizi yang seimbang serta aktif melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan minimal 8 kali kunjungan selama 1 tahun terakhir dalam rangka memantau pertumbuhan dan perkembangan balita.

6. Kelengkapan imunisasi dasar dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin didominasi balita yang lengkap imunisasi dasar.

Pemberian imunisasi pada anak memiliki tujuan penting yaitu untuk mengurangi risiko mordibitas (kesakitan) dan mortalitas (kematian) anak akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Penyakit-penyakit tersebut antara lain: TBC, difteri, tetanus, pertussis, polio, campak, hepatitis B, dan sebagainya. Status imunisasi pada anak adalah salah satu indikator kontak dengan pelayanan kesehatan. Karena diharapkan bahwa kontak dengan pelayanan kesehatan akan membantu memperbaiki masalah gizi baru jadi status

imunisasi diharapkan akan memberikan efek positif terhadap status gizi jangka panjang (Yimer, 2000).

Hasil penelitian Picauly dan Toy (2013) dengan analisis regresi logistik menunjukkan bahwa anak yang tidak memiliki riwayat imunisasi memiliki peluang mengalami stunting lebih besar dibandingkan anak yang memiliki riwayat imunisasi. Hal ini berarti bahwa jika anak tidak memiliki riwayat imunisasi maka akan diikuti dengan peningkatan kejadian stunting 1.983 kali.

Kasus di wilayah kerja Puskesmas Pekauman tidak ada hubungan bermakna antara kelengkapan imunisasi dasar dengan *stunting* pada balita, hal ini menyatakan bahwa untuk mencegah stunting pada balita, tidak cukup hanya melakukan imunisasi dasar secara lengkap saja, akan tetapi perlu pola asuh yang dilakukan secara intensif mulai dari lahir sampai 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), salah satunya adalah dengan memberikan asupan gizi yang seimbang, karena 1000 HPK merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan bayi dan balita.

7. Paritas dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin didominasi ibu yang mempunyai kurang dari atau sama dengan 2 anak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Palino dkk (2017) diketahui bahwa dari 65 pasangan balita yang telah dimatchingkan umurnya, pada kelompok kasus, balita yang memiliki ibu dengan paritas banyak relatif lebih banyak yaitu 40,0%, sedangkan pada kelompok kontrol hanya sebesar 12,3%.

Sebaliknya pada kelompok kasus, balita yang memiliki ibu dengan paritas sedikit relatif lebih sedikit yaitu hanya 12,3%, sedangkan pada kelompok kontrol sebesar 40,0%. Dengan demikian secara deskriptif dapat dijelaskan bahwa pada balita stunting lebih banyak yang memiliki ibu dengan paritas banyak dibandingkan ibu dengan paritas sedikit. Sedangkan pada balita yang tidak stunting lebih banyak memiliki ibu dengan paritas sedikit dibandingkan ibu dengan paritas banyak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada balita yang stunting cenderung memiliki ibu dengan kapasitas banyak, sedangkan pada balita yang tidak stunting cenderung memiliki ibu dengan paritas banyak. Hasil analisis besar pengaruh paritas terhadap kejadian stunting, setelah dimatching umur ini, diperoleh OR sebesar 3,25. Artinya balita yang memiliki ibu dengan paritas banyak mempunyai risiko mengalami stunting 3,25 kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang memiliki ibu dengan paritas sedikit, karena rentang nilai pada tingkat kepercayaan (CI) = 95% dengan *lower limit* (batas bawah) = 1,428 dan *upper limit* (batas atas) = 8,305 tidak mencakup nilai satu, maka besar risiko tersebut bermakna. Dengan demikian, setelah dimatching umur, paritas merupakan determinan kejadian stunting pada balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja puskesmas Puuwatu Kota Kendari tahun 2016. Hasil analisis antara paritas terhadap kejadian stunting menggunakan uji *McNemar* menunjukkan bahwa nilai p (0,0029) < α (0,05) sehingga disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara paritas terhadap kejadian stunting pada balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Puuwatu tahun 2016.

Ibu dengan paritas banyak cenderung akan memiliki anak yang mengalami stunting. Hal ini disebabkan oleh keluarga yang memiliki banyak anak terutama dengan kondisi ekonomi kurang tidak akan dapat memberikan perhatian dan makanan yang cukup pada seluruh anak-anaknya. Anak yang sedang dalam masa pertumbuhan terutama masa pertumbuhan cepat seperti pada usia 1-2 tahun sangat membutuhkan perhatian dan stimulasi untuk perkembangan otaknya disamping membutuhkan zat gizi yang lengkap untuk pertumbuhan fisiknya. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan cenderung akan dialami oleh anak yang dilahirkan belakangan, karena beban yang ditanggung orangtua semakin besar dengan semakin banyaknya jumlah anak yang dimiliki (Palino dkk., 2017).

Kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Pekauman menyatakan bahwa stunting pada balita tidak semata mata disebabkan oleh paritas atau jumlah anak, melainkan ada faktor yang kemungkinan lebih besar berpengaruh terhadap terjadinya *stunting* pada balita.

8. Pendapatan keluarga dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin didominasi keluarga dengan pendapatan rendah.

Status ekonomi rumah tangga dipandang memiliki dampak yang signifikan terhadap probabilitas seorang anak menjadi pendek dan kurus. Dalam hal ini, WHO merekomendasikan status gizi pendek atau stunting sebagai alat ukur atas tingkat sosial ekonomi yang rendah dan sebagai salah satu indikator

untuk memantau ekuitas dalam kesehatan (Zere & McIntyre, 2003 dalam Paramita, 2012).

Peningkatan pendapatan rumah berhubungan dengan penurunan dramatis terhadap probabilitas *stunting* pada anak. Beberapa studi menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pada penduduk miskin adalah strategi untuk membatasi tingginya kejadian *stunting* dalam sosial ekonomi rendah pada segmen populasi. Malnutrisi terutama *stunting*, lebih banyak dipengaruhi oleh dimensi sosial ekonomi, sehingga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dan tidak hanya dalam ranah biomedis (Zere & McIntyre, 2003 dalam Paramita, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Oktarina dan Sudiarti (2013), balita yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi rendah lebih banyak mengalami *stunting* dibandingkan balita dari keluarga dengan status ekonomi tinggi. Secara statistik, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status ekonomi keluarga dengan kejadian *stunting* pada balita dengan nilai $p=0,03$. Balita yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi rendah 1.29 kali berisiko mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita dari keluarga dengan status ekonomi tinggi.

Kasus di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin tahun 2019 diperoleh bahwa pendapatan keluarga yang rendah dan *stunting* pada balita sebesar 60,9%, artinya pendapatan keluarga yang rendah mampu memberikan kontribusi untuk terjadinya *stunting* pada balita cukup besar, walaupun

secara statistik tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pendapatan keluarga dengan kejadian *stunting* pada balita, menurut pendapat saya adanya kemungkinan ini terjadi, dikarenakan adanya pola pikir yang berbeda mengenai pentingnya asupan gizi seimbang pada balita, yaitu persepsi ibu balita mengenai pentingnya asupan gizi seimbang pada balita, dimana persepsi ibu balita terbentuk dari tingkat pendidikan seorang ibu balita.

9. Riwayat Kekurangan Energi Kronis (KEK) kehamilan dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin didominasi tidak ada riwayat kekurangan energy kronis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dkk (2018) menunjukkan bahwa status gizi ibu yang KEK dengan status gizi anak normal berdasarkan TB/U sebanyak 6.3% dan status gizi ibu yang KEK dengan status gizi anak berdasarkan TB/U (*stunting*) sebanyak 22.1% sedangkan status gizi ibu yang normal berdasarkan LILA dengan status gizi anak berdasarkan TB/U (normal) sebanyak 44.2% dan status gizi ibu yang normal berdasarkan LILA dengan status gizi anak berdasarkan TB/U (*stunting*) sebanyak 27.4%. Berdasarkan uji statistik diperoleh nilai $p = (0,01)$ yang lebih kecil dari nilai $\alpha (0.05)$ yang berarti ada hubungan antara status gizi ibu berdasarkan LILA dengan kejadian *stunting*.

Pertumbuhan dan perkembangan bayi dipengaruhi kondisi sejak dalam kandungan ibu. Ibu hamil KEK merupakan penyebab 25-30 % *Intrauterine Growth Retardation* (IUGR) pada

janin dan keadaan ini akan diturunkan dari satu generasi ke generasi dan pertumbuhan anak tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya. Anak lahir BBLR akan beresiko mengalami *stunting* di masa yang akan datang (PERSAGI, 2009 dalam Sukmawati dkk., 2018).

Kasus *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Pekauman bahwa riwayat Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada saat kehamilan dan *stunting* pada balita sebesar 17,4% sedangkan tidak ada riwayat Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada saat kehamilan dan *stunting* pada balita sebesar 82,6%. Berarti riwayat Kekurangan Energi Kronis (KEK) dapat diperbaiki selama kehamilan, dengan cara intervensi kepada ibu hamil seperti asupan gizi seimbang pada ibu hamil serta perlu peningkatan edukasi kepada ibu hamil agar dapat memahami asupan gizi seimbang selama hamil dan di fasilitasi untuk mendapatkan PMT selama hamil dalam rangka memperbaiki status gizi ibu hamil.

Disamping faktor-faktor determinan di atas, berdasarkan hasil riset ada faktor-faktor lain yang juga berkontribusi pada kasus *stunting*, yaitu:

Faktor Sanitasi Penelitian Rahayu, dkk (2018); Schmidt, C. W, 2014; Uliyanti, dkk, 2017 menunjukkan bahwa rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum yang sesuai kriteria akan berisiko lebih besar untuk terjadinya *stunting*. Rendahnya kualitas sanitasi dan kebersihan lingkungan dapat memicu terjadinya penyakit gangguan saluran pencernaan yang berakibat energi yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan namun teralihkan digunakan bagi perlawanan tubuh

melawan infeksi. Jika balita sering mengalami penyakit infeksi maka akan timbul masalah gizi, salah satunya stunting. Torlesse, H, *et al* (2016) dalam penelitiannya menjelaskan peluang terjadinya stunting dan kaitannya dengan sanitasi dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa kejadian stunting lebih rendah pada rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang lebih baik. Secara keseluruhan menurut penelitian Kwami, C. S, *et al* (2019) yaitu faktor *water, sanitation, and hygiene (WASH)* merupakan faktor yang dapat menyebabkan stunting. Namun tidak cukup melakukan WASH saja untuk mencegah stunting, tapi banyak faktor penyebab terjadinya stunting yang harus dicegah/ diatasi. Penelitian ini memberikan program rekomendasi WASH untuk mencegah terjadinya stunting yaitu 1) memperkuat upaya untuk meningkatkan perilaku mencuci tangan untuk ibu dan anak, 2) memprioritaskan akses ke sumber air bersih, dan 3) mendukung pelaksanaan WASH.

Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa, Indonesia telah berkomitmen untuk turut menurunkan prevalensi *stunting* yang masih menjadi masalah dalam kesehatan Masyarakat. Terbitnya Perpres no. 42/2013 merupakan salah satu strategi dalam SUN dengan melibatkan lintas sektor. Perpres ini menjadi penting seperti telah disebutkan dalam berbagai dokumen dan penelitian bahwa *stunting* berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan rendah, beban penyakit, pemberdayaan perempuan yang masih rendah.

Prevalensi *stunting* yang cukup stagnan selama lebih dari lima tahun di Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang semakin membaik. Secara teoritis kemiskinan dituduhkan sebagai penyebab mendasar masalah gizi. Studi di

Bangladesh menunjukkan hubungan kemiskinan dengan masalah gizi kurang dan buruk ditemukan pada ibu yang buta huruf, pendapatan rumah tangga yang rendah, memiliki saudara kandung yang lebih banyak, memiliki akses pada media yang lebih rendah, asupan gizi yang lebih buruk, serta sanitasi dan kesehatan lingkungan yang lebih rendah. Namun demikian, kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia tampaknya berpengaruh terhadap disparitas *prevalensi stunting* yang cukup lebar. Hasil studi di Ghana menyebutkan, kemiskinan dan karakteristik wilayah sebagai penyebab kesenjangan dalam masalah gizi pada anak balita. Namun demikian, hasil studi dari negara-negara miskin dan sedang berkembang membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dengan masalah gizi kurang pada usia dini. Dengan demikian dibutuhkan upaya yang serius dalam penanganan masalah gizi *stunting* pada usia dini bahkan dalam 1000 hari pertama kehidupan sebagai periode emas dalam pencegahan pertumbuhan *stunting*.

Pertumbuhan tidak optimal dalam masa janin dan atau selama periode 1000 HPK memiliki dampak jangka panjang. Bila faktor eksternal (setelah lahir) tidak mendukung, pertumbuhan *stunting* dapat menjadi permanen sebagai remaja pendek. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki ukuran lebih kecil atau *stunting* ketika lahir, secara biologis memiliki ukuran yang berbeda dari mereka yang lahir dengan ukuran lebih besar. Masalah pertumbuhan *stunting* sering tidak disadari oleh masyarakat karena tidak adanya indikasi 'instan' seperti penyakit. Tumbuh pendek seringkali dianggap sebagai pengaruh genetik, padahal faktor genetik hanya menjelaskan 15% variasi dibandingkan faktor gizi. Efek sisa

pertumbuhan dapat menjadi predisposing terjadinya penyakit kronik pada usia dewasa; upaya memperbaiki lingkungan pertumbuhan masa janin dapat sekaligus mengurangi risiko penyakit degeneratif di usia dewasa. Oleh karena itu, penanggulangan masalah *stunting* harus dimulai jauh sebelum seorang anak dilahirkan (periode 100 HPK) dan bahkan sejak masa remaja untuk dapat memutus rantai *stunting* dalam siklus kehidupan.

Perencanaan Sosial yang Perlu Dirancang Pada Keluarga Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin

Melihat faktor-faktor determinan di atas, maka diperlukan upaya-upaya penanganan yang baik, salah satunya bisa menggunakan alternatif Perencanaan Sosial dengan Milestone sebagai berikut (sebagaimana contoh di bawah ini):

a. Jangka Pendek

Tabel 2 Jangka Pendek

No.	Tahapan (<i>Milestone</i>)	Capaian <i>Output</i> Tahapan
1	Pembentukan Tim Efektif § Rapat pembentukan Tim § Menyusun draft SK Tim § Pengesahan § SK Tim	SK Tim Efektif
2	Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait proyek	Adanya kesamaan persepsi, kesepakatan dan dukungan dari

No.	Tahapan (<i>Milestone</i>)	Capaian <i>Output</i> Tahapan
	perubahan a. Persiapan pelaksanaan koordinasi b. Pelaksanaan koordinasi c. Pelaporan kegiatan koordinasi	stakeholder terhadap proyek perubahan
3	Desk Pengumpulan data dan informasi program kegiatan PD terkait proyek perubahan a. Persiapan kegiatan desk b. Pelaksanaan desk c. Laporan hasil desk	Tersusunnya data dan informasi program kegiatan yang dilaksanakan PD terkait stunting
4.	Rembug Stunting “Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Pencegahan dan Penanganan Stunting” § Persiapan kegiatan FGD § Pelaksanaan FGD § Pengolahan, pembahasan mendalam dan analisis hasil FGD § Penyusunan draft rencana aksi § Penetapan rencana aksi	Tersusunnya Rencana Aksi Pencegahan dan Penanganan Stunting
5	Penyusunan Draft Peraturan Walikota tentang Perencanaan Terintegrasi untuk Penurunan Stunting	Draft Perwali dalam proses kajian hukum

No.	Tahapan (<i>Milestone</i>)	Capaian <i>Output</i> Tahapan
	§ Penyusunan draft Perwali § FGD terbatas stakeholder terkait draft Perwali § Pengajuan draft Perwali ke Bagian Hukum Setda	
6	Finalisasi Peraturan Walikota tentang Perencanaan Terintegrasi untuk Penurunan Stunting di Kota Banjarmasin § Persiapan pelaksanaan kegiatan public hearing Perwali § Pelaksanaan public hearing § Revisi Perwali pasca public hearing § Finalisasi Perwali	Penetapan Peraturan Walikota tentang Perencanaan Terintegrasi untuk Penurunan Stunting di Kota Banjarmasin
7	Pencanangan Komitmen Bersama “Cegah Stunting Itu Penting” § Persiapan pelaksanaan kegiatan § Pelaksanaan kegiatan § Laporan hasil kegiatan	Terwujudnya komitmen bersama
8	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek perubahan	Laporan monev

No.	Tahapan (<i>Milestone</i>)	Capaian <i>Output</i> Tahapan
	§ Persiapan monev § Pelaksanaan monev § Laporan hasil monev	

b. Jangka Menengah

Tabel 3 Jangka Menengah

No.	Tahapan (<i>Milestone</i>)	Capaian <i>Output</i> tahapan
1	Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Perencanaan Terintegrasi dalam Penurunan Prevalensi Stunting di Kota Banjarmasin	Sasaran tahu dan faham tentang Peraturan Walikota
2	Pencanangan komitmen bersama “Cegah dan Tangani <i>Stunting</i> di Kota Banjarmasin”.	Dokumen pernyataan komitmen
3	Fasilitasi pembentukan model penanganan “Cegah dan Tangani <i>Stunting</i> di Kota Banjarmasin”.	Terbentuknya <i>Pilot Project</i> di Desa Lokus
4	Pelaksanaan kegiatan <i>pilot project</i>	Terbentuknya <i>pilot project</i>
5	Monitoring dan evaluasi	Dokumen laporan

c. Jangka Panjang

Tabel 4 Jangka Panjang

No.	Tahapan (<i>Milestone</i>)	Capaian <i>Output tahapan</i>
1	Mengawal perencanaan terintegrasi mulai Rencana Kerja PD.	Perencanaan terintegrasi
2.	Pengembangan <i>Pilot Project</i> “Cegah dan Tangani <i>Stunting</i> di Kota Banjarmasin”.	Bertambahnya <i>pilot project</i> .

Untuk mencegah masalah *stunting* dibutuhkan upaya yang bersifat holistik dan saling terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 harus disikapi dengan koordinasi yang kuat di tingkat pusat dan aturan main dan teknis yang jelas di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pelaksana ujung tombak. Diseminasi informasi dan *advocacy* perlu dilakukan oleh unit teknis kepada *stakeholders* lintas sektor dan pemangku kepentingan lain pada tingkatan yang sama. Untuk jajaran struktural kebawahnya perlu dilakukan *knowledge transfer* dan edukasi agar mampu menjelaskan dan melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada level keluarga.

8.6 Kesimpulan

1. Faktor determinan yang berpengaruh terhadap kasus *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin adalah tingkat pendidikan ibu yang rendah dan pendapatan keluarga rendah. Sedangkan faktor yang kurang bermakna dalam

mempengaruhi stunting adalah umur ibu yang mempunyai risiko rendah, ibu yang mempunyai tinggi badan, riwayat berat badan lahir normal, balita ASI eksklusif, balita melakukan imunisasi dasar lengkap, ibu yang mempunyai kurang dari atau sama dengan dua anak, dan faktor tidak memiliki Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada saat kehamilan.

2. Perencanaan sosial yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan milestone yang dibagi atas perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Aderamo, A.J. and S.A. Magaji. (2010). Rural Transportation and the Distribution of Public Facilities in Nigeria: A Case of Edu Local Government Wilayah of Kwara State. *JHum Ecol*, 29(3): 171-179.
- Adha, M. A., Ariyanti, N. S., Mustiningsih, Maisyaroh, & Bafadal, I. (2020). Analysis of Success Factors Implementation of Computer-Based Management Information System in Higher Education. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 508(Icite), 80–85. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201214.217>
- Adisasmita, H.R. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2005). *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Penerbit Graha Ilmu.
- Almaiah, M. A., Al-Khasawneh, A., & Althunibat, A. (2020). Exploring the critical challenges and factors influencing the E-learning system usage during COVID-19 pandemic. *Education and Information Technologies*, 25(6), 5261–5280. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10219-y>
- Andersen, P. (2007). *What is Web 2.0?: ideas, technologies and implications for education.*

[http://21stcenturywalton.pbworks.com/f/What is Web 2.0.pdf](http://21stcenturywalton.pbworks.com/f/What%20is%20Web%202.0.pdf)

Aribawa, D. (2016). Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20(1), 1–13. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss1.art1>

Aridiyah FO, Rohmawati N, Ririanty M., 2015. e-Jurnal Pustaka Kesehatan. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada anak balita di wilayah pedesaan dan perkotaan (The Factors Affecting Stunting on Toddlers in Rural and Urban Areas)*. Vol.3, No. 1. [Online]. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/view/2520>. [diakses tanggal 16 Mei 2020].

Asdak, Chay. 2014. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Asep Warlan Yusuf, *Pengaturan Dan Kebijakan Penataan Ruang Dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. PRO JUSTITIA Tahun XVIII Nomor 2 April 2000

Azriful, Bujawati, Emmi., Habibi, Aeni, Syahratul dan Yusdarif., 2018. Al-Sihah : Public Health Science Journal. *Determinan Kejadian Stunting pada Balita Usia 24-59 Bulan di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene*. Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2018. [Online]. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Sihah/article/view/6874>. [diakses tanggal 16 Mei 2020].

- Azwar, A., 2008. Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi ketiga, Bina Putera Aksara. Jakarta.
- Azwar, S. (2012). Penyusunan Skala Psikologi edisi 2. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kemenkes RI., 2007. *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS 2007)*. Jakarta : Balitbangkes Kemenkes.[Online].<http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/Riskesda%202007%20Nasional.pdf> [diakses tanggal 14 September 2019].
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kemenkes RI., 2010. *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS 2010)*. Jakarta : Balitbangkes Kemenkes.[Online].<http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/Riskesda%202010%20Nasional.pdf>. [diakses tanggal 14 September 2019].
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kemenkes RI., 2013. *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS 2013)*. Jakarta : Balitbangkes Kemenkes.[Online].<http://www.depkes.go.id/resources/download/general/Hasil%20Riskesda%202013.pdf>. [diakses tanggal 14 September 2019].
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kemenkes RI., 2018. *Riset Kesehatan Dasar*

(RISKESDAS2018). Jakarta: Balitbangkes
Kemenkes.[Online]. http://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/materi_rakorpop_2018/Hasil%20Riskesdas%202018.pdf. [diakses tanggal 14 September 2019].

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI tahun 2018.<http://www.depkes.go.id/resources/download/infoterkini/materirakorpop2018/Hasil%20Riskesdas%202018.pdf> -
Diakses Juni 2020

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2018. *Pedoman Pelaksanaan : Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*. Edisi November 2018. [Online].<http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Pedoman%20Pelaksanaan%20Intervensi%20Penurunan%20Stunting%20Terintegrasi%20Di%20Kabupaten%20Kota.pdf>. [diakses tanggal 14 September 2019].

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Kota Salatiga Tahun 2012-2032*. Salatiga : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Catalog : Statistik Indonesia 2022*. In *Statistik Indonesia 2022* (Vol. 1101001). <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>

- Badan Pusat Statistik Kota Salatiga. (2018). Kota Salatiga dalam Angka 2018. Salatiga : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga
- Bambang Setyabudi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sebagai Kerangka Berfikir Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah. Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Bekerjasama dengan ESP2 – DANIDA, Jakarta, 2007
- Bappenas. (2018). Rencana Aksi Nasional Dalam Rangka Penurunan Stunting. Rembuk Stunting: Jakarta.
- Barrow, C., and Brown. 2005. *Enterprise development: the challenges of starting, growing and selling a business.* London: Thomson.**
- Barton, D. 2000. *Principles, legal forms and public policy.* In: Cobia, D. and Anderson, B. (Eds.). *Cooperatives: An economic and management perspective.* Unpublished manuscript.**
- Bennett, J. E., Stevens, G. A., Mathers, C. D., Bonita, R., Rehm, J., Kruk, M. E., Riley, L. M., Dain, K., Kengne, A. P., Chalkidou, K., Beagley, J., Kishore, S. P., Chen, W., Saxena, S., Bettcher, D. W., Grove, J. T., Beaglehole, R., & Ezzati, M. (2018). NCD Countdown 2030: worldwide trends in non-communicable disease mortality and progress towards Sustainable Development Goal target 3.4. *The Lancet*, 392(10152), 1072–1088. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31992-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31992-5)
- Bennett, J. E., Stevens, G. A., Mathers, C. D., Bonita, R., Rehm, J., Kruk, M. E., Riley, L. M., Dain, K., Kengne, A. P., Chalkidou, K.,

Beagley, J., Kishore, S. P., Chen, W., Saxena, S., Bettcher, D. W., Grove, J. T., Beaglehole, R., & Ezzati, M. (2018). NCD Countdown 2030: worldwide trends in non-communicable disease mortality and progress towards Sustainable Development Goal target 3.4. *The Lancet*, 392(10152), 1072–1088. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31992-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31992-5)

Bina, O. (2008). Context and systems: Thinking more broadly about effectiveness in Strategic Environmental Assessment in China. *Environmental Management*, 42(4), 717– 733. <https://doi.org/10.1007/s00267-008-9123-5>

Bishop, J. 2012. *Lessons from the emotivate project for increasing take-up of big society and responsible capitalism initiatives.* Hershey: IGI Global.

Brontowiyono, W. (2016). KLHS Untuk RTRW dengan Pendekatan Daya Dukung Lingkungan. Yogyakarta: Gre Publishing

Candra, Aryu., 2013. Journal of Nutrition and Health. *Hubungan Underlying Factors Dengan Kejadian Stunting Pada Anak 1-2Th.* Vol.1, No.1. [Online]. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/actanutrica/article/view/4847/0>. [diakses tanggal 15 Mei 2020].

Cardinale, R. (2019). Theory and practice of State intervention: Italy, South Korea and stages of economic development. *Structural Change and Economic Dynamics*, 49, 206–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.strueco.2018.09.004>

- Chan, T., Sennik, S., Zaki, A., & Trotter, B. (2015). Studying with the cloud: the use of online Web-based resources to augment a traditional study group format. *Cjem*, 17(2), 192–195. <https://doi.org/10.2310/8000.2014.141425>
- Chapman, S. A., Goodman, S., Jawitz, J., & Deacon, A. (2016). A strategy for monitoring and evaluating massive open online courses. *Evaluation and Program Planning*, 57, 55–63. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.04.006>
- Chen, T., Cong, G., Peng, L., Yin, X., Rong, J., & Yang, J. (2020). Analysis of user satisfaction with online education platforms in china during the covid-19 pandemic. *Healthcare (Switzerland)*, 8(3). <https://doi.org/10.3390/healthcare8030200>
- Creswell, John. W. (2010). *Research Design Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan. Mixed*; Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- De Montis, A. (2013). Implementing Strategic Environmental Assessment of spatial planning tools. A study on the Italian provinces. *Environmental Impact Assessment Review*, 41, 53–63. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2013.02.004>
- Dessler, Gary. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alih bahasa: Eli Tanya. Penyunting Bahasa: Budi Supriyanto. Jakarta: Indeks.
- Development Initiatives. (2018). *2018 Global Nutrition Report: Shining a light to spur action on nutrition*. Bristol, UK: Development

Initiatives.<https://globalnutritionreport.org/reports/global-nutrition-report-2018/> - Diakses Juni 2020

Dewanta. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Aditya Media, Yogyakarta.

Dhawan, S. (2020). Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. *Journal of Educational Technology Systems*, 49(1), 5–22. <https://doi.org/10.1177/0047239520934018>

**Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Vol 11
No. 1 Juli 2020 (ISSN: 2086-3454 EISSN: 2549-4058)**

Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Laporan Stunting di Kota Banjarmasin Tahun 2021.
<https://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1319516/waspada-kasus-stunting-di-banjarmasin-begini-penjelasan-dr-vita>

Dwicaksono, A. dan Setiawan, D., 2013. Monitoring Kebijakan dan Anggaran: Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Kesehatan Ibu. Perkumpulan Institute for Innovation, Partisipatory Development and Governance dan International Budget Partnership (IBP), Bandung.

Dwivedi, Y. K., Hughes, D. L., Coombs, C., Constantiou, I., Duan, Y., Edwards, J. S., Gupta, B., Lal, B., Misra, S., Prashant, P., Raman, R., Rana, N. P., Sharma, S. K., & Upadhyay, N. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on information management research and practice: Transforming education, work and life. *International Journal of Information Management*, 55(July), 102211.

<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102211>

Eddy, Triono. 2009. *Hukum Lingkungan Hidup. Pendekatan Normatif dan Empiris*. Pustaka Bangsa Press. Medan.
European Commission (2005) *Impact Assessment*

Erdin, C., & Ozkaya, G. (2020). Contribution of small and medium enterprises to economic development and quality of life in Turkey. *Heliyon*, 6(2), e03215.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03215>

Ezzati, M., Pearson-Stuttard, J., Bennett, J. E., & Mathers, C. D. (2018). Acting on non-communicable diseases in low- and middle-income tropical countries. *Nature*, 559(7715), 507–516.
<https://doi.org/10.1038/s41586-018-0306-9>

Ezzati, M., Pearson-Stuttard, J., Bennett, J. E., & Mathers, C. D. (2018). Acting on non-communicable diseases in low- and middle-income tropical countries. *Nature*, 559(7715), 507–516.
<https://doi.org/10.1038/s41586-018-0306-9>

Friedman, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers. Cambridge, USA. Gallion.

Gede, I., Suci, S., Suyanta, W., Darna, W., Wijoyo, H., & Setyawati, E. (2020). a Measure of Effectiveness Level of Online Learning Amid Covid-19 Pandemic in the Course of the Project Management Information Systems (Case Study in Stikom Yos Sudarso Purwokerto). *Journal of Critical Reviews*, 7(12), 4059–

4069. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.12.586>

Gofine, M., & Clark, S. (2017). *INNOVATION IN coordination*. 24(2), 2016–2018.

Gumbira, Sa'id. dan A. Harizt Intan. 2000. Manajemen Agribisnis. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hadjimanolis, A. (2000). An investigation of innovation antecedents in small firms in the context of a small developing country. *R&D Management*, 30, 235–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-9310.00174>

Hafeez, S., . Z. U. S., & . K. U. R. (2011). The Effect of Market and Entrepreneurial Orientation on Firm Performance. *Information Management and Business Review*, 3(6 SE-Research Paper). <https://doi.org/10.22610/imbr.v3i6.956>

Hafsah, M. J. (2004). Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Infokop Nomor 25 Tahun XX*.

Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>

Hamzah, L. M., & Agustian, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor Umkm Di Indonesia. *Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 215–228.

- Handoko, T. Hani, 2009. Manajemen. Edisi 2. Yogyakarta : BPFPE.
- Hariyono. (2010). *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma*. Pustaka Pelajar.
- Hegazy, I. R. (2015). Integrating strategic environmental assessment into spatial planning in Egypt. *Environmental Development*, 15, 131–144. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2015.05.001>
- Hope, C., Reilly, J. J., Griffiths, G., Lund, J., & Humes, D. (2021). The impact of COVID-19 on surgical training: a systematic review. *Techniques in Coloproctology*, 25(5), 505–520. <https://doi.org/10.1007/s10151-020-02404-5>
- Howkins. (2011). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya Penerapan Usaha Kecil*. PT. Bumi Aksara.
- Hrastinski, S. (2009). A theory of online learning as online participation. *Computers & Education*, 52(1), 78–82. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2008.06.009>
- Hulse, E. S. G., Atun, R., McPake, B., & Lee, J. T. (2021). Use of social impact bonds in financing health systems responses to non-communicable diseases: scoping review. *BMJ Global Health*, 6(3), e004127. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-004127>
- Hulse, E. S. G., Atun, R., McPake, B., & Lee, J. T. (2021). Use of social impact bonds in financing health systems responses to non-communicable diseases: scoping review. *BMJ Global Health*, 6(3), e004127. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-004127>

Huraerah. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Magister Hukum Hidayana*, Vol. 5, No. 3 : 526 – 542, September, 2016

Illsley, B., Jackson, T., & Deasley, N. (2014). Spheres of public conversation: Experiences in strategic environmental assessment. *Environmental Impact Assessment Review*, 44, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2013.08.001>

J Botelho, V Machado, L Proença, J. R. (2019). Cloud-based collaboration and productivity tools to enhance self-perception and self-evaluation in senior dental students: A pilot study. *European Journal of Dental Education*, Volume23(Issue1), e53–e58.

Jhingan.M.L (2013) *Ekonomi Pembangunan dan Perendanaan PT.Jagagrafindo Persada*, Jakarta.

Kajian Kebijakan Dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting Di Indonesia ... (Ni Ketut Aryastami, Dan Ingan Tarigan **Kajian Kebijakan Dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting Di Indonesia Policy Analysis On Stunting Prevention In Indonesia** <Http://Dx.DoI.Org/10.22435/Bpk.V45i4.7465.233-240>

- Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- Kemenkes RI. (2013). *Riset Kesehatan Dasar 2013*.
<https://doi.org/10.1126/science.127.3309.1275>
- Kemenkes RI. (2013). *Riset Kesehatan Dasar 2013*.
<https://doi.org/10.1126/science.127.3309.1275>
- Kemenkes RI. (2018). *Riset Kesehatan Dasar 2018*. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*.
- Kemenkes RI. (2018). *Riset Kesehatan Dasar 2018*. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Danish International Development Agency (2007) *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ciayumajakuning* (Tjuk Kuswantojo, et.al). Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Danish International Development Agency (2007) *Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis* (Suryo Adiwibowo, et. Al). Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Pusat Pengembangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Padjadjaran (2006) *Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penataan Ruang* (Chay Asdak). Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (2007). *Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. Jakarta : Kementerian

Negara Lingkungan Hidup

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2019) Grand design pengembangan korporasi petani sebagai penggerak ekonomi Kawasan pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2020) Pedoman penumbuhan dan pengembangan korporasi petani di Kawasan pertanian”, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020.

Kianmehr, L., & Kamali, A. (2015). The paradox of online education: Images, perceptions, and interests. *Proceedings of the 32nd Information Systems Education Conference, ISECON 2015*, 5(9), 199–210. <https://doi.org/10.17265/2161-623x/2015.09a.002>

KLH. 2007. Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.

Kravvaris, D., Kermanidis, K. L., & Ntanis, G. (2016). How MOOCs Link with Social Media. *Journal of the Knowledge Economy*, 7(2), 461–487. <https://doi.org/10.1007/s13132-014-0219-2>

Kusumaningrum, Nugraheni Restu., 2003. Skripsi. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Ibu, Aktivitas Ekonomi Ibu dan Pendapatan Keluarga Terhadap Status Gizi Balita di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.[Online]. <https://core.ac.uk/download/pdf/16507639.pdf>. [diakses tanggal 16 Mei 2020].

- Labombang, M. (2019). Dampak Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pada Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Toli-Toli. Palu : *MEKTEK*. 13(1); pp. 53-59.
- Latifah Amir. Rencana Salah Satu Instrumen Hukum Administrasi Dalam Menentukan Tujuan Pemerintahan. Vol 2 No 2: Jurnal Ilmu Hukum 2011
- Li, T., Wang, H., Deng, B., Ren, W., & Xu, H. (2016). Strategic environmental assessment performance factors and their interaction: An empirical study in China. *Environmental Impact Assessment Review*, 59, 55–60. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2016.03.008>
- Lobos, V., & Partidario, M. (2014). Theory versus practice in Strategic Environmental Assessment (SEA). *Environmental Impact Assessment Review*, 48, 34–46. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.04.004>
- Maheswaran, L., Basiruddin, R., Bobi, P., Muniadi, R., Embang Anak Stephen Sile, E., & Leong Wei, L. (2020). User Satisfaction on E-Learning Platform during Movement Control Order Period in a Private Higher Learning Institute in Malaysia. *Asian Journal of Research in Education and Social Sciences*, 2(3), 147–154. <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajress>
- Malisa , Ariani (2020). Determinan Penyebab Kejadian Stunting Pada Balita : Tinjauan Literatur . **Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Vol 11 No. 1 Juli 2020 (**

ISSN: 2086-3454 EISSN: 2549-4058 url:
http://ojs.dinamikakesehatan.unism.ac.id/ DOI:
<https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1>

Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi* (6th ed.). Erlangga.

Manzoor, F., Wei, L., & Siraj, M. (2021). Small and medium-sized enterprises and economic growth in Pakistan: An ARDL bounds cointegration approach. *Heliyon*, 7(2), e06340. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06340>

Maradzika, J., Makwara, I. P., Chipunza, S. (2016). Factors Associated with Stunting among Children Aged 0 – 59 Months in Harare City, Zimbabwe. *International Journal of Child Health and Nutrition*, 5, Page: 31-44

Martono, T., & Riyanto, G. (2017). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Modal Sosial Dan Modal Finansial Terhadap Kinerja Umkm Bidang Garmen Di Kabupaten Klaten. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf

Mawaddah, (2015), Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia) Terhadap Pencapaian Mdgs Di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, Tesis, Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan

Mcleod, A. 2006. *Types of cooperatives*. Olympia: Northwest Cooperative Development Center.

- Miles, M. P., & Covin, J. G. (2000). Environmental marketing: A source of reputational, competitive, and financial advantage. *Journal of Business Ethics*, 23(3), 299–311.
- Miri, Barak & Gizell, G. (2020). Novice Researchers' Views About Online Ethics Education and the Instructional Design Components that May Foster Ethical Practice. *Science and Engineering Ethics*, 26, 1403–1421. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-019-00169-1>
- Monteiro, M. B., & Partidário, M. R. (2017). Governance in Strategic Environmental Assessment: Lessons from the Portuguese practice. *Environmental Impact Assessment Review*, 65(1), 125–138. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2017.04.007>
- Mugianti, Sri., Mulyadi, Arif., Anam, Agus Khoirul dan Najah, Zian Lukluin., 2018. Jurnal Ners dan Kebidanan (JNK). *Faktor Penyebab Anak Stunting Usia 25-60 Bulan di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar*. Vol. 5, No. 3 Desember 2018. [Online].<http://jnk.phb.ac.id/index.php/jnk/article/view/374/pdf>. [diakses tanggal 14 September 2019].
- Murdani, Sus Widayani, H. (2019). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). *Jurnal Abdimas*, 23(2), 152–157.

- Mustikaningrum, Ardian Candra., Subagio Hertanto W dan Margawati, Ani., 2016. *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition). Determinan Kejadian Stunting pada Bayi Usia 6 Bulan di Kota Semarang*. Vol.4, No.2.[Online].<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgi/article/view/16302>. [Diakses tanggal 10 September 2019].
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2007). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Nasrul, Hafid, Fahmi., Thaha, Abdul Razak., Suriah., 2015. *Jurnal MKMI. Faktor Risiko Stunting Usia 6-23 Bulan di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*. Vol. 11, No.3 September 2015. [Online]. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/mkmi/article/view/518>. [diakses tanggal 10 September 2019].
- Navastara. (2014). *Indonesia dalam Menghadapi Era Baru Ekonomi Kreatif*. PT. Bumi Aksara.
- Ni'mah, Khoirun dan Nadhiroh, Siti Rahayu., 2015. *Media Gizi Indonesia. Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita*. Vol. 10, No. 1. [Online]. <https://ejournal.unair.ac.id/MGI/article/view/3117/2264>. [diakses tanggal 13 September 2019].
- Norfai, 2020. *Fenomena dan Determinan Kejadian Stunting Pada Balita*. UNISKA MAB, Banjarmasin
- Obi, J., Ibidunni, A. S., Tolulope, A., Olokundun, M. A., Amaihian, A.

- B., Borishade, T. T., & Fred, P. (2018). Contribution of small and medium enterprises to economic development: Evidence from a transiting economy. *Data in Brief*, 18, 835–839. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.03.126>
- Oktarina, Zilda dan Sudiarti, Trini., 2013. *Jurnal Gizi dan Pangan. Faktor Risiko Stunting Pada Balita (24-59 Bulan) di Sumatera*. Vol. 8, No.3, November 2013.[Online].<https://www.researchgate.net/publication/321967779>
[FAKTOR RISIKO STUNTING PADA BALITA 2459 BULAN DI SUMATERA.](#) [diakses tanggal 13 September 2019].
- Oktavia, R., 2011. Skripsi. *Hubungan Pengetahuan Sikap Dan Perilaku Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Baduta di Puskesmas Biaro Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Tahun 2011*. Depok: FKM UI.
- Palino, Inochi Lara., Majid, Ruslan dan Ainurafiq., 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Mahasiswa (JIM Kesmas). Determinan Kejadian Stunting pada Balita Usia 12-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Puuwatu Kota Kendari Tahun 2016*. Vol. 2, No. 6 Mei 2017. [Online]. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIMKESMAS/article/view/2870>. [diakses tanggal 10 September 2019].
- Panchenko, L. (2013). *Massive Open Online Course As an Alternative Way of*.

Parera, A. (2021). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Gramedia Pustaka Utama.

Partidario, M., Augusto, B., Vicente, G., & Lobos, V. (2009). Learning the Practice of Strategic-Based SEA. Paper presented in 29th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment Accra, 17-22 May, 2009, (May), 17–22

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Jakarta

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 31 Oktober 2016. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 228. Jakarta

Perk, J. (2017). Non-communicable diseases, a growing threat to global health. *European Society of Cardiology*, 15.

Perk, J. (2017). Non-communicable diseases, a growing threat to global health. *European Society of Cardiology*, 15.

Picauly, Intje dan Toy, Sarci Magdalena., 2013. Jurnal Gizi dan Pangan. *Analisis Determinan dan Pengaruh Stunting Terhadap Prestasi Belajar Anak Sekolah di Kupang dan Sumba Timur*, NTT. Vol. 8, No. 1. [Online]. [ournal.ipb.ac.id/index.php/jgizipangan/article/view/7254](http://journal.ipb.ac.id/index.php/jgizipangan/article/view/7254). [diakses tanggal 16 Mei 2020].

- Pokhrel, S., & Chhetri, R. (2021). A Literature Review on Impact of COVID-19 Pandemic on Teaching and Learning. *Higher Education for the Future*, 8(1), 133–141. <https://doi.org/10.1177/2347631120983481>
- Pramiyanti, A. (2008). *Studi Kelayakan Bisnis Untuk UKM*. Media Pressindo.
- Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI, 2016. Infodatin: *Situasi Balita Pendek*. Jakarta : Pusdatin Kemenkes RI 2016. [Online]. <https://www.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/situasi-balita-pendek-2016.pdf>. [diakses tanggal 15 mei 2020].
- Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI, 2018. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan : *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. Semester I 2018*. Jakarta: Pusdatin Kemenkes RI 2018. [Online].<https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/buletin/Buletin-Stunting-2018.pdf>. [diakses tanggal 14 September 2019].
- Rahadian, Strategi Pembangunan Berkelanjutan. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Volume III, No. 01, Februari, 2016
- Rahayu A, Yulidasari F, Putri AO, Rahman F., 2015. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. *Riwayat berat badan lahir*

dengan kejadian stunting pada anak usia bawah dua tahun. Vol.10,No.2November.[Online].<http://journal.fkm.ui.ac.id/index.php/kesmas/article/view/882>.[\[diakses](#) tanggal 13 September 2019].

- Rahayu, R. M., Pamungkasari, E. P., & Wekadigunawan, C.S. P. (2018). The Biopsychosocial Determinants of Stunting and Wasting in Children Aged 12-48 Months. *Journal of Maternal and Child Health*, 3(2), Hal: 105-118
- Rameez, A., Fowsar, M. A. M., & Lumna, N. (2020). Impact of Covid-19 on Higher Education Sectors in Sri Lanka: A Study based on South Eastern University of Sri Lanka. *Journal of Educational and Social Research*, 10(6), 341–349. <https://doi.org/10.36941/jesr-2020-0132>
- Redjeki, F., & Affandi, A. (2021). Utilization of Digital Marketing for MSME Players as Value Creation for Customers during the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Science and Society*, 3(1), 40–55. <http://ijsoc.goacademica.com/index.php/ijsoc/article/view/264>
- Rega, C., & Baldizzone, G. (2015). Public participation in Strategic Environmental Assessment: A practitioners' perspective. *Environmental Impact Assessment Review*, 50, 105–115. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.09.007>
- Roca, J. C., Chiu, C. M., & Martínez, F. J. (2006). Understanding e-learning continuance intention: An extension of the Technology

Acceptance Model. *International Journal of Human Computer Studies*, 64(8), 683–696.
<https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2006.01.003>

Rochmah, Amalia Miftakhul., 2017. Naskah Publikasi. *Faktor- Faktor yang Berhubungan dengan Stunting pada Balita Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Wonosari I*. Program Studi Bidan Pendidik Jenjang Diploma IV, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas “Aisyiyah Yogyakarta. [Online].<http://digilib.unisayogya.ac.id/2535/1/AMALIA%20MIFTAKHUL%20ROCHMAH%201610104405%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>. [diakses tanggal 16 Mei 2020].

Ruray, Syaiful Bahri, 2012. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Bandung: P.T. Alumni

Rusmiwari, S., Merry, R., Wulandary, C., Studi, P., Administrasi, I., & Tunggadewi, U. T. (2017). *Dengan Sosial Ekonomi Masyarakat*. 6(2), 37–42.

Sadler, B. (2005). *Strategic Environmental Assessment at the Policy Level: Recent Progress, Current Status and Future Prospect*. Paper presented in IAIA Global Conference on SEA. Prague, September 26-29, 2005

Saide, S., & Sheng, M. L. (2021). Knowledge exploration–exploitation and information technology: crisis management of teaching–learning scenario in the COVID-19 outbreak. *Technology Analysis*

and Strategic Management, 33(8), 927–942.
<https://doi.org/10.1080/09537325.2020.1854714>

Saragih, B. 2002. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan sistem agribisnis kerakyatan dan berkelajutan. Analisis kebijaksanaan pendekatan pembangunan dan kebijaksanaan pengembangan agribisnis. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Sarbaini, Jumadi, Abbas, E. W., & Rajiani, I. (2019). Managing e-learning in public universities by investigating the role of culture. *Polish Journal of Management Studies*, 20(1), 394–404.
<https://doi.org/10.17512/pjms.2019.20.1.34>

Setiawan, Eko.,Machmud, Rizanda dan Masrul., 2018. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2018*. Vol. 7, No. 2. [Online].
<http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/813>.
[diakses tanggal 16 Mei 2020].

Setyabudi, Bambang. 2007. *Buku Pegangan Kajian Lingkungan Strategis*. Jakarta: Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup

Shahzad, A., Hassan, R., Aremu, A. Y., Hussain, A., & Lodhi, R. N. (2021). Effects of COVID-19 in E-learning on higher education institution students: the group comparison between male and

- female. *Quality and Quantity*, 55(3), 805–826.
<https://doi.org/10.1007/s11135-020-01028-z>
- Shukur, H. M., Zeebaree, S. R. M., Zebari, R. R., Hussan, B. K., Jader, O. H., & Haji, L. M. (2021). Design and Implementation of Electronic Enterprise University Human Resource Management System. *Journal of Physics: Conference Series*, 1804(1).
<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1804/1/012058>
- Silalahi, M.D. 2001. Hukum Lingkungan: dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2001. Hlm. 78-79
- Sjafrizal. (2015). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sriyana, J. (2010). *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*.
- Sugiyono, 2010. Metodologi Penelitian Administrasi, Alfabeta. Jakarta.
- Sugiyono. (2009). *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta. Sugiyono.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. (2019) Metode Penelitian Kuantitatif, CV. Alfabeta, Yogyakarta
- Suharto, Edi. (2015). Membangun Masyarakat Memberdayakan

Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.

Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi Modern*. PT Raja Grafindo Persada.

Sukmawati, Hendrayati, Chaerunnimah, Nurhumaira., 2018. *Media Gizi Pangan. Status Gizi Ibu Saat Hamil, Berat Badan Lahir Bayi dengan Stunting pada Balita Usia 06-36 Bulan di Puskesmas Bontoa*. Vol. 25, No. 1. [Online]. <http://journal.poltekkesmks.ac.id/ojs2/index.php/mediagizi/article/view/55>. [Diakses tanggal 13 September 2019].

Sultan, N. (2010). Cloud computing for education: A new dawn? *International Journal of Information Management*, 30(2), 109–116. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2009.09.004>

Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Penerbit Andi.

Suratmo, 2004, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Surna T Djajadiningrat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun I NO. 1/1994

Tejasari, M. (2008). *Peranan Sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi*.

Thor, D., Xiao, N., Zheng, M., Ma, R., & Yu, X. X. (2017). An interactive online approach to small-group student presentations and discussions. *Advances in Physiology Education*, 41(4), 498–

504. <https://doi.org/10.1152/advan.00019.2017>

- Todaro, P. M. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.
- Todaro, Smith (2006) *Pembangunan Ekonomi (Edisi ke Sembilan)*
Erlangga, PT.Gelora Aksara Pratama. Jakarta
- Trihendradi, C (2010) *SPSS 18 Analisis Data Statistik*, CV.Andi
Offset, Yogyakarta
- url:<http://ojs.dinamikakesehatan.unism.ac.id> DOI :
https://doi.org/10.33859/dksm.v1i11__Determinan_Penyebab_Kejadian_Stunting_Pada_Balita:_Tinjauan_Literatur
- Utami AD, Indarto D, Dewi YLR. (2017). The Effect of Nutrient Intake and Socioeconomic Factor Toward Stunting Incidence Among Primary School Students in Surakarta. 2(1), page: 1–1
- Vicky Y. Takalumang, Vekie A. Rumat, A. L. C. . L. (2018). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kepulauan Sangihe. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01), 1–12.
- Victor, D., & Agamuthu, P. (2014). Policy trends of strategic environmental assessment in Asia. *Environmental Science and Policy*, 41, 63–76.
<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2014.03.005>
- Wahyudi. (2010). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. salemba empat.

- Wang, W. L. C. (2012). Antecedences to continued intentions of adopting e-learning system in blended learning instruction: A contingency framework based on models of information system success and task-technology fit. *Computers & Education*, 58(1), 88–99. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.07.008>
- Weldeslassie, H. A., Vermaack, C., Kristos, K., Minwuyelet, L., Tsegay, M., Tekola, N. H., & Gidey, Y. (2019). Contributions of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to Income Generation, Employment and GDP: Case Study Ethiopia. *Journal of Sustainable Development*, 12(3), 46. <https://doi.org/10.5539/jsd.v12n3p46>
- WHO. (2018). *Noncommunicable diseases country profiles 2018*. <https://www.who.int/publications/i/item/ncd-country-profiles-2018>
- WHO. (2018). *Noncommunicable diseases country profiles 2018*. <https://www.who.int/publications/i/item/ncd-country-profiles-2018>
- Wibowo, Rudi, 2004 “Koperasi dan korporasi petani : Kunci pembuka pengembangan agribisnis berdaya saing, berkerakyatan dan berkeadilan.**
- Widiarto, (2001). *Arti Perencanaan Wilayah dan Kota Ditinjau dari Dimensi Ekonomi*, Artikel Semiloka peran dan Kompetensi Perencanaan Dalam Penmbangunan daerah dan Nasional. ASPI-GTZ-UNISBA

Wirawan. (2012). *Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang*. Bumi Aksara.

Yanti, N. D., Betriana, F., & Kartika, I. R. (2020). Faktor Penyebab Stunting pada Anak: Tinjauan Literatur. *REAL in Nursing Journal (RNJ)*, Vol. 3, No.1, Hal: 1 – 10

Yuniarti, T. S., Margawati, S., & Nuryanto. (2019). Faktor Risiko Kejadian Stunting Anak Usia 1 – 2 Tahun di Daerah Rob Kota Pekalongan. *Jurnal Riset Gizi*, Vol.7 No.2, Hal: 83 – 90

GLOSARIUM

Cooperative farming didefinisikan sebagai model usaha tani yang merupakan hasil penggabungan pengelolaan lahan yang dimiliki oleh anggotanya untuk mencapai skala ekonomis dalam pengelolaannya.

Belajar Daring merupakan belajar yang menggunakan jaringan internet.

Korporasi petani adalah suatu kesatuan badan usaha yang dibentuk dari, oleh dan untuk petani.

Hermeneutika adalah pendekatan khusus terhadap pemahaman dan penafsiran tulisan-tulisan yang dipublikasikan.

Teori Sektoral merupakan salah satu teori geografi mengenai tata letak sebuah daerah atau kawasan.

Stunting merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama.

Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan (sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya) akibat transportasi angin, air atau es.

Gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Konsensus merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan bersama.

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.

Imunisasi adalah proses ketika sistem imun seseorang diperkuat untuk melawan suatu infeksi.

Variabel adalah sesuatu yang dapat mengubah nilai.

INDEKS

- A**
- Aglomerasi, 30
- B**
- Balita, 220, 223, 260, 272, 284, 285, 288,
289, 291, 293, 296, 297
- Bayi, 223, 249, 288, 296
- D**
- Deglomerasi, 30
- Dependensi, 234
- Determinan, 223, 249, 272, 285, 288, 289,
290, 297
- E**
- Energi, 27, 245, 248, 261, 262, 270
- F**
- Faktor, 32, 63, 74, 75, 124, 125, 176, 208,
241, 249, 250, 262, 269, 272, 287, 288,
289, 293, 294, 299
- Fungsionalis, 234
- G**
- Gizi, 220, 221, 282, 284, 288, 289, 290,
296, 299
- H**
- Hermeneutika, 227, 300
- I**
- Ilmuan, 301
- K**
- Komprehensif, 158
- konsensus, 186, 187, 236, 239
- Korporasi, 92, 93, 113, 114, 116, 119, 300
- Kualitatif, 271, 295
- M**
- Milestone, 265, 268, 269
- Modernisasi, 234
- moneter, 5, 6, 57, 70, 77
- P**
- Pandemi, 44, 46, 51, 143
- Pemerintah, 5, 50, 60, 78, 88, 112, 113,
119, 121, 140, 142, 166, 172, 175, 177,
178, 179, 181, 183, 184, 190, 213, 214,
242, 278, 290, 293
- probabilistik, 229
- S**
- Sektoral, 25, 26, 300
- Stunting, 220, 223, 224, 240, 241, 249,
265, 266, 267, 268, 269, 272, 274, 275,
276, 278, 282, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 299,
300

TENTANG PENULIS



Dr. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jabatan Lektor Kepala di Universitas Lambung Mangkurat yang lahir di Barabai pada tanggal 7 february 1973 dan bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan

Selatan, penulis memiliki salah satu kemampuan Perencanaan Pembangunan serta keterampilan teknis sebagai Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan Sertifikat Kompetensi Kewirausahaan Industri.

Penulis menempuh pendidikan terakhir S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Airlangga Surabaya. Penulis pernah memiliki pengalaman menjabat sebagai Ketua di Jurusan IESP FEB ULM tahun 2017-2019, kemudian dilanjutkan menjadi Wakil Dekan III FEB ULM pada tahun 2019/2020 dan menjadi Anggota Senat FEB ULM pada tahun 2021-2023. Penulis juga melakukan beberapa pengalaman pengabdian salah satunya Tim Pansel JPT Kota Banjarbaru 2019, Kab. Banjar 2017-2020 dan Kab. HST 2022. Penulis juga pernah mendapat beberapa penghargaan salah satunya sebagai Dosen Berprestasi Fakultas Ekonomi ULM.